

## **BAB V: PERIODE REVOLUSI KEMERDEKAAN (1945-1950)**

### **A. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Buku teks untuk kurikulum 1975**

##### **a. Siswoyo, S.W., 1979, *Sejarah Untuk SMA*, jilid 1**

Buku teks karangan Siswoyo menerapkan pendekatan deskriptif-narratif, yaitu menceritakan bagaimana suatu peristiwa sejarah terjadi secara kronologis. Dia menggunakan urutan kejadian sebagai landasan cerita. Sebagai pembukaan, buku teks menguraikan kemerdekaan Indonesia dengan menggambarkan kegentingan situasi menjelang proklamasi kemerdekaan. Di satu pihak, Jepang sebagai penjajah semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya, sehingga Jendral Terauchi memanggil Soekarno, Hatta dan Radjiman ke Saigon serta menjanjikan kepada mereka kemerdekaan Indonesia. Di pihak lain, suara kaum pergerakan pun terpecah. Soekarno, Hatta dan tokoh-tokoh senior pergerakan lain memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan tidak menentang penjajah Jepang. Sebaliknya kelompok pemuda menolak kemerdekaan yang mengesankan pemberian Jepang. Buku teks Siswoyo (1979, jilid 1: 189) menggambarkan kelompok pemuda sebagai berikut:

... Mereka menolak "pemberian" kemerdekaan oleh Jepang seperti yang dianut oleh golongan tua yang selama itu bekerja sama dengan Jepang. Kelompok-kelompok pemuda itu adalah:

- a. Kelompok Sukarni dengan tokoh-tokohnya Sukarni, Adam Malik, Armunanto, Pandu Kartawiguna, Maruta Nitimiharjo.
- b. Kelompok Syahrir dengan tokohnya Syahrir.
- c. Kelompok pelajar dengan tokoh-tokohnya Chaerul Saleh, Johan Nur, Sayoko, Syarif Thayeb, Darwis, Eri Sudewo.

- d. Kelompok Kaigun yang bekerja pada Angkatan Laut Jepang dengan tokoh-tokohnya Mr. Ahmad Subarjo, Sudiro yang biasanya dipanggil Mbah, Wikana, E. Khairudin.

Perbedaan pandangan yang terjadi kemudian dilanjutkan dengan urutan kejadian berikutnya, yaitu penculikan terhadap Soekarno beserta istri dan anaknya serta Moh. Hatta oleh kelompok pemuda. Mereka menyembunyikan kedua pemimpin nasional itu di Rengasdengklok dengan tujuan agar keduanya tidak dipengaruhi atau diperalat pemerintah pendudukan Jepang. “Akibat penculikan itu, maka rapat PPPKI yang direncanakan tanggal 16 jam 10.00 tidak dapat dilangsungkan. Namun pemuda-pemuda tidak dapat berbuat banyak, karena kepemimpinannya belum mengakar di kalangan rakyat” (Siswoyo 1979, jilid 1: 189). Maksudnya, pemuda mengacaukan rencana rapat PPPKI dan juga tidak dapat berbuat banyak dalam usaha memproklamasikan kemerdekaan.

Kegagalan rancangan proklamasi oleh pemuda menjadikan “kerjasama” antara golongan pemuda dengan golongan tua. Tiga tokoh kunci golongan tua, yaitu Akhmad Subarjo, Hatta dan Soekarno, memegang peran sangat penting dalam usaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, seperti digambarkan sebagai berikut:

Atas usaha Mr. Ahkmad Subarjo yang bekerja pada Kaigun diperoleh tempat untuk mengadakan pertemuan di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat. Laksamana Maeda adalah wakil Angkatan Laut Jepang di Jakarta dan bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia . Rumah dan kedudukannya menjamin keamanan terhadap kemungkinan serbuan dari Angkatan Darat Jepang. Sebelum pertemuan dimulai Bung Karno dan Bung Hatta menjumpai Majen Nisyimura untuk menjajagi sikapnya tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pimpinan tentara Jepang ini dengan segan menyetujui karena tanggung jawabnya memelihara *satus quo*, tetapi menyadari akibat-akibat yang tidak diinginkan bila menghadapi proklamasi. Sehingga, terjadi semacam persetujuan tidak tertulis: bahwa bangsa Indonesia

dibiarkan berbuat menurut kehendaknya asalkan tidak terjadi hal-hal yang sifatnya merugikan Jepang.

Dalam ruangan tamu di rumah Laksamana Maeda berkumpul anggota PPPKI dan kelompok pemuda. Sedangkan Ir. Sukarno, Drs: Moh. Hatta dan Mr. Akhmad Subarjo menyusun konsep proklamasi di ruang makan atas dan disaksikan oleh Sayuti Melik, Sukarni, B.M. Diah, Sudiro. Konsep kemudian dimusyawarahkan di ruang tamu. Atas usul Sukarni teks Proklamasi ditandatangani oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia, bukannya sebagai pimpinan PPPKI. Naskah Proklamasi yang telah disetujui kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar jam 04.00. Kedua tokoh tersebut adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (Siswoyo 1979, jilid 1: 189-190).

Buku teks Siswoyo menutup uraian tentang proklamasi kemerdekaan dengan menjelaskan makna kemerdekaan Indonesia. Dijelaskan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia mempunyai dua arti penting. Pertama, bangsa Indonesia dengan tekad dan kekuatan sendiri menjadikan bangsa merdeka bebas dari penjajahan asing. Kedua, bangsa Indonesia menjadi pelopor bangsa Asia Afrika karena merupakan bangsa yang pertama merdeka setelah Perang Dunia II.

Dengan bertitik tolak pada kegentingan masa proklamasi, buku teks Siswoyo mengalirkan narasinya ke masa perang kemerdekaan. Periode itu dibuka dengan uraian tentang tiga keputusan PPPKI untuk memenuhi persyaratan sebagai negara Indonesia merdeka, kemudian dilanjutkan dengan narasi tentang inti perang kemerdekaan yang disebutnya sebagai “perjuangan fisik dalam mempertahankan negara yang masih muda terhadap bahaya asing” (Siswoyo 1979, jilid 1: 194). Buku teks Siswoyo menggambarkan lebih banyak sebagai perjuangan yang berupa peperangan, seperti peperangan rakyat Semarang melawan Jepang sebagai berikut:

Di antara yang terbesar Pertempuran Lima Hari di Semarang (15-20 Oktober 1945). Peristiwa tersebut bermula dengan pemindahan tentara Jepang

dari Cepiring ke Semarang. Mereka yang dipindahkan berontak dan bergabung dengan pasukan Kidobutai di Jatingaleh. Pemberontakan tersebut dihadapi BKR dan pemuda yang menimbulkan pertempuran; yang terbesar di Simpang Lima Semarang di mana Tugu Muda sekarang berdiri. Korban dari Jepang kira-kira 1.000 orang, sedangkan dari bangsa Indonesia kira-kira 2.000 orang di antaranya Dr. Karyadi Kepala Laboratorium Pusat. Rumah Sakit Rakyat (Purusara). Untuk mengabadikan pengorbanannya rumah sakit tersebut sekarang dinamakan Rumah Sakit Dr. Karyadi (Siswoyo 1979, jilid 1: 196).

Selain perjuangan militer, buku teks Siswoyo juga memaparkan perjuangan diplomasi. Dia menguraikan berbagai perundingan yang dilakukan Indonesia Pertemuan Jakarta dan Hoge Veluwe pada tahun 1945 sampai dengan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Setelah menyajikan berbagai perundingan antara Indonesia-Belanda, buku teks menguraikan berbagai permasalahan dalam negeri seperti persetujuan dan pemberontakan antar kelompok kepentingan. Peristiwa 3 Juli 1946, Negara-negara Boneka Belanda, Peristiwa Madiun, dan Darul Islam secara berurutan dinarasikan.

Pada bagian akhir buku teks Siswoyo mengubah pola penceritaan dari berlandas urutan kejadian menjadi berbasis tema, yaitu kondisi sosial, politik, dan budaya bangsa Indonesia pada masa revolusi. Sebagai contoh, pada uraiannya pada tema kondisi ekonomi, pengarang antara lain menggambarkan sebagai berikut:

RI mewarisi perekonomian yang buruk dari Jepang. Persediaan barang sangat sedikit dan uang mengalami inflasi yang parah karena tanpa jaminan. Untuk melemahkan RI agar lebih mudah dikalahkan, maka Belanda menjalankan blokade ekonomi. Patroli Angkatan Laut Belanda memblokade perairan RI sehingga perdagangan dengan luar negeri terhalang. Seorang perwira ALRI yang banyak melakukan "penyelundupan" dari Sumatra ke luar negeri adalah Mayor John Lie yang mempergunakan kapal Outlaw. Beberapa kali AURI dapat menerobos blokade Belanda untuk membawa pemimpin-pemimpin RI ke luar negeri (Siswoyo 1979, jilid 1: 205).

Dalam bidang keberagaman, buku teks karangan Siswoyo menggambarkan dari perspektif usia atau generasi, wilayah atau daerah dan bidang kehidupan. Dari perspektif usia, diuraikan fenomena perbedaan pandangan mengenai proklamasi kemerdekaan. Golongan muda menghendaki proklamasi yang tidak ada campur tangan Jepang, sedang golongan tua menghendaki melalui PPKI yang notabene bentukan Jepang. Dari perspektif wilayah diuraikan pengambilalihan kekuasaan Jepang oleh pemuda daerah sekaligus perebutan senjatanya dan perlawanan terhadap pasukan Sekutu/Belanda. Buku teks antara lain menggambarkan aksi pemuda Sumatra Utara sebagai berikut:

Di Sumatra Utara rakyat dibawah Gubernur Mr. Teuku M. Hassan dan pemuda di bawah Akhmad Tahir mengambil alih gedung-gedung pemerintah dan merebut senjata dari Jepang. TKR pun segera dibentuk. Sementara itu Belanda dibawah Westerling mendaratkan pasukannya di Medan kemudian disusul oleh tentara Sekutu dibawah Brijen T.E.D. Kelly. Insiden terjadi dan mulailah perjuangan yang dikenal sebagai Pertempuran Medan Area (13 Oktober 1945) (Siswoyo 1979, jilid 1: 196).

Dari perspektif bidang kehidupan, secara ringkas digambarkan perkembangan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam bidang politik sekilas diuraikan suasana liberal yang ditandai oleh adanya partai-partai politik. Pada bidang budaya antara lain digambarkan peristiwa berdirinya Perguruan Tinggi Gajah Mada sebagai berikut:

Pada tanggal 3 Maret 1946 didirikan Balai Perguruan Tinggi Kebangsaan Gajah Mada dengan dua Fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Sastra. Balai tersebut mempergunakan Pagelaran dan Sitihiinggil bagian depan Istana Sultan Hamengku Buwono. Dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 1949 semua perguruan tinggi negeri di Yogyakarta digabungkan menjadi universitas. Tanggal 19 Desember 1949 diresmikan berdirinya Universitas Gajah Mada yang merupakan universitas pertama RI dengan Prof. Dr. Sarjito sebagai rektornya (Siswoyo 1979, jilid 1: 206).



Buku teks Siswoyo dalam membahas sejarah sebagai sintesis menuju integrasi nasional menekankan proses penyatuan diantara negara-negara bagian melalui penggabungan, seperti dinarasikannya sebagai berikut:

Sementara itu rakyat dari berbagai negara bagian ciptaan Belanda menuntut agar negaranya bergabung dengan negara lain yang menurut konstitusi memang memungkinkan. Akibatnya pada tanggal 5 April 1950 RIS hanya terdiri dari tiga bagian: RI, Negara Sumatra Timur dan NIT. Atas usul RI, pemerintah RIS mengadakan perundingan dengan dua negara bagian lain tentang 'pembentukan negara kesatuan kembali. Akhirnya Parlemen dan Senat RIS mengesahkan Rencana Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden RIS Ir. Sukarno membacakan Piagam terbentuknya NKRI. Hari itu juga Presiden Sukarno menerima kembali jabatan Presiden RI dari Acting Presiden Mr. Asaat dan Perdana Menteri Moh. Hatta menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk kembali menjadi Wakil Presiden RI (Siswoyo, 1979, jilid 1: 208).

**b. Idris, Z.H. dan Tugiyono, 1979, *Sejarah Untuk SMA***

Buku teks Idris juga menggunakan pendekatan deskriptif naratif dengan menempatkan urutan kejadian sebagai landasan. Pembahasan revolusi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada satu bab khusus, yaitu bab VII dengan judul "Persatuan Nasional dan Perjuangan Kemerdekaan". Secara historis, buku teks Idris menggambarkan perjuangan kemerdekaan mulai dari pembentukan BPUPKI yang kemudian berubah menjadi PPKI. Uraian dibuka dengan memberikan landasan untuk melegitimasi kemerdekaan Indonesia. Landasan nasional berupa Undang Undang Dasar 1945, sedang pada level internasional pengarang menggunakan berbagai piagam yang mengakui kemerdekaan setiap manusia dan masyarakat. Dari sudut pandang ini, pendekatan deskriptif-naratif yang diterapkan tidak lagi hanya menggambarkan apa yang terjadi, tetapi dikembangkan dengan menambah pemaknaan "edukatif".

Pada bagian detik-detik proklamasi, buku teks Idris juga menjelaskan aspirasi yang berkembang di kalangan kaum pergerakan generasi tua dan muda. Bahkan buku teks Idris menambahkan dengan mengutip pandangan seorang pelaku sejarah, yaitu B.M. Diah sebagai berikut:

"Saya hanya membuat perbedaan antara mereka (pemimpin 45) dan pemuda (45), tentang cara pendekatan masalah peka dan pelik yang dihadapi seluruh bangsa Indonesia pada saat itu. Pemuda yakin, bahwa dengan kekerasan, dengan tindakan-tindakan revolusioner, kita harus memerdekakan bangsa dan tanah air, apapun juga korban yang harus diberikan. Pimpinan tua-an menghendaki agar dipikirkan masak-masak, bahwa jika dapat jangan banyak korban, dan kemerdekaan sebenarnya sudah di tangan ....

Bung Karno - Bung Hatta berpegang terus pada jalan yang resmi, yang legal, yang tidak melanggar hukum-hukum. Sebabnya sudah ada PPKI. Bung Karno - Bung Hatta ingin hanya jalan itulah yang diambil. Karena sah, karena juga terhindar daripada tindakan-tindakan militer Jepang. Dan dengan demikian terhindar dari pengorbanan rakyat .... percuma" (Idris, 1979: 68-69).

Pada bagian selanjutnya yang diberi judul "Perjuangan Bersenjata", uraian buku teks tidak lagi semata-mata menggunakan urutan kejadian, tetapi mengembangkan tema sebagai landasan narasinya. Dibuka dengan kriteria kematangan suatu bangsa untuk merdeka, yaitu apabila bangsa itu "telah rela dan bersedia memberikan pengorbanan yang sebesar-besarnya, pengorbanan hak milik dan jiwa raganya untuk kemerdekaannya" (Idris, 1979: 72), buku teks menjadikan perjuangan bersenjata sebagai fokus. Perjuangan bersenjata dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu pertempuran sekitar 1945-1946, perang kemerdekaan I dan II, serta pembentukan badan perjuangan. Pada sub bagian pertempuran sekitar 1945-1946 dikisahkan berbagai konflik fisik antara rakyat di berbagai daerah dengan kekuatan asing. Sebagai contoh, buku teks Idris (1979: 73) memaparkan pertempuran yang terjadi di Jakarta sebagai berikut:

Antara bulan-bulan September, Oktober, Nopember, dan Desember 1945 merupakan masa pertempuran dan teror di Jakarta, seperti pertempuran di daerah-daerah Kemayoran, Tanah Tinggi, Klender, Bekasi dan Tangerang.

Pasukan-pasukan Sekutu (Inggris-NICA) tidak hanya melakukan teror terhadap rakyat, tetapi juga melakukan penembakan-penembakan terhadap pimpinan Republik Indonesia, seperti Mr. Moh. Roem, Perdana Menteri Syahrir dan lain-lain. Dengan semakin meningkatnya aksi-aksi teror itu maka: (-) penduduk Jakarta berduyun-duyun mengungsi dan hijrah ke luar kota. (-) mendesak Pemerintah segera membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945 untuk menjamin dan memperkuat keamanan umum. (-) pada tanggal 4 Januari 1946 presiden dan Wakil Presiden terpaksa meninggalkan ibu kota Jakarta dan hijrah ke Yogyakarta.

Pada sub bagian perang kemerdekaan, diuraikan berbagai usaha yang dilakukan oleh Belanda dalam usaha kembali menjajah Indonesia, baik politik maupun militer. Usaha dalam bidang politik antara lain dengan membentuk “negara-negara boneka” atau yang dikenal juga sebagai BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*), seperti Negara Indonesia Timur (NIT), Negara Sumatra Timur (NST), negara Sumatra Selatan, negara pasundan, Negara Madura, dan negara Jawa Timur; serta satu Negara yang berdiri sendiri seperti Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur (Idris, 1979: 81-82). Usaha bidang militer diuraikan tentang serangan besar-besaran pasukan Belanda yang oleh penulis disebut sebagai perang kemerdekaan.

Pada sub bagian pembentukan badan perjuangan, digambarkan proses pembentukan badan perjuangan yang dipelopori pemuda pada masa sebelum proklamasi kemerdekaan. Ketika masa kemerdekaan badan perjuangan dikatakan tumbuh menjadi Badan Keamanan Rakyat dan kemudian menjadi Tentara Rakyat Indonesia:



Pada tanggal 22 Agustus 1945 untuk menampung para pejuang bekas anggota *PETA* dan *HEIHO* dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), di samping itu timbul bermacam-macam badan perjuangan dan lasykar Rakyat, seperti Lasykar Rakyat . Jakarta Raya, Lasykar Rakyat Jawa Barat, Barisan Pelopor, Barisan Banteng, Hisbullah, Pesindo, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), Dewan Perjuangan Jawa Tengah, Dewan Perjuangan Jawa Timur dan lain-lain.

Akibat semakin meningkatnya aksi-aksi teror pasukan Sekutu dan NICA di daerah Jakarta dan di kota-kota lain, maka pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan Maklumat Pemerintah dibentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan tujuan untuk memperkuat *perasaan keamanan umum*. Sebagai kepala Staf Umum TKR diangkat *Mayor Urip Sumohardjo*.

Tanggal 5 Oktober 1945 merupakan Hari lahirnya Angkatan Perang Republik Indonesia (Hari ABRI).

Berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 25 Januari 1946 nama TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) yang merupakan satu-satunya Organisasi militer negara Republik Indonesia (Idris, 1979: 85-86).

Selain membahas perjuangan bersenjata, buku teks Idris juga menguraikan secara ringkas perjuangan diplomasi yang disebutnya sebagai perjuangan politik.

Dalam bentuk poin-poin, Idris antara lain memaparkan sebagai berikut:

Siasat diplomasi/berunding dengan pihak Belanda baik dengan perantaraan pihak Inggris maupun PBB menghasilkan persetujuan-persetujuan sebagai berikut :

- a. persetujuan Linggarjati, 25 Maret 1947
- b. persetujuan Renville, 17 Januari 1948
- c. Roem-Royen Statement, 7 Mei 1949
- d. persetujuan KMB, 27 Desember 1949 (Idris, 1979: 90).

Pemaparan dalam bentuk poin-poin seperti tampak pada kutipan di atas berlanjut sampai akhir. Hal itu terlihat antara lain ketika membahas perjanjian-perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Sebagai contoh, ketika membahas Konferensi Meja Bundar, pengarang menuliskan sebagai berikut:

*Konperensi Meja Bundar (KMB), 23 Agustus 1949 - 2 Nopember 1949.* (a) Tempat: Den Haag (Negeri Belanda); (b) Di bawah perantaraan: UNCI (PBB); (c) Delegasi R.I. dipimpin oleh P.M. Moh. Hatta; Delegasi Belanda dipimpin oleh P.M. Dr. Williem Drees. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II; (d) Hasil-hasil KMB: (1) Piagam pengakuan Kedaulatan (27 . Desember 1949), (2) Pembentukan RIS (16 negara bagian), (3) Pembentukan Uni

Indonesia- Belanda (4) Pembubaran tentara Hindia Belanda (KL dan KNIL) yang kemudian diintegrasikan ke dalam APRIS (5) Piagam tentang Kewargaan Negara (6) Persetujuan tentang ekonomi-keuangan, (7) Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali dalam waktu satu tahun berikutnya (Idris, 1979: 100).

Buku teks Idris menarasikan keberagaman hanya dalam pengertian usia dan wilayah atau daerah. Dalam keberagaman dari perspektif usia, dipaparkan tentang perbedaan pandangan antara generasi muda dan tua tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain sebagai berikut:

Oleh karena itu berita menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus sangat mengejutkan di Indonesia, sehingga untuk beberapa saat menimbulkan keragu-raguan pada sementara pemimpin Indonesia untuk bertindak radikal dalam memproklamasikan kemerdekaan. Dalam kaitan situasi demikian inilah maka terjadi "peristiwa Rengasdengklok" tanggal 15 Agustus 1945 tengah malam, yaitu aksi sekelompok pemuda kelompok Sukarni, Chairul Saleh, Yusuf Kunto, Singgih dan lain-lain untuk menyingkirkan Sukarno - Hatta keluar kota, yaitu ke daerah Rengasdengklok di Bekasi, karena kedua tokoh ini tidak bersedia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945 tanpa turut sertanya PPKI. (Panitia ini direncanakan mengadakan sidang pertama tanggal 16 Agustus pagi harinya) (Idris, 1979: 68).

Dari perspektif daerah, paling tidak terdapat dua macam peristiwa historis yang secara menonjol dideskripsikan, yaitu pada saat masyarakat daerah melakukan pelucutan senjata Jepang dan pada saat menghadapi usaha pasukan Inggris dan Belanda yang hendak kembali menempatkan Indonesia sebagai daerah jajahan Belanda. Pada peristiwa pelucutan tentara Jepang, buku teks antara lain menguraikan fenomena historis lokal yang terjadi di Semarang sebagai berikut:

Pertempuran lima hari di Semarang, 15-20 Oktober 1945, merupakan aksi para pemuda, pelajar dan rakyat untuk merebut senjata dan melucuti pasukan-pasukan Jepang. Usaha yang dirintis oleh Mr. Wongsonegoro sudah hampir berhasil karena pihak Jepang telah menyetujui untuk menyerahkan senjatanya. Tetapi karena kurang sabarnya massa pemuda akhirnya pasukan-pasukan Jepang berbalik melakukan teror sehingga meletus pertempuran selama lima hari yang menimbulkan banyak korban. Dari pihak kita kira-kira 2000 jiwa

pemuda dan rakyat gugur, di antaranya adalah *dokter Karyadi*, sedang pihak Jepang 850 orang yang terbunuh. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam bentuk "monumen Tugu Muda" di kota Semarang (Idris, 1979: 74).

Meski sudah memaparkan fenomena lokal, pada peristiwa pelucutan tentara Jepang, narasi buku teks terlihat masih terbatas pada daerah di Jawa. Uraian yang lebih beragam terdapat pada peristiwa aksi masyarakat ketika menghadapi usaha pasukan Inggris dan Belanda. Pada topik itu, pengarang menarasikan aksi masyarakat di berbagai daerah, seperti di Surabaya, Bandung, Minahasa, Makasar, Medan, Sumatra Barat, Bali dan Palembang.

Dalam hal menyusun sejarah sebagai sintesis menuju integrasi, seperti buku teks lainnya, buku teks Idris menguraikan proses penggabungan negara-negara bagian. Perbedaannya uraian buku teks Idris lebih mendetail dan kaya. Pada bagian penggabungan, uraian secara lebih terarah menggambarkan proses negara-negara bagian “menggabungkan diri ke dalam negara Republik Indonesia”. Bahkan dengan rinci buku teks menguraikan negara-negara yang melakukan penggabungan sebagai berikut:

...dalam bulan Maret, April dan Mei 1950 telah dilakukan penggabungan-penggabungan ke dalam negara kesatuan RI yaitu: Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, Daerah Kalimantan Timur, Daerah Banjar, Daerah Dayak Besar, Daerah Kalimantan Tenggara, Bangka, Belitung, dan Daerah Riau.

Kemudian Padang dimasukkan Daerah Sumatra Barat, Sabang dimasukkan Daerah Aceh, Kotawaringin dimasukkan ke dalam wilayah R.I. Sehingga negara federal RIS tinggal terdiri atas RI, NIT dan NST. Tetapi akhirnya kedua Negara bagian federal inipun memberikan mandat penuh kepada Pemerintah RIS untuk mengadakan perundingan dengan Pemerintah RI untuk kembali kepada bentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950 berhasil ditandatangani Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI untuk menetapkan UUD negara kesatuan RI yaitu UUDS 1950 (Idris, 1979: 103).

c. **Notosusanto, Nugroho dan Yusmar Basri, ed. (1981). *Sejarah Nasional Indonesia Untuk SMA. Jilid 3.***

Periode revolusi kemerdekaan Indonesia dibahas oleh buku teks Nugroho Notosusanto satu bab penuh, yaitu Bab 4, dengan judul “Perang Kemerdekaan”. Berbeda dengan saat membahas periode pergerakan yang menggunakan pendekatan struktural, bab ini diuraikan dengan pendekatan deskriptif naratif. Paparan dimulai dengan cerita tentang proses proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 pagi sebagai titik awal. Hal itu disebabkan berbagai fenomena historis menjelang proklamasi dimasukkan ke bab sebelumnya (Bab 3).

Pada bagian awal bab 4, buku teks menggambarkan berbagai dinamika historis yang terjadi dengan menggunakan tema sebagai landasan, yaitu kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya. Pada sub bab “Menghadapi Agresi Belanda dan Pemberontakan PKI” dan selanjutnya, uraian buku teks kembali mendasarkan uraian pada urutan kejadian, sehingga judul sub bab lebih merupakan peristiwa penting yang akan diceritakan. buku teks Notosusanto antara lain menguraikan peristiwa perang antara penduduk dengan kekuatan asing yang terjadi di berbagai daerah. Salah satunya adalah peristiwa insiden bendera di Surabaya sebagai berikut:

Pada waktu yang bersamaan di Surabaya terjadi suatu peristiwa yang dikenal sebagai Insiden Bendera. Insiden disebabkan oleh perbuatan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato, Tunjungan (sekarang Hotel LMS) karena mereka merasa dirinya sebagai penguasa di Indonesia. Padahal Pemerintah RI daerah Surabaya telah melarang pengibaran bendera lain, kecuali Merah-Putih. Rakyat berbondong-bondong menyerbu Hotel Yamato dan warna biru bendera Belanda itu berhasil dirobek, dan dikibarkan kembali sebagai Merah Putih (Notosusanto, dkk., 1981, jilid 3: 105).

Selain perang, buku teks Notosusanto juga menggambarkan proses diplomasi antara Indonesia dengan Belanda. Dinamika diplomasi antara lain diuraikan sebagai berikut:

Perundingan diadakan di tempat yang netral yaitu di atas geladak kapal angkut Amerika Serikat USS *Renville* dan dibuka resmi pada tanggal 8 Desember 1947. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedang delegasi Belanda di bawah pimpinan Abdulkadir Widjyoatmodjo. Jalannya perundingan ternyata tidak selancar yang diharapkan. Untuk sementara waktu perundingan mengalami jalan buntu karena masalah militer. Untuk mengatasi kemacetan ini, masing-masing pemerintah secara tersendiri berunding dengan KTN. Sebagai hasil perundingan ini KTN menyimpulkan bahwa perundingan Linggarjati bisa dijadikan dasar perundingan bilateral, namun masalah garis demarkasi antara daerah kekuasaan masing-masing pihak, masih tetap menjadi penghalang. Pihak Belanda tetap berkeras pada tuntutan mengenai apa yang dinamakan "Garis van Mook", yaitu garis yang menghubungkan pucuk-pucuk terdepan pasukan Belanda yang masih bergerak sesudah perintah gencatan senjata 4 Agustus Dewan Keamanan PBB. Pihak Republik menolak, pertama karena Belanda hanya menguasai kota-kota dan jalan-jalan besar, sedang TNI menguasai sepenuhnya daerah pedalaman. Kedua kalinya, Republik berpendapat bahwa tidak sepatutnya daerah hasil agresi Belanda itu diakui (Notosusanto, dkk., 1981, jilid 3: 112).

Pada sub bab "Gerilya dan Jaya", buku teks mengembangkan pendekatan deskriptif lebih lanjut dengan berusaha memasukkan paparan tentang penyebab diterapkannya strategi perang gerilya. Dalam konteks ini, dijelaskan perubahan strategi dan organisasi yang dilakukan oleh pihak tentara nasional dalam rangka menghadapi tekanan pasukan Belanda. Perubahan strategi adalah dari pertahanan *linier* (garis) menjadi *wehrkreise* (lingkaran), yaitu membagi pertahanan dengan berdasar pada wilayah-wilayah konflik. Di pihak lain, perubahan organisasi diuraikan oleh buku teks Notosusanto (1981, jilid 3: 117) sebagai berikut:

Di bidang organisasi, telah dibentuk Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution dan Markas Besar Komando Sumatra (MBKS) dipimpin oleh Kolonel Hidayat. Persiapan-persiapan untuk menyelenggarakan pemerintahan militer telah dilakukan pula.



Dalam pemerintahan militer itu kecamatan lah yang menjadi basis utama pertahanan dengan sandaran kekuatan pada tenaga rakyat di desa-desa. Pasukan-pasukan TNI dan pejabat pemerintahan telah mempunyai tugas-tugas tertentu. Tempat untuk pengungsian Kepala Negara dan tokoh pemerintahan telah disiapkan. Sekali ini pada hakikatnya RI telah mempunyai persiapan untuk menghadapi aksi militer Belanda.

Dua sub bab berikutnya membahas masalah berakhirnya penahanan para pemimpin bangsa Indonesia dan Konferensi Meja Bundar (KMB). Kembalinya para pemimpin merupakan pelaksanaan persetujuan Roem-Royen seperti diceritakan sebagai berikut:

Dengan disepakatinya prinsip-prinsip Roem-Royen tersebut, Pemerintah Darurat RI di Sumatra memerintahkari kepada Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dari pihak Belanda...

Melalui perundingan segi tiga RI-BFO-Belanda pada tanggal 22 Juni 1949 di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Critchley, dihasilkan tiga keputusan, yaitu pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1949. Perintah penghentian perang gerilya diberikan setelah Pemerintah RI berada di Yogyakarta. Sidang KMB akan dilaksanakan di Den Haag. Pada 1 Juli 1949 secara resmi Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Kemudian disusul dengan datangnya para pemimpin RI dari medan gerilya. Panglima Besar Soedirman tiba kembali di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kedatangan beliau disambut dengan kebesaran militer (Notosusanto, dkk., 1981, jilid 3: 121).

Uraian tentang KMB berinti pada pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada tanggal 2 November 1949.

Buku teks Notosusanto memberikan uraian tentang keberagaman terutama dari perspektif usia dan bidang kehidupan. Senada dengan buku teks lain, buku teks Notosusanto (Jilid 3. 1981: 94-95) memaparkan bahwa para pemuda menghendaki agar Sukarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia lepas dari Jepang. Sebaliknya Sukarno-Hatta masih ingin membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Dalam memaparkan keberagaman dari perspektif bidang kehidupan, pada awal bab 4, buku teks Notosusanto menggambarkan kondisi bangsa Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya secara lebih mendalam, antara lain deskripsi kondisi sosial budaya sebagai berikut:

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ini disebabkan oleh kuatnya semangat nasional yang melampaui batas kedaerahan dan kesukuan. Adanya larangan penggunaan bahasa Belanda di jaman Jepang telah memberikan peluang bagi perkembangan bahasa Indonesia, di bidang administrasi, pendidikan, komunikasi massa dan penerjemahan buku-buku pelajaran. Perkembangan yang pesat di bidang sastra, kodifikasi bahasa, peristilahan, dan kata-kata baru membuktikan hal tersebut.

Pada awal kemerdekaan, bahasa Indonesia telah melaksanakan fungsi sebagai bahasa nasional. Perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berjalan serentak dengan perkembangan sastra Indonesia. Tampilah sastrawan-sastrawan baru yang dipelopori oleh Chairil Anwar dan Idrus, yang kemudian terkenal dengan nama Angkatan 45 (Notosusanto, dkk., 1981, jilid 3: 135).

Dari perspektif kewilayahan, keberagaman hanya digeneralisasi dengan istilah “seluruh pelosok” atau “seluruh wilayah”, tanpa berusaha mengeksplorasi keunikan dinamika historis masing-masing wilayah. Ketika menguraikan terbentuknya laskar rakyat, buku teks menjelaskan bahwa “kemudian terbentuklah badan-badan perjuangan seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Barisan Pemuda Indonesia (BPI) dan lain-lain, hampir di seluruh pelosok tanah air” (Notosusanto, dkk., 1981, jilid 3: 98). Begitu pula saat membahas pengambilalihan kekuasaan dan pelucutan senjata Jepang, pengarang antara lain menggambarkan sebagai berikut:

Di samping pengambilalihan kekuasaan, rakyat berusaha untuk memperoleh senjata-senjata Jepang. Karena umumnya pihak Jepang enggan menyerahkan senjatanya kepada pihak Indonesia, terjadilah pertempuran-pertempuran dahsyat melawan pasukan-pasukan Jepang yang masih utuh kekuatannya. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang,

Yogyakarta, Bandung, Medan, Palembang, Ujungpandang, dan tempat-tempat lain di seluruh Indonesia yang ada pasukan Jepang, berjatuh korban-korban (Notosusanto, dkk., 1981, jilid 3: 104).

Dalam hal menjelaskan sejarah sebagai sintesis menuju integrasi, buku teks Notosusanto lebih menitik dengan mencari latar belakang peristiwa itu, seperti terlihat pada uraian sebagai berikut:

Negara-negara bagian dan satuan kenegaraan yang dibentuk oleh Belanda untuk memencilkan RI itu, mulai goyah karena tidak didukung oleh rakyatnya. Tokoh-tokoh terkemuka yang duduk dalam kabinet RIS antara lain adalah Sultan Hamengkubuwono IX, Arnold Mononutu, Anak Agung Gde Agung, Ir. Herling Laoh, Sultan Hamid II dan lain-lain. Kabinet RIS merupakan "zaken-kabinet", artinya kabinet yang mengutamakan keahlian para anggotanya. Anggota-anggota kabinet ini sebagian besar orang-orang Republikan, pendukung Negara Kesatuan RI. Hanya 2 orang saja yang mendukung sistem federal yaitu Sultan Hamid dan anak Agung Gde Agung, sehingga gerakan untuk membubarkan RIS dan membentuk Negara Kesatuan RI semakin kuat...Dasar pembentukannya sangat lemah dan tidak didukung oleh satu ikatan ideologi yang kuat dan satu tujuan kenegaraan yang jelas, dan tanpa dukungan rakyat banyak (Notosusanto, dkk., 1981, jilid 3: 125).

## 2. Buku teks untuk kurikulum 1984

### a. Soewarso, Ibnoe, 1986, *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*. Jilid 3

Buku teks Ibnoe Soewarso membahas revolusi kemerdekaan Indonesia pada umumnya dan khususnya proklamasi kemerdekaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif naratif dengan berdasar urutan kejadian. Perbedaannya dengan buku teks lain, buku teks Soewarso lebih detil dalam berkisah. Sebagai contoh, pada pembacaan teks proklamasi, dimuat lengkap pidato Soekarno sebelum dan sesudah membaca teks (Soewarso, 1986, jilid 3: 66-67).

Pada bab V dibahas tentang penataan rumah tangga Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan dengan menggunakan tema sebagai fokus

penceritaan. Tema yang dimunculkan adalah pemerintahan, perekonomian, angkatan perang dan polisi. Masing-masing tema diceritakan proses perkembangannya dengan detil. Selain detil, pada bab ini buku teks juga menambahkan uraian dengan informasi terkait, seperti dilakukannya saat membahas tiga keputusan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut:

Pada tanggal 18 Agustus 1945 - jadi hanya sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan — PPKI mengadakan sidang yang pertama. Sidang tersebut; berhasil menetapkan 3 buah keputusan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Tiga buah keputusan itu ialah: (1) Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwa: (a) Yang disahkan dan ditetapkan menjadi UUD adalah rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPUPKI Akan tetapi sebelum disahkan dan ditetapkan, PPKI telah melakukan perubahan-perubahan terhadap rancangan Undang Undang Dasar tadi, (b) UUD yang disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu tetap digunakan sebagai UUD Republik Indonesia pada waktu negara kita berbentuk Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (Republik Indonesia sebagai negara bagian dari RIS), (c) UUD tersebut sejak tahun:1959 dikenal sebagai UUD 1945, (d) Rumusan Pancasila — yaitu dasar dan ideologi negara kita sebagaimana yang berlaku sekarang tercantum dalam pembukaan UUD 1945; (2) Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden; (3) Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional (Soewarso, 1986, jilid 3: 71-72).

Pada kutipan di atas tampak bahwa keputusan pertama diberi empat butir tambahan penjelasan (a sampai d) yang secara historis terjadi sebelum dan sesudah keputusan tersebut diambil.

Pada bab VI yang berjudul “Perjuangan Menyelamatkan Proklamasi Kemerdekaan”, diuraikan secara kronologis konflik kepentingan antara Pasukan Sekutu (Inggris) beserta Belanda di satu pihak dengan Indonesia di pihak lain. Penempatan Inggris dan Belanda dalam satu kelompok kepentingan diperkuat

dengan bukti adanya Civil Affairs Agreement seperti dijelaskannya sebagai berikut:

...Inggris terikat oleh persetujuan dengan Belanda dalam Civil Affairs Agreement yang ditandatangani di Chequers (dekat London) pada tanggal 24 Agustus 1945. Dalam agreement itu disebutkan “Panglima tentara pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Dalam melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan sipil, pelaksanaannya diselenggarakan oleh NICA di bawah tanggungjawab Komando Inggris. Kekuasaan itu kemudian akan dikembalikan kepada Kerajaan Belanda”. Jadi jelasnya: Inggris berjanji akan membantu Belanda untuk mengembalikan kekuasaannya (penjajahannya) di Indonesia. Itulah sebabnya kehadiran pasukan Inggris dan Australia di Indonesia diikuti oleh orang-orang Belanda, baik sebagai militer maupun sebagai pegawai-pegawai sipil NICA (Soewarso, 1986, jilid 3: 91).

Pada kutipan tersebut, buku teks menjelaskan genetika historis kesatuan kepentingan Inggris dan Belanda ketika berhadapan dengan kepentingan Indonesia. Konflik kepentingan tersebut menjadikan di berbagai daerah terjadi bentrokan fisik antara masyarakat dengan pasukan Sekutu dan Belanda. Dalam konteks ini, uraian membandingkan bentrokan yang terjadi di wilayah kerja pasukan Inggris dengan Australia. Pasukan Australia dinyatakan dapat menguasai keadaan, sehingga di wilayahnya tidak banyak terjadi peperangan dengan masyarakat Indonesia. Sebaliknya pasukan Inggris gagal menguasai keadaan. Akibatnya, terjadi banyak pertempuran di wilayah tugas pasukan Inggris, yaitu Jawa dan Sumatra (Soewarso, 1986, jilid 3: 91).

Bab VI ditutup dengan cerita tentang pertempuran Surabaya. Deskripsi pertempuran menggunakan model buku harian, yaitu pencatatan tanggal dan kejadian, antara lain sebagai berikut:

Tak lama setelah mendarat di pelabuhan Tanjung Perak ada beberapa orang perwira Sekutu yang memasuki kota tanpa minta ijin kepada Pemerintah setempat. Perwira-perwira itu ditangkap oleh para pejuang dan selanjutnya



dimasukkan ke penjara. Peristiwa inilah yang mengawali terjadinya ketegangan antara Sekutu dengan pemerintah dan rakyat Surabaya.

Secara chronologis kejadian selanjutnya sebagai berikut :

27 Oktober

Tentara Inggris memasuki kota dan menyerbu rumah penjara. Mereka berhasil membebaskan perwira-perwira Sekutu dan pegawai RAPWI (*Relief of Prisoners of War and Internees*) yang ditawan RI. Di samping itu mereka juga berhasil menduduki beberapa gedung milik pemerintah dan menyebarkan pamflet yang menuntut agar supaya rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Peristiwa itu sebenarnya tidak perlu terjadi apabila tentara Sekutu menghormati kemerdekaan bangsa kita (Soewarso, 1986, jilid 3: 93).

Pada bab VII buku teks menguraikan perpindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta. Alasannya karena tentara AFNEI dan NICA melakukan teror yang dapat membahayakan para pemimpin nasional Indonesia. Selain itu juga diuraikan tentang pendirian Universitas Gadjah Mada yang pada waktu itu dinamakan Balai Perguruan Tinggi Kebangsaan Gadjah Mada.

Mulai bab VIII sampai dengan bab XIV dibahas tentang dinamika perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Usaha untuk mengawali perundingan dilakukan oleh panglima AFNEI Christison seperti dijelaskan buku teks Soewarso (1986, jilid 3: 99) sebagai berikut:

Usaha merintis perundingan dilakukahkan sendiri oleh panglima AFNEI Letjen Sir Philip Christison. Pada tanggal 17 Nopember 1945 - di tengah-tengah menggelornya pertempuran Surabaya - untuk pertama kalinya diadakan pertemuan segitiga antara pemerintah Republik Indonesia, Belanda dan Sekutu. Dalam pertemuan tersebut pemerintah kita diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir; pihak Belanda oleh H.J. van Mook selaku Wakil Gubernur Jendral Hindia Belanda dan pihak Sekutu diwakili oleh Christison sendiri.

Oleh pemrakarsanya, pertemuan tersebut terutama dimaksudkan untuk mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda sehingga jalan menuju ke meja perundingan akan terbuka. Namun pertemuan ini berakhir tanpa hasil apapun. Karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang bertentangan.

Meski sebagian besar membahas tentang perundingan, buku teks juga membahas dinamika politik dalam negeri, seperti konferensi negara-negara BFO, pertentangan pandangan terkait dengan proses dan hasil perundingan (Bab IX) dan bahkan pemberontakan PKI 1948 di Madiun (Bab XIII).

Buku teks Soewarso menarasikan keberagaman dari perspektif perbedaan pandangan antar generasi dan bidang kehidupan. Dalam usaha menggambarkan perbedaan pandangan yang terjadi, buku teks Soewarso (1986, Jilid 3: 61) memaparkan alasan kedua pihak sebagai berikut:

Mengenai soal kemerdekaan telah terdapat kebulatan tekad di antara para pemimpin bangsa kita. Jadi semuanya telah sepakat "*Indonesia harus segera memperoleh kemerdekaan*". Akan tetapi lalu timbul perbedaan pendapat mengenai cara dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan itu. (1) Golongan pemuda seperti: *Sukarni, Adam Malik, Chaerul Saleh* dan lain-lain nienghendaki agar supaya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di luar PPKI. Jadi kita harus merebut kemerdekaan dari tangan Jepang. Karena bila mana Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan di dalam PPKI, maka kemerdekaan bangsa Indonesia akan dianggap sebagai ciptaan Jepang dan pasti akan dihancurkan oleh pasukan Sekutu yang tidak lama kemudian akan tiba di Indonesia; (2) Golongan "tua" terutama Sukarno dan Hatta : menghendaki agar supaya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dalam PPKI. Pada waktu itu nyatanya Jepang masih tetap 'berkuasa' dan bersenjata lengkap. Maka jika Proklamasi Kemerdekaan dilakukan diluar PPKI pasti akan dicegah-rintang oleh Jepang.

Pada keragaman bidang kehidupan, buku teks memaparkan perkenbangan bidang pemerintahan, perekonomian dan angkatan perang. Dalam uraiannya tentang embrio terbentuknya angkatan perang, buku teks Soewarso (1986, Jilid 3: 81). antara lain menggambarkan sebagai berikut:

Pembentukan BKR diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945. Pengumuman itu mendapat sambutan spontan dari seluruh rakyat, sehingga dalam waktu singkat di daerah-daerah lalu didirikan BKR. Ke dalam BKR itu terhimpun bekas anggota PETA, Heiho, Polisi, Seinendan dan Keibodan. Di samping unsur darat, dalam BKR terdapat pula unsur laut dan udara.

Para bekas Heiho Angkatan Laut Jepang dan pemuda-pemuda yang bekerja di pelabuhan dan Jawatan pelayaran, membentuk BKR Penjaga Pantai. Sedangkan, para pemuda bekas anggota penerbangan Belanda dan bekas anggota kesatuan penerbangan Jepang, membentuk BKR Udara.

Dalam usaha memaparkan sejarah sebagai sintesis menuju integrasi nasional, buku teks Soewarso menguraikan proses terbentuknya NKRI, terutama cara yang ditempuh sebagai berikut:

Berhubung semangat untuk kembali ke Negara Kesatuan makin kuat, maka timbul masalah: bagaimanakah cara melaksanakan terbentuknya Negara Kesatuan yang sebaik-baiknya?

Ada yang menghendaki supaya pembentukan Negara Kesatuan dilakukan dengan cara memasukkan semua Negara/Daerah Bagian ke dalam Republik Indonesia. Karena pada waktu itu sebagian besar Negara/Daerah Bagian telah bergabung dengan RI.

Pendapat tersebut kurang disetujui. Kelemahan cara itu akan menimbulkan kesulitan dalam hubungan Luar Negeri. Sebab hanya RIS yang telah mendapat pengakuan dari dunia internasional.

Maka akhirnya dipilih cara yang terbaik, yaitu pembentukan Negara Kesatuan dilakukan melalui jalan konstitusional dengan melaksanakan perubahan Konstitusi RIS. Dengan jalan demikian maka UUD Sementara Negara Kesatuan secara formal adalah Konstitusi RIS yang diubah sedemikian rupa sehingga bentuk federal dari RIS berubah menjadi bentuk yang unitaris (Soewarso, 1986, jilid 3: 146).

#### **b. Moedjanto, G., dkk., 1992, *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid 3**

Buku teks Moedjanto memaparkan revolusi kemerdekaan Indonesia menggunakan pendekatan deskriptif naratif dengan landasan waktu kejadian dan tema. Uraian yang berlandas pada waktu kejadian antara lain tampak ketika dia menceritakan tentang proses lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti yang lainnya, buku teks Moedjanto juga menceritakan kekalahan Jepang dalam perang Asia Timur Raya dan ketegangan

antara pemuda dengan generasi tua tentang bagaimana mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pendekatan deskriptif naratif dengan landasan waktu dapat disimak antara lain pada uraian tentang ketegangan antara pemuda dan golongan tua di bawah ini:

Dalam pertentangan itu golongan muda ada di bawah pengaruh Syahrir, seorang pejuang illegal yang tajam pandangan-pandangan politiknya. Golongan muda mengatur aksinya di laboratorium Mikrobiologi di Pegangsaan Timur, Jakarta. Pimpinan rapat pada saat itu, 15 Agustus 1945, adalah Chaerul Saleh. Keputusan rapat pada saat itu adalah mendesak Soekarno dan Moh. Hatta agar segera memutuskan hubungan dengan Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu Jepang menyerah. Untuk itu, Darwis dan Wikana diminta menemui Soekarno untuk menyampaikan keinginan golongan muda. Ternyata Soekarno tidak dapat menerima permintaan itu sehingga terjadi ketegangan. Moh. Hatta dan Subarjo mempersilakan para pemuda memproklamasikan kemerdekaan sendiri kalau tidak mau menunggu. Mereka tetap berpendirian perlu ada sidang PPKI terlebih dahulu. Akibat tidak adanya persesuaian faham itu maka pada tanggal 16 Agustus dini hari golongan muda mengutus Yusuf Kunto, Sukarni, dan Singgih untuk "menculik" Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Peristiwa itu lalu dikenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Mengapa mereka dibawa ke Rengasdengklok? Rengasdengklok adalah suatu kota kecamatan dan di kota itu aman dari jangkauan pihak mana pun. Apalagi di sana terdapat kesatuan Peta yang revolusioner (Moedjanto, dkk., 1992, jilid 3: 86).

Dari kutipan di atas tampak bahwa uraian berdasar tanggal kejadian. Karakteristik lain pendekatan deskriptif naratif yang diterapkan juga dapat disimak dari penggunaan kalimat tanya di tengah-tengah uraian. Dari sudut pandang ini, latar belakang atau alasan yang diuraikan oleh pengarang menyatu dengan paparan tentang proses terjadinya suatu peristiwa sejarah.

Pada bab 4 yang diberi judul "Perang Kemerdekaan", uraian dibuka dengan memaparkan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Paparan menggunakan tema sebagai landasan cerita, yaitu kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sebagai contoh, buku teks

memaparkan kehidupan politik pada awal kemerdekaan dengan menceritakan tentang pengesahan Undang-Undang Dasar, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pembentukan Komite Nasional.

Pada sub bab kedua, buku teks Moedjanto membahas tentang agresi Belanda dan Pemberontakan PKI. Pembahasan agresi Belanda dibuka dengan pengambilalihan kekuasaan dan perebutan senjata dari tangan militer Jepang.

Terlepas dari beban baru Jepang sebagai penjaga stabilitas Indonesia sebelum datangnya Sekutu, bangsa Indonesia tetap pada jalur pendiriannya, yakni kemerdekaan dan pengambil-alihan kekuasaan dari tangan Jepang. Rakyat Indonesia tidak lagi menghiraukan seruan tentara Jepang karena rakyat beserta para pemimpinnya merasa penting untuk segera menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia yang baru saja didirikan. Di berbagai kota, rakyat serentak mengambil alih kantor-kantor pemerintah, telekomunikasi, pelabuhan, bandar udara, dan sebagainya. Menghadapi persoalan tersebut pendirian tentara Jepang tidak lagi seragam, karena ada yang secara keras melawan demi menaati perintah Sekutu, tetapi ada pula yang menyerah tanpa perlawanan demi menyelamatkan diri dari ancaman pejuang Indonesia.

Orang-orang Indonesia tidak hanya melakukan pengambil-alihan kekuasaan dari tangan Jepang, tetapi juga berupaya untuk merebut senjata. Senjata-senjata itu amat penting bagi Indonesia dalam perjuangan pada masa-masa berikutnya. Pertempuran-pertempuran yang terjadi di beberapa kota antara pejuang Indonesia melawan tentara Jepang pada umumnya berawal dari upaya perebutan senjata. Selain itu, digerakkan pula oleh dendam rakyat yang selama kurang lebih tiga setengah tahun diperintah secara kejam. Perebutan senjata dan pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang yang banyak menimbulkan pertempuran itu, terjadi antara bulan Agustus hingga bulan Oktober 1945. Kota-kota pertempuran antara lain terjadi di Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Palembang, Medan, dan Ujungpandang. Semuanya dilangsungkan demi satu tujuan, yakni kedaulatan negara baru Republik Indonesia (Moedjanto, dkk., 1992, jilid 3: 101).

Dari kutipan di atas, terlihat bahwa buku teks Moedjanto berusaha menyisipkan alasan pengambil-alihan kekuasaan dan senjata, yaitu “menegakkan kedaulatan”, “pentingnya senjata bagi perjuangan berikutnya”, serta “dendam



rakyat”. Penyisipan tersebut merupakan ciri khas dari pendekatan deskriptif-narratif.

Selain harus menghadapi Jepang, bangsa Indonesia dikisahkan harus berperang melawan Inggris dan Belanda. Alasannya adalah karena kedua negara Barat tersebut hendak menempatkan Indonesia kembali menjadi negara jajahan, seperti dijelaskan oleh buku teks Moedjanto sebagai berikut:

...pihak Sekutu mendaratkan pasukan-pasukannya di beberapa kota besar di Indonesia. Pada awalnya pemerintah dan rakyat Indonesia menerima baik kedatangan Sekutu, dengan syarat tidak mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda. Akan tetapi, setelah terbukti ada tentara Belanda dan NICA membonceng Sekutu, rakyat Indonesia melakukan perlawanan keras. Memboncengnya pasukan NICA dan upaya mempersenjatai para bekas interniran Belanda dijadikan sebagai alat pengabsahan perlawanan rakyat terhadap Sekutu. Surabaya, Ambarawa, dan Bandung adalah contoh kota-kota terjadinya pertempuran antara para pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris (Sekutu) (Moedjanto, dkk., 1992, jilid 3: 103).

Selain berhadapan di medan pertempuran, Indonesia dan Belanda juga berhadapan di meja perundingan. Digambarkan bahwa perundingan tersebut sejak awal berjalan tersendat-sendat karena adanya kepentingan yang bertolak belakang antar kedua belah pihak. Meski tersendat dan bahkan menemui jalan buntu, perundingan terus diusahakan dan berhasil mencapai berbagai persetujuan, seperti perjanjian Linggarjati yang “berhasil diberlakukan oleh kedua belah pihak” pada tanggal 25 Maret 1947 (Moedjanto, dkk., 1992, jilid 3: 106).

Pada sub-sub bab yang berjudul “Bertahan dari Agresi Belanda”, diuraikan aksi militer Belanda ke wilayah yang de facto dikuasai RI. Pada bagian ini buku teks tidak hanya menceritakan, tetapi juga memasukkan pendapat pribadi pengarang. Pemaparan pendapat itu dapat disimak pada kutipan di bawah ini:

Dari Renville, RI menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat dengan masa peralihan sehingga secara tidak langsung pendudukan Belanda atas beberapa daerah RI mendapatkan pembenaran. Daerah-daerah itu akan diklaim oleh Belanda dan diakui oleh RI sampai diselenggarakan plebisit (penentuan pendapat rakyat = pepera) untuk menentukan apakah rakyat mau bergabung dengan RI atau tidak. Selain itu, pihak RI juga bersedia menarik pasukan-pasukan TNI dari daerah-daerah pendudukan Belanda atau kantong-kantong gerilya ke wilayah yang masih bersisa milik RI. Ini merupakan satu kekalahan terbesar dari sebuah perjanjian, namun perlu disadari bahwa dalam peraturan politik tingkat tinggi hal tersebut tidak bersifat mutlak dan tetap. Sejarah revolusi belum berakhir, tetapi baru sampai pada *jeda* tertentu yang masih akan berlanjut. Dalam masa jeda RI dapat menyusun kembali kekuatan dan siasat perjuangan yang baru (Moedjanto, dkk., 1992, jilid 3: 110).

Seperti buku teks lainnya, buku teks Moedjanto mengakhiri pembahasannya tentang revolusi kemerdekaan Indonesia dengan menceritakan proses perundingan yang berlangsung pasca agresi Belanda ke Yogyakarta. Diawali dengan perjanjian Roem-Royen yang berinti pada kesediaan kedua belah pihak untuk berdamai dan menyelesaikan konflik melalui meja perundingan, paparan ditutup dengan pengakuan pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI.

Buku teks karangan Moedjanto mewacanakan keberagaman melalui paparan tentang perbedaan pandangan antara pemuda dan generasi tua terkait proklamasi kemerdekaan dan perkembangan berbagai aspek kehidupan di awal masa kemerdekaan. Tentang masalah perbedaan pandangan antara pemuda dan generasi tua, buku teks Moedjanto (1992, Jilid 3: 86) menuliskan sebagai berikut:

Dalam pertentangan itu golongan muda ada di bawah pengaruh Syahrir, seorang pejuang illegal yang tajam pandangan-pandangan politiknya. Golongan muda mengatur aksinya di laboratorium Mikrobiologi di Pegangsaan Timur, Jakarta. Pimpinan rapat pada saat itu, 15 Agustus 1945, adalah Chaerul Saleh. Keputusan rapat pada saat itu adalah mendesak Soekarno dan Moh. Hatta agar segera memutuskan hubungan dengan Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu Jepang menyerah. Untuk itu, Darwis dan Wikana diminta menemui Soekarno untuk menyampaikan keinginan golongan muda. Ternyata Soekarno tidak dapat menerima permintaan itu sehingga terjadi ketegangan. Moh. Hatta dan

Subarjo mempersilakan para pemuda memproklamasikan kemerdekaan sendiri kalau tidak mau menunggu. Mereka tetap berpendirian perlu ada sidang PPKI terlebih dahulu. Akibat tidak adanya persesuaian faham itu maka pada tanggal 16 Agustus dini hari golongan muda mengutus Yusuf Kunto, Sukarni, dan Singgih, untuk "menculik" Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengasdengklok, Kabupaten Karawang.

Buku teks Moedjanto juga membahas keragaman dari perspektif bidang kehidupan dengan menggambarkan perkembangan aspek politik, ekonomi dan sosial budaya. Dalam bidang sosial, antara lain dibahas perkembangan media massa sebagai berikut:

Pers berkembang pesat hingga di daerah-daerah kota-kota kecil yang pada umumnya anti Belanda. Sampai akhir 1948 di Indonesia tercatat sejumlah 124 surat kabar sebagai media informasi cetak yang cukup potensial untuk menunjang perjuangan bangsa, seperti *Harian Merdeka* (Jakarta) dan *Berita Nasional*, serta *Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta). Untuk itu hingga kini sering ada julukan bagi persuratkabaran tertentu sebagai pers/koran perjuangan. Begitu juga peranan RRI pada masa revolusi merupakan sarana komunikasi perjuangan rakyat, baik ke dalam maupun luar negeri (Moedjanto, dkk., 1992, jilid 3:: 99).

Di lain pihak, buku teks Moedjanto tidak mengeksplorasi berbagai dinamika historis yang terjadi di daerah. Buku teks hanya menyebut saja bahwa terjadi perebutan senjata dan pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang yang banyak menimbulkan pertempiran antara lain di Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Palembang, Medan, dan Ujungpandang (Moedjanto, dkk., 1992, jilid 3:: 101).

Untuk penyusunan sejarah sebagai sintesis menuju terbentuknya integrasi nasional, buku teks Moedjanto lebih banyak meniru paparan buku teks Notosusanto, baik ketika membahas latar belakang maupun prosesnya.

c. **Notosusanto, Nugroho dan Yusmar Basri, ed. (1992). *Sejarah Nasional***

Buku teks Notosusanto, pada kurikulum 1984 tidak melakukan perubahan dari edisi untuk kurikulum 1975. Dengan kata lain, isi buku sama, sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut.

**3. Buku teks untuk kurikulum 1994**

a. **Sardiman dan A.M. Kusriyantinah. (1996). *Sejarah Nasional dan Umum untuk SMA, Jilid 2b.***

Buku teks Sardiman menguraikan revolusi kemerdekaan Indonesia dalam satu buku penuh, yaitu jilid 2c. Pemaparan dimulai dengan peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi. Hampir sama dengan buku teks lainnya, buku teks Sardiman menguraikan perbedaan pandangan di antara pemuda dan golongan tua yang melahirkan peristiwa Rengasdengklok dan dilanjutkan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Perbedaannya, Sardiman menggambarkan setiap peristiwa dengan lebih detil. Ketika menguraikan persiapan proklamasi, penggambaran dilengkapi dengan denah lantai bawah rumah Maeda serta berbagai persiapan yang dilakukan. Bahkan dijelaskan juga makna proklamasi serta tokoh-tokoh yang terlibat lengkap dengan sejarah singkat masing-masing. Sebagai contoh, Sardiman (1996, Jilid 2c: 18) antara lain menguraikan Ahmad Subarjo sebagai berikut:

### c. Ahmad Subarjo



Ahmad Subarjo lahir di Krawang pada tanggal 23 Maret 1896. Ia tutup usia pada bulan Desember 1978.

Pada masa pergerakan nasional ia aktif di PI dan PNI. Kemudian pada masa pendudukan Jepang sebagai *kaigun*, bekerja pada Kantor Kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang pimpinan Laksamana Maeda. Ia juga sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Ahmad Subarjo tidak hadir pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur No. 56

Tokoh Ahmad Subarjo boleh dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengasdengklok. Sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Subarjo, akhirnya Ir. Soekarno, Moh. Hatta dan rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta dini hari, di rumah Maeda dilaksanakan perumusan teks proklamasi. Ahmad Subarjo secara langsung berperan aktif dan memberikan andil pemikiran tentang rumusan teks proklamasi.

Pada sub bab selanjutnya, buku teks menggambarkan sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan, antara lain terbentuknya badan-badan perjuangan oleh pemuda di berbagai daerah dan pelucutan senjata tentara Jepang yang menimbulkan beberapa insiden. Dalam konteks ini, buku teks juga menguraikan sikap Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII yang merupakan penguasa kerajaan merdeka di Yogyakarta sebagai berikut:

Tanggal 19 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII telah mengirim kawat ucapan selamat kepada Presiden Sockamo dan Wakil Presiden Moh. Hatta atas berdirinya Negara Republik Indonesia dan terpilihnya dua tokoh tersebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden...

Kemudian untuk mempertegas sikapnya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945 mengeluarkan amanat antara lain sebagai berikut: (1) Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara RI, (2) Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, (3) Hubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara RI bersifat langsung, Sultan



selaku Kepala Daerah Istimewa bertanggung jawab kepada Presiden (Sardiman dkk, 1996, Jilid 2c: 28-29).

Sub bab selanjutnya membahas pembentukan lembaga pemerintahan di tingkat pusat, departemen-departemen dan pembagian wilayah negara. Pada bagian ini antara lain diuraikan proses terbentuknya tentara nasional Indonesia mulai dari berdirinya badan-badan perjuangan pemuda. Sebagai penutup bab I, digambarkan peri kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Seperti buku teks lain, buku teks Sardiman pada topik ini menguraikan kehidupan bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pada masa revolusi.

Pada bab II dibahas perjuangan senjata dan diplomasi dalam rangka menegakkan kedaulatan negara. Pada sub bab awal digambarkan secara lebih mendetil pelucutan senjata tentara Jepang di berbagai daerah oleh pemuda dan bentrokan fisik yang terjadi. Pertempuran Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Ambarawa, Medan dan Bandung dipaparkan dengan relatif detil. Pada sub bab berjudul “Antara Perundingan dan Perang”, diuraikan proses terjadinya berbagai perundingan antara Indonesia dan Belanda, serta beberapa aksi militer yang menyertainya. Seperti buku teks lain, buku teks Sardiman juga membahas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. PKI digambarkan sebagai partai yang jahat, antara lain mengembangkan perjudian seperti diuraikan sebagai berikut:

Sementara di Madiun, Magetan. dan sekitarnya terus diciptakan suasana kacau oleh orang-orang PKI. Perjudian, pencurian dan penggarongan terus terjadi hampir setiap saat. Bahkan menurut laporan Moh. Jalin Ansori, waktu itu Sekjen GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) Kecamatan Benda Magetan. biasanya rumah-rumah yang ruangan depan untuk berjudi, ruang bagian belakang, digunakan rapat PKI untuk menyusun rencana pemberontakan (Sardiman dkk, 1996, Jilid 2c: 28-29).

Pada sub bab selanjutnya dibahas agresi Belanda ke Yogyakarta pada akhir tahun 1948 yang berujung pada pengadaan Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda.

Fenomena historis terakhir periode revolusi yang dibahas oleh buku teks Sardiman adalah kembalinya RI dari negara federal menjadi negara kesatuan. Uraian dibuka dengan menggambarkan keresahan masyarakat di berbagai negara bagian serta berkembangnya keinginan untuk membentuk negara kesatuan. Proses itu mencapai puncaknya pada ditandatanganinya piagam persetujuan, seperti diceritakan sebagai berikut:

Sesuai dengan usul dari DPR Sumatra Timur, proses pembenlukan NKRI tidak melalui penggabungan dengan RI tetapi penggabungan dengan RIS. Setelah itu diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS, termasuk dari Sumatra Timur dan NIT. Melalui konferensi itu akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai persetujuan yang dituangkan dalam *Piagam Persetujuan*. Dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950 pada pokoknya berisi sebagai berikut: (1) Kesediaan bersama untuk membenluk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RI yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945, (2) Penyempumaan Konstitusi RIS. dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945. Untuk ini diserahkan kepada panitia bersama untuk menyusun Rencana UUD Negara Kesatuan (Sardiman dkk, 1996, Jilid 2c: 169).

Keberagaman yang dinarasikan oleh buku teks Sardiman antara lain dari perspektif usia/generasi dengan menggunakan perbedaan pandangan antar dua generasi tentang proklamasi kemerdekaan. Uraianya relatif representatif, yaitu dimulai dengan tokoh pergerakan nasional bawah tanah, Sutan Syahrir. Dipaparkan bahwa setelah mengetahui berita kekalahan Jepang, Syahrir menemui Hatta dan Soekarno untuk meminta keduanya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang (Sardiman, 1996, Jilid 2c: 1). Akan tetapi keduanya menolak, sehingga Syahrir melibatkan pemuda untuk

memperkuat tekanan kepada Soekarno dan Hatta. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

Hari Rabu tanggal 15 Agustus 1945 sekitar pukul 22.00 WIB, para pemuda yang dipimpin Wikana, Sukarni, dan Darwis datang di rumah Ir. Soekarno (Bung Karno) di Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Wikana dan Darwis memaksa Bung Karno untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendesak agar proklamasi dilaksanakan paling lambat 16 Agustus 1945. Bung Karno marah seraya berkata: *“Ini goroklah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggungjawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok”*. Ketegangan terjadi di rumah Bung Karno. Hal itu juga disaksikan antara lain oleh Moh. Hatta, dr. Buntaran, Ahmad Subarjo, dan Iwa Kusumasumantri (Sardiman, 1996, Jilid 2c: 2).

Keberagaman juga ditinjau dari perspektif kewilayahan. Dalam topik sambutan masyarakat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, digambarkan respon masyarakat di berbagai wilayah, meski masih terbatas pada daerah-daerah di Jawa. Salah satunya adalah sambutan masyarakat Semarang yang dipaparkan sebagai berikut:

Berita tentang proklamasi sampai pula di Semarang dan sekitarnya. Kebetulan sekitar dua bulan sebelum proklamasi di Semarang telah berdiri satuan gerakan pemuda. Hal ini merupakan kekuatan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, setelah proklamasi diikrarkan. Oleh karena itu setelah proklamasi, di Semarang muncul AMRI (Angkatan Muda Republik Indonesia). Markasnya bertempat di Bojong 89 Semarang. Kelompok ini telah memelopori gerakan aksi dalam menyambut proklamasi. Penduduk diperintahkan untuk mengibarkan bendera Merah Putih (Sardiman, 1996, Jilid 2c: 27-28).

Selain dari perspektif kewilayahan, digambarkan juga keberagaman dari perspektif bidang kehidupan, yaitu dalam bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya (Sardiman, 1996, Jilid 2c: 48-68). Dalam bidang politik dinarasikan pembentukan berbagai lembaga kelengkapan negara dan dinamika politik sampai tahun 1946. Dalam bidang ekonomi dibahas berbagai kesulitan pemerintah

Indonesia, karena buruknya kondisi ekonomi peninggalan pendudukan Jepang dan blokade yang dilakukan oleh Belanda. Pada bidang sosial-budaya, digambarkan perkembangan struktur masyarakat, pendidikan, bahasa dan sastra Indonesia, musik, seni lukis, seni drama dan film, gerakan palang merah serta media komunikasi massa.

Pada bagian akhir, buku teks Sardiman memaparkan proses integrasi menuju terbentuknya NKRI dengan berusaha mencari genetika historisnya. Uraian mengarah pada membandingkan antara RI dengan negara-negara bagian lain, sebagai berikut:

Secara politis RI mampu melaksanakan pemerintahan dan otonomisasi secara baik. Bahkan pamor RI sebagai pelaksana pemerintahan yang baik dan teratur telah menarik perhatian, serta mampu menjadi kiblat bagi negara-negara anggota RIS lainnya. Apalagi waktu itu di lingkungan negara-negara bagian muncul berbagai penyelewengan dan tindak kejahatan. Sebagai contoh Sultan Hamid dari Kalimantan Barat yang menjabat Menteri Negara telah bersekongkol dengan Westerling yang melakukan pembantaian terhadap rakyat Sulawesi Selatan. Juga adanya gerakan Andi Azis di Ujung Pandang yang telah menawan sejumlah pasukan yang pro RI. Di samping itu, di lingkungan negara-negara bagian juga banyak terjadi korupsi.

Berkaitan dengan perkembangan tersebut telah semakin mengembangkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat negara-negara bagian. Timbullah tuntutan untuk meninggalkan bentuk negara federasi dan bersatu dengan RI menjadi negara kesatuan...(Sardiman, 1996, Jilid 2c: 167)

Selanjutnya dipaparkan proses integrasi yang salah satu puncaknya adalah dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1950. Pada proses itu, antara lain diuraikan sebagai berikut:

Tuntutan negara-negara bagian untuk bergabung dengan RI juga semakin meluas. Tuntutan semacam ini memang dibenarkan oleh konstitusi RIS pada pasal 43 dan 44. Penggabungan antara negara/daerah yang satu dengan daerah yang lain dimungkinkan karena dikehendaki rakyatnya. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang

Darurat No. 11 itu, maka negara-negara bagian atau daerah Otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI di Yogyakarta. Karena semakin banyaknya negara-negara bagian/daerah yang bergabung dengan RI, maka sejak tanggal 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal tiga buah yakni RI sendiri, Negara Sumatra Timur, dan Negara Indonesia Timur (Sardiman, 1996, Jilid 2c: 168).

**b. Badrika, I Wayan. (1997). *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum untuk SMA, Jilid 2.***

Buku teks Badrika menguraikan peristiwa seputar proklamasi dengan lebih ringkas. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif naratif, digambarkan kesibukan para pemimpin Indonesia dalam menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Seperti pada buku teks lainnya, buku teks Badrika juga menguraikan perbedaan pandangan antara golongan tua dengan pemuda yang mengakibatkan peristiwa Rengasdengklok. Pada akhir pembahasan tentang proklamasi, buku teks Badrika (1997, jilid 2: 271) menengahkan refleksi sebagai berikut:

Melalui pernyataan itu sejarah baru bagi bangsa Indonesia mulai dirintis. Pernyataan itu merupakan ungkapan seluruh kepahitan; kesengsaraan, dan penderitaan yang sebelumnya dialami bangsa Indonesia. Dengan pernyataan itu, bangsa Indonesia bebas dari segala bentuk penjajahan bangsa lain. Proklamasi adalah jembatan emas yang menghubungkan dan mengantarkan bangsa Indonesia dalam mencapai masyarakat baru, kehidupan yang bebas, tanpa tekanan, dan ikatan. Proklamasi adalah seruan yang bersifat legal (berdasarkan hukum) dan (resmi). Dengan proklamasi itu bangsa Indonesia dapat menentukan jalan hidupnya sendiri sesuai dengan harkat dan martabat serta tradisi bangsa Indonesia.

Perumusan teks proklamasi itu telah mencerminkan kemandirian bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita bangsa yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, teks proklamasi memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia; apalagi hal itu telah berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan beradab.

Uraian dilanjutkan dengan sub bab tentang sambutan masyarakat Indonesia, baik yang berada di pusat maupun daerah. Pemaparan terutama pada penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di tingkat pusat



(Jakarta) penyebarluasan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui siaran radio seperti digambarkan sebagai berikut:

Berita proklamasi yang telah menyebar luas ke seluruh Jakarta, segera disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari Kantor Domei (Kantor berita pada saat pendudukan Jepang), Waidan B. Palenewen. Ia menerima teks dari seorang wartawan Domei bernama Syahrudin. Waidan B. Palenewen segera memerintahkan F. Wuz (seorang markonis) untuk menyiarkan berita proklamasi tiga kali berturut-turut. Namun baru dua kali disiarkan, seorang Jepang masuk ke ruangan radio dan mengetahui bahwa berita proklamasi telah tersiar keluar lewat udara. Dengan marah-marah orang Jepang itu memerintahkan agar penyiaran berita itu dihentikan, tetapi Waidan B. Palenewen memerintahkan F. Wuz untuk terus menyiarkan setiap setengah jam sampai dengan pukul 16.00 saat siaran berhenti (Badrika, 1997, jilid 2: 274).

Di pihak lain, sambutan pada tingkat daerah terutama diwarnai oleh kegembiraan atas terbebasnya kehidupan masyarakat dari penjajahan. Proklamasi kemerdekaan menjadi penanda “kehidupan baru yang sudah terlepas dari tekanan, penindasan, penyiksaan, penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia selama masa penjajahan” (Badrika, 1997, jilid 2: 275).

Setelah membahas berbagai langkah politik untuk melengkapi kelengkapan negara dan pemerintahan, serta kehidupan masyarakat Indonesia di awal masa kemerdekaan, buku teks Badrika kemudian menguraikan perjuangan bersenjata dan diplomasi. Perjuangan senjata dilakukan melalui perang melawan pasukan Sekutu dan Belanda, seperti terjadi di Surabaya, Ambarawa, Medan, dan Bandung (Badrika, 1997, jilid 2: 286-294). Perjuangan diplomasi dilakukan melalui perundingan dengan Belanda yang merasa masih memiliki hak untuk berkuasa di Indonesia. Pada topik ini diuraikan proses terjadinya perundingan dan berbagai perjanjian yang berhasil disepakati kedua belah pihak, seperti perjanjian

Linggarjati, Renville, Roem-Royen dan pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada tahun 1950. Uraian disertai respon politik terhadap perjanjian yang telah disepakati, terutama dari perspektif perpolitikan Indonesia pada waktu itu.

Ketika perundingan mengalami jalan buntu, tidak jarang Belanda melakukan manuver, baik politik maupun militer. Salah satu manuver yang terkenal adalah agresi militer terhadap ibukota RI Yogyakarta. Kekacauan yang terjadi mengakibatkan berbagai komponen masyarakat mengambil peran dalam mempertahankan eksistensi negara, antara lain pelajar yang digambarkan sebagai berikut:

Dalam masa perjuangan ini para pelajar memiliki peranan yang sangat penting. Mereka membentuk tentara-tentara pelajar. Para pelajar di Jawa Timur membentuk Tentara Pelajar Republik Indonesia (TPRI) dan Tentara Geni Pelajar (TGP) yang terdiri dari pelajar-pelajar sekolah teknik. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat dibentuk Tentara Pelajar (TP) dan SA (*Sturm Abteilung*) yang juga terdiri dari pelajar-pelajar sekolah teknik. Di samping tentara pelajar, juga ada Corp Mahasiswa (CM) dan mobilisasi pelajar yang turut berjuang bersama-sama TNI untuk menegakkan kembali kedaulatan RI. Dengan demikian tradisi perjuangan pelajar mahasiswa yang dirintis sejak Budi Utomo dilanjutkan dalam perang kemerdekaan (Badrika, 1997, jilid 2: 305).

Uraian ditutup dengan perubahan RIS menjadi NKRI. Dijelaskan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara formal negara kesatuan yang baru itu merupakan kelanjutan dari RIS, karena mengalami perubahan undang-undang dasar. Meskipun demikian, sebagian rakyat Indonesia menganggap bahwa negara kesatuan baru itu merupakan kelanjutan dari Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 (Badrika, 1997, jilid 2: 313).

Buku teks Badrika juga membahas keberagaman dari perspektif usia/generasi, bidang kehidupan dan kewilayahan. Dalam membahas keragaman dari perspektif usia, digunakan perbedaan pandangan antara generasi muda dan tua dalam masalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam uraian dipaparkan tentang pertemuan tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8 malam di Laboratorium Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur 13 yang memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri dan tidak tergantung dari bangsa atau negara lain (Badrika, 1997, jilid 2: 266) dan sama sekali tidak menyinggung keinginan pemuda untuk merebut kemerdekaan dari tangan Jepang. Sebaliknya, ketika menggambarkan pandangan golongan tua, buku teks Badrika (1997. Jilid 2: 266-267) menuliskan sebagai berikut:

Bung Karno dengan segala macam bukti dan logika menolak pandangan golongan muda. Golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi secara terorganisir karena pihaknya ingin membicarakan pelaksanaan proklamasi Indonesia yang ditentukan tanggal 18 Agustus 1945 dalam rapat PPKI. Sebaliknya, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Subardjo berpendapat soal kemerdekaan Indonesia datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri, tidak perlu dipersoalkan, karena Jepang sudah kalah dan yang perlu dihadapi adalah Sekutu yang berusaha mengembalikan kekuatan Belanda ke Indonesia.

Dalam keberagaman bidang kehidupan, buku teks memaparkan tiga bidang, yaitu politik, ekonomi dan sosial-budaya (Badrika, 1997, jilid 2: 281-286). Sebagai pengantar, diuraikan makna proklamasi kemerdekaan sebagai pintu gerbang seperti berikut:

Pada awal berdirinya negara Republik Indonesia, kehidupan bangsa Indonesia belum stabil dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, maupun bidang politik. Pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu belum berarti wujud kehidupan lalu berubah secara drastis. Tetapi proklamasi merupakan titik awal untuk menghantar rakyat Indonesia ke

pintu gerbang menuju kemajuan dan kesejahteraan sosial (Badrika, 1997, jilid 2: 281).

Pada sub bab perjuangan bersenjata dan diplomasi, dipaparkan keberagaman dari perspektif kewilayahan. Buku teks Badrika menguraikan pertempuran yang terjadi di Surabaya, Ambarawa, Medan, dan Bandung. Pada uraian tentang pertempuran Ambarawa, antara lain digambarkan sebagai berikut:

Maka pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari pasukan-pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama empat hari empat malam. Musuh yang merasa kedudukannya terjepit berusaha keras untuk melakukan pemutusan pertempuran. Pada tanggal 15 Desember 1945 musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, mereka bisa mengancam tiga kota utama di Jawa Tengah, yaitu Surakarta, Magelang, dan terutama Yogyakarta yang merupakan tempat kedudukan markas tertinggi TKR (Badrika, 1997, jilid 2: 290).

Dalam menyusun sejarah sebagai sintesis menuju integrasi nasional, buku teks Badrika lebih banyak mengacu pada buku teks karangan Notosusanto (1992). Hal itu tampak dari pembahasannya tentang latar belakang yang menguraikan akan ketidakadaan ikatan ideologi dan tujuan yang jelas sebagai penyebab mendasar keruntuhan RIS. Dalam memaparkan proses, antara lain diuraikan sebagai berikut:

Pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan persetujuan RIS-RI untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. Pihak RIS diwakili oleh Perdana Menteri Moh. Hatta dan pihak RI oleh Perdana Menteri RI dr. Abdul Halim. Menurut persetujuan itu, negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan dibentuk oleh RIS bersama dengan RI di Yogyakarta. Untuk pelaksanaannya, dibentuk panitia gabungan RIS dan RI yang bertugas merancang undang-undang dasar negara kesatuan. Panitia ini dipimpin oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo dan pada tanggal 20 Juli 1950 telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Rancangan undang-undang dasar negara kesatuan diserahkan

kepada dewan-dewan perwakilan negara bagian untuk disempurnakan. Undang-undang dasar negara kesatuan ini mengandung unsur-unsur UUD 1945 dan UUD RIS. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950 rancangan undang-undang dasar diterima, baik oleh Senat dan Parlemen RIS serta KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno menandatangani rancangan undang-undang dasar menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDS 1950).

Pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Resminya negara kesatuan yang baru itu merupakan kelanjutan dari RIS, karena mengalami perubahan undang-undang dasar. Tetapi sebagian rakyat Indonesia menganggap bahwa negara kesatuan baru itu merupakan kelanjutan dari Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 (Badrika, 1997, jilid 2: 313)

**c. Waridah Q., Siti, Sukardi dan Sunarto. (2000). *Sejarah Nasional dan Umum untuk SMA. Jilid 2.***

Tidak jauh berbeda dengan buku teks lainnya, buku teks Waridah membahas peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan dengan menguraikan konflik pandangan generasi tua dengan pemuda yang berujung penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Uraian dilanjutkan dengan penyusunan dan upacara pembacaan teks proklamasi. Pada sub bab selanjutnya, digambarkan antusiasme sambutan masyarakat terhadap proklamasi di berbagai wilayah, baik di Jakarta maupun daerah-daerah lain. Diantaranya, buku teks Waridah (2000, jilid 2: 211-212) menggambarkan suasana yang berkembang di Surabaya setelah mengetahui berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagai berikut:

Di berbagai tempat ada rapat dan diskusi untuk membahas desas-desus akan datangnya tentara Sekutu. Padahal para anggota Peta dan arek-arek Surabaya pada umumnya tidak *bersenjata*. Oleh karena itu, suasana menjadi begitu mencekam, namun tetap siaga.

Beberapa hari setelah proklamasi, di Surabaya banyak beredar selebaran. Isi dari selebaran itu adalah agar rakyat Indonesia segera merebut kekuasaan dari Jepang dan merebut semua senjatanya. Untuk membahas selebaran dan langkah-langkah yang harus diambil maka di Kampung Kranggan - Surabaya sering dilakukan pertemuan. Pertemuan itu dihadiri terutama para serdadu Peta, misalnya Bambang Yuwono, Surakhman, Suharjo, dan Abdul Wahab



Saimin, bahkan sering dihadiri oleh Yonosewoyo dan Sungkono. Di samping itu, para pemuda Surabaya terus melakukan latihan keprajuritan.

Pada topik kehidupan masyarakat Indonesia di masa awal kemerdekaan, paparan buku teks Waridah juga tidak banyak berbeda dengan buku-buku teks pelajaran sejarah lainnya. Perbedaan yang cukup besar terdapat pada uraian tentang perjuangan rakyat dan pengakuan kedaulatan. Buku teks Waridah menggambarkan perjuangan yang dilakukan Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Aceh untuk melucuti senjata Jepang. Bahkan buku teks juga menguraikan sumbangan pesawat Dakota masyarakat Aceh sebagai berikut:

Pada tanggal 16 Juni 1948 bertempat di Hotel Aceh, Presiden Soekarno dalam pidatonya yang pertama kali dalam rangka pengumpulan dana dakota berhasil membangkitkan gelora semangat Rakyat Sumatera, khususnya Aceh, sehingga dengan spontan terbentuklah Panitia Dana Dakota di Aceh. Dalam jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh para pedagang Aceh, Presiden Soekarno berkenan menyerahkan sebuah miniatur pesawat dakota dengan harapan agar segera terwujud menjadi sebuah pesawat dakota yang sebenarnya. Dalam waktu hanya dua hari saja sebuah panitia dan saudara Said Mohammad Alhabsji telah berhasil mengumpulkan uang sejumlah 130.000 Straits Dollar dari masyarakat Aceh (Waridah dkk., 2000, Jilid 2: 229).

Selain membahas perjuangan militer, buku teks Waridah juga menguraikan perjuangan diplomasi Indonesia melawan Belanda. Uraian dibuka dengan kesadaran yang muncul dalam benak pasukan Inggris bahwa konflik Indonesia-Belanda tidak mungkin diselesaikan dengan jalan perang, sehingga mereka kemudian memfasilitasi untuk terjadinya penyelesaian konflik melalui perundingan. Dalam konteks ini, digambarkan setiap tahapan perundingan, termasuk aksi-aksi militer dan politik yang menyertainya.

Dalam sub bab mempertahankan proklamasi, diuraikan penumpasan PKI Madiun, agresi militer II dan Konferensi Meja Bundar (KMB). Terkait topik

terakhir, diuraikan antara lain Konferensi Inter-Indonesia sebagai persiapan untuk mengikuti KMB di Belanda. Konferensi itu digambarkan sebagai berikut:

Menjelang diadakannya KMB (Konferensi Meja Bundar), pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta dan pada tanggal 31 Juli-2 Agustus 1949 di Jakarta dilangsungkan Konferensi Inter Indonesia yang diikuti oleh wakil RI dan wakil negara bagian yang dibentuk oleh Van Mook...Tujuan diselenggarakan konferensi ialah untuk menghasilkan kesatuan pendapat bangsa Indonesia dalam menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) nanti.

Dengan kata lain, pembicaraan dalam konferensi tersebut hampir semua adalah masalah pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), terutama mengenai hak negara bagian/daerah otonom di pihak lain. Konferensi Inter-Indonesia juga membicarakan bentuk kerja sama RIS-Belanda dalam perserikatan uni, di samping masalah kewajiban RIS dan Belanda sebagai akibat penyerahan kekuasaan. Salah satu keputusan penting yang diambil adalah bahwa BFO menyokong tuntutan Republik Indonesia atas penyerahan tanpa ikatan politik ataupun ekonomi. Keputusan yang lain adalah sebagai berikut: (1) Negara Indonesia Serikat akan dinamakan Republik Indonesia Serikat, (2) Bendera kebangsaan adalah sang Merah Putih, (3) Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya, (4) Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia, (5) Hari nasional adalah tanggal 17 Agustus (Waridah dkk., 2000, Jilid 2: 248-249).

Sub bab terakhir membahas perjuangan kembali menuju negara kesatuan RI. Uraian dibuka dengan penggambaran kondisi RIS setelah penyerahan kedaulatan, terutama masalah yang dihadapi. Dijelaskan bahwa RIS tidak dapat bertahan lama antara lain karena tidak didukung oleh satu ikatan ideologi yang kuat, tokoh-tokoh terkemuka yang duduk di dalam Kabinet RIS sebagian besar orang republik yang menghendaki negara kesatuan, sistem federal oleh rakyat Indonesia (termasuk rakyat di negara bagian) dianggap sebagai alat Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia (Waridah dkk., 2000, Jilid 2: 257). Dengan kondisi itu, maka menjadi layak dan pantas apabila kemudian berubah menjadi negara kesatuan.

Agak berbeda dengan buku teks Sardiman dan Badrika, buku teks Waridah hanya membahas keberagaman dari perspektif kewilayahan dan bidang kehidupan. Perspektif wilayah tampak digunakan ketika menguraikan sambutan masyarakat daerah terhadap proklamasi Indonesia. Dalam konteks ini buku teks Waridah menggambarkan sambutan masyarakat Yogyakarta, Semarang, Bandung dan Surabaya (Waridah, 2000,. Jilid 2: 208-212). Pada pemaparan keberagaman dari perspektif kewilayahan, uraian diberikan dalam bentuk gambaran perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat daerah dalam usaha mengambil alih kekuasaan pasukan Jepang dan melawan pasukan Sekutu/Belanda. Diuraikan perjuangan masyarakat Aceh, Medan, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua/Irian serta Jawa (Waridah, 2000,. Jilid 2: 229-241).

Seperti buku teks lainnya, buku teks Waridah membahas dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya pada masa awal kemerdekaan untuk keberagaman dari perspektif bidang kehidupan. Pada bidang sosial antara lain digambarkan usaha untuk mengubah sistem pendidikan dari kolonial ke nasional. Usaha itu dilakukan dengan membentuk panitia di bawah pimpinan Ki Hadjar Dewantara sebagai ketua.. Panitia berhasil merumuskan pemikiran sebagai berikut:

- (1) Pedoman pendidikan dan pengajaran yang pernah ada di zaman kolonial harus diubah secara mendasar sesuai dengan alam kemerdekaan, (2) Kegiatan pengajaran diharapkan mendapat tempat yang teratur dan saksama, (3) Pengajaran tinggi perlu diadakan seluas-luasnya, (4) Dilaksanakan pengiriman pelajar ke luar negeri, (5) Paham perorangan diganti paham kebersamaan sesuai dengan nilai kesusilaan dan rasa perikemanusiaan yang tinggi. Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah diarahkan untuk membimbing anak didik agar menjadi warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab (baik jasmani maupun rohani, moril maupun materiil), (6) Wajib sekolah dilaksanakan secara bertahap, (7) Bidang pengajaran kejuruan, seperti pertanian, perindustrian, dan pelayaran perlu mendapat perhatian istimewa, (8) Masalah pembiayaan disarankan untuk sekolah dasar tidak dipungut uang sekolah.

Untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi diatur pembayarannya dan perlu ada tunjangan (Waridah, 2000., Jilid 2: 222).

Dalam menyusun sejarah sebagai sintesis menuju integrasi nasional, buku teks Waridah juga mengacu pada buku teks karangan Notosusanto (1981/1992). Perbedaannya hanya pada redaksionalnya, yaitu dalam bentuk point-point, sedang buku teks Notosusanto menggunakan model uraian dalam alinea. Sebagai contoh pada point (3) buku teks Waridah (2000, jilid 2: 257) menyatakan bahwa “dasar pembentukan RIS sangat lemah, tidak didukung oleh satu ikatan ideologi yang kuat dan satu tujuan kenegaraan yang jelas serta tidak mendapat dukungan rakyat”.

#### **4. Buku teks untuk kurikulum 2006**

##### **a. Mustopo, Habib, dkk., 2007, *Sejarah SMA. jilid 2.***

Buku teks Mustopo dalam menguraikan kisah historis pada bab I dengan menggunakan urutan kejadian sebagai landasan. Hal itu tampak dari susunan sub bab-sub babnya, yaitu Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan, Pembentukan Pemerintahan Indonesia, Penyusunan Kekuatan Pertahanan Keamanan. Ketiga sub bab itu, dilihat dari waktu terjadinya, merupakan urutan kronologis. Penggunaan urutan kejadian juga dapat disimak pada isi uraiannya, seperti tergambar sebagai berikut:

Sementara itu di Jakarta para anggota PPKI yang diundang rapat pada tanggal 16 Agustus memenuhi undangannya dan berkumpul di gedung Pejambon 2. Akan tetapi, rapat itu tidak dapat dihadiri oleh pengundangnya Soekarno-Hatta yang sedang berada di Rengasdengklok. Peserta rapat merasa heran, dan satu-satunya jalan untuk mengetahui keberadaan mereka adalah melalui Wikana salah satu utusan yang bersitegang dengan Soekarno-Hatta pada malam harinya. Selanjutnya, terjadi perbincangan antara Mr. Ahmad Soebardjo dengan Wikana. Keduanya merupakan tokoh dari golongan tua dan

golongan muda. Perbincangan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Karena adanya kesepakatan itu, maka Jusuf Kunto dari golongan muda bersedia mengantarkan Mr. Ahmad Soebardjo bersama sekretarisnya, Soediro (Mbah) ke Rengasdengklok (Mustopo dkk., 2007, Jilid 3: 9).

Dua kata pertama pada kutipan di atas menunjukkan bahwa peristiwa yang digambarkan bersamaan terjadinya dengan peristiwa lain, yaitu penculikan Soekarno dan Hatta di Rengasdengklok.

Pada bab II, buku teks Mustopo menguraikan “Perkembangan Perekonomian dan Politik Indonesia (1945-1950)”. Dari judul bab tampak bahwa uraian tidak lagi semata-mata mengurutkan peristiwa berdasar waktu kejadian, tetapi juga mengelompokkan peristiwa yang diuraikan ke dalam tema. Ketika memaparkan tema perkembangan perekonomian, buku teks tidak hanya menggambarkan proses historis, tetapi juga mencari penyebab dari proses tersebut. Hal itu terlihat pada saat memaparkan buruknya perekonomian Indonesia di masa awal kemerdekaan, buku teks menempatkan hiper inflasi, blokade ekonomi dan kas negara kosong sebagai penyebab (Mustopo dkk., 2007, Jilid 3: 36-37).

Tema perkembangan politik diisi dengan 21 peristiwa penting yang berurutan, dari kedatangan pasukan Sekutu dan NICA sampai dengan terbentuknya NKRI. Dari ke-21 peristiwa tersebut terdapat beberapa yang penempatannya berurutan dan memiliki keterkaitan, tetapi beberapa urutan tidak menunjukkan adanya keterkaitan. Contoh urutan yang memiliki keterkaitan adalah kedatangan Sekutu dan NICA pada urutan pertama dengan pertempuran



Surabaya pada urutan ke dua. Sebagai penghubung antar dua peristiwa, pada akhir narasi urutan pertama (Kedatangan Sekutu dan NICA) dituliskan sebagai berikut:

Namun dalam kenyataannya di daerah-daerah yang didatangi Sekutu selalu terjadi insiden dan pertempuran dengan pihak RI. Hal itu disebabkan pasukan Sekutu tidak bersungguh-sungguh menghormati kedaulatan RI. Sebaliknya, pihak Sekutu yang merasa kewalahan, menuduh Pemerintah RI tidak mampu menegakkan keamanan dan ketertiban sehingga terorisme merajarela. Pihak Belanda yang bertujuan untuk kembali menegakkan kekuasaannya di Indonesia berupaya memanfaatkan situasi ini dengan memberikan sambutan hangat kepada pihak Sekutu. Panglima Angkatan Perang Belanda, Laksamana Helfrich, memerintahkan pasukannya untuk membantu pasukan Sekutu (Mustopo dkk., 2007, Jilid 3: 44).

Pemaparan yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa sebelum dan sesudahnya antara lain terdapat pada urutan ke-7, yaitu Bandung Lautan Api. Peristiwa pertempuran di kota Bandung itu tidak terkait dengan urutan ke-6: Reaksi terhadap strategi diplomasi ataupun urutan ke-8: Peristiwa 3 Juli 1946.

Buku teks karangan Mustopo membahas keberagaman dari perspektif usia/generasi, wilayah maupun bidang kehidupan. Pada keragaman dari perspektif usia, Mustopo (2007, Jilid 3: 7) terlihat lebih lengkap dalam menguraikan pandangan pemuda yang termanifestasi dalam keputusan rapat tanggal 15 Agustus 1945 sebagai berikut:

... Rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh itu menghasilkan keputusan "Kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantungkan pada orang dan negara lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan adanya perundingan dengan golongan muda agar mereka diikutsertakan dalam pernyataan proklamasi."

Selanjutnya utusan pemuda menyampaikan keputusan rapat kepada Soekarno dan Hatta bahwa mereka berdua harus "segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu hadiah dari Jepang". Permintaan itu

disertai ancaman bahwa “akan terjadi pertumpahan darah jika Ir. Soekarno tidak menyatakan proklamasi keesokan harinya”. Untuk menggambarkan reaksi Soekarno, buku teks mengutip langsung ucapan Soekarno yaitu "Ini leher saya, seretlah saya ke pojok itu dan sudahlah nyawa saya malam ini juga, jangan menunggu sampai besok. Saya: tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai Ketua PPKI. Karena itu saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok" (Mustopo dkk., 2007, Jilid 3: 8).

Paparan perspektif wilayah yang paling menonjol adalah tentang reaksi masyarakat daerah terhadap proklamasi kemerdekaan. Pemaparan tidak hanya menggambarkan reaksi masyarakat di daerah yang menjadi wilayah operasi pasukan Inggris, tetapi juga wilayah operasi pasukan Australia. Salah satunya adalah reaksi masyarakat Sulawesi Selatan yang digambarkan sebagai berikut:

Di Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Agustus 1945, rombongan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi, mendarat di Sapiro, Bulukumba. Setibanya di Ujung Pandang (Makassar), gubernur mulai menyusun pemerintahan dengan mengangkat Mr. Andi Zainal Abidin sebagai sekretaris daerah. Akan tetapi, para pemuda menganggap tindakan gubernur terlalu berhati-hati. Oleh karena itu, para pemuda mulai merencanakan untuk merebut gedung-gedung vital, seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Kelompok pemuda tersebut terdiri atas kelompok Barisan Berani Mati (*Bo-ei Tai-shin*), bekas kaigun heiho dan pelajar SMP. Pada tanggal 28 Oktober 1945 mereka bergerak menuju sasaran dan mendudukinya. Mengetahui tindakan pemuda itu, pasukan Australia yang sudah ada sebelumnya bergerak dan melucuti para pemuda. Karena terdesak, maka pusat gerakan pemuda dipindahkan dari Ujungpandang ke Polombangkeng (Mustopo dkk., 2007, Jilid 3: 14).

Keberagaman bidang kehidupan yang dibahas antara lain bidang pemerintahan, pertahanan-keamanan, perekonomian dan politik. Dalam bidang pemerintahan, diuraikan penyusunan kelengkapan negara seperti pemilihan presiden dan wakil presiden beserta anggota kabinet, serta pembentukan badan-

badan pemerintahan (Mustopo dkk., 2007, Jilid 3: 16-25). Dalam bidang pertahanan dan keamanan, buku teks memaparkan perkembangan militer Indonesia dari saat masih bernama Badan Keamanan Rakyat sampai menjadi tentara Nasional Indonesia serta pembentukan kepolisian Indonesia. Di bidang perekonomian, pengarang menggambarkan permasalahan yang dihadapi pemerintah oleh tekanan inflasi dan blokade Belanda. Pada bidang politik, diuraikan konflik antara Indonesia dengan Belanda serta bentrokan fisik antara pasukan Inggris dan Belanda dengan penduduk, terutama para pemuda (Mustopo dkk., 2007, Jilid 3: 42-73).

Buku teks Mustopo dalam membahas integrasi nasional lebih banyak menguraikan tentang proses perubahan konstitusi. Salah satu tahap penting proses integrasi adalah perubahan UUD RIS. Dia menjelaskan bahwa “Panitia Perancang UUDS NKRI ini diketuai oleh Menteri Kehakiman RIS Prof. Dr. Mr. Soepomo” yang berhasil mengubah “sedemikian rupa sehingga tidak merubah esensi UUD 1945 terutama pasal 27, 29, dan 33 ditambah dengan bagian-bagian yang masih dianggap baik dari UUD RIS (Mustopo, 2007, Jilid 3: 73).

**b. Hapsari, Ratna dan Abdul Syukur, 2008, *Eksplorasi Sejarah Indonesia dan Dunia*. jilid 2**

Uraian buku teks Hapsari dan Syukur juga menggunakan pendekatan deskriptif naratif dengan model penceritaan berlandas pada urutan kejadian. Model penceritaan tersebut diterapkan antara lain ketika menguraikan peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perbedaannya adalah bahwa

buku teks Hapsari dan Syukur berusaha memberi alasan atau latar belakang pandangan pemuda yang menghendaki proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

...kelompok muda sudah mengetahui soal keberhasilan uji coba bom atom Amerika Serikat beserta pemboman terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki. Kehancuran Hiroshima dan Nagasaki menunjukkan lemahnya kekuatan pasukan Jepang, karena tidak mampu menggagalkan serangan lawan ke wilayah intinya. Bahkan mereka juga mengetahui rencana penyerahan tanpa syarat pemerintah Jepang. Mereka lalu mendorong kelompok tua agar segera mengabaikan rencana pemberian kemerdekaan dari pemerintah Jepang, karena Jepang akan kehilangan haknya memberikan kemerdekaan apabila telah menyerah kalah. Seluruh wilayah kekuasaan Jepang akan jatuh ke tangan Sekutu. Dengan demikian pihak Sekutu yang mempunyai kewenangan untuk memberikan kemerdekaan (Hapsari dan Syukur, 2008, Jilid 3: 10).

Pada bab 2 yang berjudul “Membangun format negara merdeka” uraian buku teks menggunakan model penceritaan berbasis tema. Uraian difokuskan pada empat tema besar, yaitu pembentukan NKRI, sistem pemerintahan, pembentukan parlemen dan pembentukan alat keamanan. Dalam menggambarkan dinamika historis masing-masing tema, uraian tidak dibatasi pada periode tertentu, terutama masa revolusi Indonesia. Sebagai contoh, ketika membahas pembentukan parlemen, pemaparan dibuka dengan uraian sebagai berikut:

Sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, bangsa Indonesia menuntut pembentukan parlemen yang mempunyai kewenangan penuh sebagai lembaga perwakilan rakyat. Desakan demi desakan menyebabkan pihak kolonial mendirikan parlemen bernama *Raad van Indie* (Dewan India) untuk di pusat. Untuk di daerah berdiri *Gewestelijke Raad* (Dewan Daerah Kabupaten) dan *Gemeente Raad* (Dewan Kota). Namun keberadaannya masih jauh dari harapan, karena tugas dewan hanya sebagai penasihat pemerintah kolonial. Di samping itu, juga sebagian besar anggotanya terdiri atas *Binnenlands Bestuur* (pegawai tinggi pawong praja) dan orang-orang Belanda, sehingga tidak mewakili kepentingan rakyat Indonesia.

Para tokoh pergerakan terus melanjutkan protesnya hingga akhirnya pemerintah kolonial mendirikan *Volksraad* (Dewan Rakyat) yang mempunyai hak mengajukan petisi, hak interpelasi, hak inisiatif, hak amandemen, dan hak

angket. Namun semua hak ini hampir tidak dapat digunakan, karena selalu dihalangi oleh pemerintah kolonial (Hapsari dan Syukur, 2008, Jilid 3: 38).

Dari kutipan di atas terlihat bahwa penggambaran dinamika parlemen dilakukan tidak dibatasi masa revolusi, tetapi dimulai dari awal abad XX. Uraian tentang parlemen itu diakhiri dengan peristiwa pembubaran anggota DPR pada tahun 1960 dan akibatnya yang banyak merugikan partai Islam (Hapsari dan Syukur, 2008, Jilid 3: 41). Dari sudut pandang ini, dinamika historis yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan dibahas sebagai bagian dari paparan tentang suatu tema. Akibatnya, pembahasan hanya pada kulitnya saja dan tidak mampu melakukan pendalaman terhadap berbagai fenomena historis yang terjadi selama masa revolusi kemerdekaan, seperti terlihat pada kutipan di bawah ini:

Sebagai tindak lanjut pembentukan Komite Nasional Indonesia, dalam sidang PPKI pada 23 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Eksekutif yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Tugasnya adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pelantikan KNIP dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Komidi Pasar Baru, Jakarta. Kasman Singodimedjo diangkat sebagai Ketua KNIP yang pertama didampingi oleh empat wakil ketua...

Masa kepemimpinan Kasman Singodimedjo berakhir pada 17 Oktober 1945. Ia digantikan oleh Sutan Sjahrir yang juga merangkap sebagai ketua BP KNIP. Amir Sjarifuddin sendiri menjabat wakil ketua. Keduanya lalu bergabung mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) (Hapsari dan Syukur, 2008, Jilid 3: 38-39).

Berbeda dengan buku teks Mustopo, buku teks Hapsari dan Syukur tidak membahas keberagaman dari perspektif wilayah. Uraianya lebih banyak memaparkan keberagaman dari perspektif usia/generasi dan bidang kehidupan. Pada keberagaman dari perspektif usia, uraian dilakukan pada peristiwa yang terkenal dan telah dipahami umum, yaitu peristiwa Rengasdeklok, sebagai berikut:



Rengasdengklok adalah sebuah kota Kecamatan di Kabupaten Karawang yang masuk Provinsi Jawa Barat. Letaknya di sekitar pesisir Laut Jawa dan dilalui Sungai Citarum. Kota ini dikenal sebagai daerah penghasil padi. Nama Rengasdengklok menjadi sangat terkenal, karena digunakan oleh pemuda Indonesia sebagai tempat menyembunyikan Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Tujuannya adalah untuk 'menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang'. Kelompok pemuda merasa yakin bahwa pemerintah Jepang akan menekan kedua tokoh penting ini agar tidak menuruti kelompok pemuda yang ingin mendorong proklamasi kemerdekaan secepatnya tanpa persetujuan dari pemerintah Jepang.

Kemungkinan pemerintah Jepang memberikan tekanan kepada kelompok tua sangat besar, karena Soekarno dan Mohammad Hatta berencana akan memimpin rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada saat itulah pemerintah Jepang memberikan tekanan kepada peserta rapat PPKI. Jika ini terjadi, maka memproklamasikan kemerdekaan akan menjadi semakin sulit....Namun kelompok tua menolaknya dengan pertimbangan pemerintah Jepang akan menentang proklamasi kemerdekaan tersebut. Jika ini terjadi maka Jepang akan dengan mudah menghancurkan kekuatan bangsa Indonesia. Adanya ketidaksepakatan inilah yang mendorong kelompok pemuda mengambil keputusan nekat. Yakni mengasingkan Soekarno dan Mohammad Hatta (Hapsari dan Syukur, 2008, Jilid 3: 10-11).

Pada keragaman dari perspektif bidang kehidupan, dipaparkan pembentukan kelengkapan pemerintahan, pendirian tentara dan kepolisian, serta perkembangan perekonomian. Pembahasan bidang kehidupan itu pun tidak hanya untuk periode revolusi kemerdekaan, tetapi sampai tahun 1965. Sebagai contoh, ketika membahas perekonomian, digambarkan perkembangan ekonomi sampai nasionalisasi perusahaan asing dan ekonomi terpimpin (Hapsari dan Syukur, 2008, Jilid 3: 56-60).

Dalam menyusun sejarah sebagai sintesis menuju terbentuknya integrasi nasional, buku teks Hapsari dan Syukur (2008) lebih menonjolkan peran Mohammad Natsir. Dalam menghadapi situasi krisis di negara-negara bagian yang diwarnai kekerasan fisik, muncullah mosi integrasi dari M. Natsir. Peristiwa itu dijelaskan sebagai berikut:

Aksi kekerasan yang mengiringi pembubaran negara-negara bagian mendorong Mohammad Natsir, seorang anggota parlemen RIS dari partai Islam Masyumi, mengeluarkan mosi integral, yang menyerukan agar pemerintah RIS dan negara-negara bagian mempersiapkan pembubaran negara federasi secara damai, dan selanjutnya kembali pada bentuk negara kesatuan. Mosi integral dari Natsir ini mendapat dukungan penuh dari parlemen RIS.

Pemerintah RIS menyetujui mosi integral Natsir itu, sehingga pada 8 April 1950 diadakan konferensi segitiga antara RIS, Indonesia Timur dan Sumatra Timur. Dari hasil konferensi ini akhirnya pada 12 Mei 1950 kepala negara bagian Indonesia Timur Sukowati dan kepala negara bagian Sumatera Timur Teungku Mansyur menyerahkan mandatnya kepada pemerintah RIS. Penyerahan mandat ini juga berarti pembubaran kedua negara bagian tersebut. Satu minggu kemudian pemerintah RIS mengadakan konferensi dengan negara bagian Republik Indonesia menyangkut rencana perubahan bentuk negara dari federasi ke kesatuan (Hapsari dan Syukur, 2008, Jilid 3: 28).

**c. Tarunasena, 2009, *Sejarah SMA/MA. jilid 2.***

Buku teks pelajaran sejarah yang dibahas terakhir adalah karangan Tarunasena. Periode revolusi kemerdekaan diuraikan pada bab I. Secara garis besar, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif naratif dengan pola narasi berbasis urutan kejadian. Pola narasi itu antara lain terlihat dari sub bab yang dimunculkan, yaitu: Proklamasi dan Peristiwa Sekitarnya, Terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia, Gejolak Sosial di Beberapa Daerah, Konflik Indonesia-Belanda 1945-1949, Menuju Ekonomi Nasional. Proklamasi ditempatkan yang pertama karena paling awal terjadi dan diikuti dengan terbentuknya pemerintahan seperti pemilihan presiden dan pembentukan Komite

Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Gejolak sosial yang berupa pengambilalihan kekuasaan serta perebutan senjata Jepang merupakan fenomena historis yang mewarnai berbagai daerah setelah pemerintahan terbentuk. Fenomena itu disusul oleh kehadiran pasukan Sekutu dan Belanda yang mengakibatkan terjadinya konflik. Satu-satunya sub bab yang keluar dari pola narasi berbasis urutan kejadian adalah “Menuju Ekonomi Nasional” karena membahas masalah ekonomi sepanjang periode revolusi kemerdekaan.

Pola narasi berbasis urutan kejadian juga tampak pada uraian di dalam sub bab. Ketika membahas gejolak sosial di berbagai daerah, antara lain diuraikan sebagai berikut:

### **2. Insiden Surabaya**

Beberapa orang Belanda mengibarkan bendera berwarna merah putih biru di atas Hotel Yamato di kawasan Tunjungan. Rakyat Surabaya marah dan menyerbu hotel tersebut pada tanggal 19 September 1945. Rakyat menurunkan bendera itu dan menyobek bagian yang berwarna biru, kemudian mengibarkannya lagi sebagai bendera Merah Putih.

### **3. Pertempuran lima hari di Semarang**

Pertempuran ini diawali dengan tersebarnya isu bahwa Jepang meracuni cadangan air minum. Kepala Laboratorium Rumah Sakit Rakyat, Dokter Karyadi, mencoba memeriksa kebenaran isu tersebut, namun ia ditembak oleh Jepang. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat yang kemudian bangkit melawan Jepang. Pertempuran berlangsung pada tanggal 15-20 Oktober 1945. Untuk mengenang keberanian rakyat, di Semarang dibangun monumen yang diberi nama Tugu Muda (Tarunasena, 2007, Jilid 3: 13-14).

Pada kutipan di atas, uraian buku teks menempatkan peristiwa yang terjadi pada bulan September 1945 di urutan awal dan disusul dengan peristiwa yang terjadi pada Oktober 1945. Dari sudut pandang ini dapat diambil pemahaman bahwa urutan waktu menjadi pertimbangan penting dalam menyusun narasi.

Seperti telah disinggung bahwa pada sub bab “Menuju Ekonomi Nasional”, uraian tidak berbasis urutan kejadian. Pada sub bab itu uraian

menggunakan landasan tema, dengan fokus narasi pada bidang ekonomi, yaitu menggambarkan dinamika perekonomian negara pada periode revolusi kemerdekaan. Fokus pada bidang ekonomi tersebut antara lain dapat disimak dari uraian pembuka sebagai berikut:

Masa peralihan pasca proklamasi ditandai dengan banyaknya bidang kosong yang harus segera diisi oleh bangsa ini. Di tengah kondisi perekonomian buruk dan infrastruktur Indonesia yang lemah, proses peralihan tersebut, bidang militer, operasional pemerintahan, serta upaya diplomasi memerlukan pembiayaan. Hal tersebut harus dilaksanakan guna mempertahankan kemerdekaan dan kelangsungan negara yang baru ini.

Dalam kondisi perekonomian tersebut, pemerintah masih mendapat pemasukan dari pegadaian serta monopoli garam dan candu untuk membiayai pemerintah Yogyakarta dan pasukan TRI. Selain itu, pemerintah masih dapat mengumpulkan dana dari monopoli pemerintah, serta melanjutkan pajak-pajak yang pernah ditarik oleh Jepang (Tarunasena, 2007, Jilid 3: 35).

Berbeda dengan buku teks Hapsari, buku teks Tarunasena justru lebih banyak menggambarkan keragaman dari perpektif usia/generasi dan wilayah. Keragaman dari perspektif usia dibahas dengan membagi kaum pergerakan menjadi dua kelompok sebagai berikut:

Pejuang Indonesia saat itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dikenal sebagai *golongan tua*, yaitu Sukarno, Hatta, dan anggota-anggota PPKI lainnya. Kelompok ini berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan harus ditetapkan oleh PPKI karena anggotanya berasal dari berbagai penjuru tanah air dan dianggap mewakili seluruh Indonesia. Dengan ikutnya mereka, tercapailah simbol persatuan rakyat Indonesia. Kelompok kedua adalah *golongan muda* yang dipelopori oleh Sukami, Chaerul Saleh, Adam Malik, dan Wikana. Kelompok ini berpendapat bahwa kemerdekaan adalah hak yang harus dicapai oleh jerih payah bangsa Indonesia sendiri, dan tidak perlu tergantung, apalagi diberikan oleh orang lain. Oleh karena itu, segala hubungan dan janji kemerdekaan dari Jepang harus dilepaskan (Tarunasena, 2007, Jilid 3: 3).

Pada keragaman wilayah antara lain dibahas tentang pertempuran masyarakat daerah dengan pasukan Sekutu/Belanda, seperti dialami oleh masyarakat Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Manado dan Bali. Uraian

keragaman dari perspektif wilayah dilakukan secara singkat, seperti saat memaparkan peristiwa Karawang Bekasi sebagai berikut:

NICA yang pada tanggal 29 September 1945 mendarat di Jakarta bersama pasukan sekutu, mulai mempersenjatai kembali mantan tentara Hindia Belanda (KNIL) yang kemudian mengadakan aksi teror di kota-kota sekitar Jakarta.

Di Jakarta dan daerah sekitarnya meletus perlawanan rakyat yang menyebabkan situasi kota Jakarta semakin memburuk. Pada tanggal 19 Desember 1945 tiba-tiba Sekutu melancarkan serangan udara terhadap kota Karawang dan Bekasi yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban serta kehancuran infrastruktur Karawang-Bekasi. Situasi Keamanan di kota Jakarta semakin diperparah dengan mendaratnya pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok tanggal 30 Desember 1945. Berdasarkan perkembangan situasi tersebut, Presiden dan Wakil Presiden memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 (Tarunasena, 2007, Jilid 3: 20).

Keragaman bidang kehidupan yang dibahas terutama hanya politik dan ekonomi. Pada bidang politik, antara lain digambarkan konflik Indonesia-Belanda dan usaha untuk mencapai perdamaian. Di bidang ekonomi, dibahas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dan usaha-usaha untuk mengembangkan perekonomian nasional.

Dalam rangka menyusun sejarah sebagai sintesis menuju terbentuknya integrasi nasional, buku teks Tarunasena juga membahas berubahnya NIS menjadi NKRI. Akan tetapi, terdapat kesalahan faktual yang mengganggu. Apabila buku-buku teks lain memaparkan bahwa perundingan antar negara bagian untuk membentuk NKRI hanya antara RI, Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur, buku teks Tarunasena (2007, Jilid 3: 34) menguraikan sebagai berikut:

Sebagai realisasi tanggapan yang positif dari pemerintahan RIS, diadakanlah perundingan-perundingan antara RIS dengan negara-negara bagian seperti Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara



Pasundan, Negara Sumatera Selatan, dan Negara Kalimantan Barat. Setelah dilakukan perundingan beberapa minggu antara para pemimpin RIS dan dari Republik Indonesia, akhirnya tercapailah persetujuan pada tanggal 19 Mei 1950 mengenai pembentukan negara kesatuan.

Dari kutipan di atas, dinyatakan bahwa “Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, dan Negara Kalimantan Barat” masih eksis dan ikut perundingan. Akibatnya terjadi ketidaksinkronan dengan pembukaan persetujuan bahwa Negara bagian yang tersisa adalah Indonesia Timur, Sumatera Timur dan Republik Indonesia seperti dikutip sebagai berikut:

Pembukaan persetujuan tersebut berisi *"Pemerintah Republik Indonesia Serikat, dalam hal ini bertindak pula dengan mandat penuh atas nama pemerintah Indonesia Timur dan pemerintah negara Sumatera Timur, pada pihak kesatu, dan pemerintah Republik Indonesia pada pihak kedua dengan ini menyatakan: (1) Bahwa kami menyetujui dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan negara Kesatuan, sebagai penjelmaan dari Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945"* (Tarunasena, 2009, Jilid 3: 34)

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Aspek pendekatan pada penulisan sejarah revolusi kemerdekaan**

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa semua buku teks membahas periode revolusi kemerdekaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif naratif. Selain karena tradisi dalam penulisan sejarah Indonesia, dilihat dari sudut pandang lingkaran subyektif hermenetika, penggunaan deskriptif naratif pada buku teks memiliki akar historis antara lain pada pendekatan yang digunakan oleh sejarawan profesional dalam Sejarah Nasional Indonesia. Meskipun ketika membahas pergerakan nasional telah menggunakan pendekatan struktural, tetapi ketika menguraikan revolusi kemerdekaan, sejarawan profesional menggunakan

pendekatan deskriptif naratif. Oleh karena buku Sejarah Nasional Indonesia ditempatkan sebagai buku induk, maka secara otomatis buku teks pelajaran sejarah sebagai anaknya juga menggunakan pendekatan deskriptif naratif. Apalagi salah satu tokoh kunci penyusun Sejarah Nasional Indonesia, yaitu Nugroho Notosusanto, juga menyusun buku teks pelajaran sejarah untuk tahun 1975 dan 1984.

Pengaruh sejarawan profesional terhadap buku teks antara lain dapat dilihat dari dua hal. Pertama adalah penggunaan tema sebagai landasan narasi. Pada umumnya pendekatan deskriptif naratif diterapkan dengan model penceritaan berlandas pada urutan waktu. Akan tetapi, sejak tahun 1975, buku teks pelajaran sejarah mulai mendeskripsikan peristiwa dengan berlandas tema. Hal itu dapat disimak pada munculnya tema seperti ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan. Pengaruh ke dua adalah mulai diuraikannya latar belakang suatu peristiwa sejarah. Uraian latar belakang tersebut menjadikan narasi sejarah tidak hanya berisi tentang apa, siapa dan bagaimana, tetapi dalam batas tertentu juga membahas mengapa suatu peristiwa terjadi.

Penggunaan pendekatan deskriptif-naratif sangat mungkin dilakukan untuk merekonstruksi periode revolusi kemerdekaan, karena peristiwa itu hanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat (5 tahun). Selain mampu membahas latar belakang peristiwa, meski terbatas, penggunaan pendekatan deskriptif naratif dalam merekonstruksi revolusi kemerdekaan juga mampu mengungkapkan “sejarah dari dalam”. Pengarang tidak hanya mengungkapkan

aspek rasional dari fenomena historis, tetapi juga mampu mengeksplorasi aspek emosional, seperti semangat dan tata nilai yang diyakini oleh pelaku sejarah.

Selain penggunaan pendekatan deskriptif-naratif oleh semua buku teks, karakteristik lain yang cukup menonjol adalah adanya perhatian yang besar terhadap peristiwa-peristiwa militeristik, seperti perebutan senjata dan perang. Akibatnya, di antara berbagai peristiwa sejarah yang terjadi sepanjang periode revolusi kemerdekaan Indonesia, yang paling menonjol dibahas adalah konflik fisik antara Indonesia dengan bangsa-bangsa asing, terutama Jepang, Sekutu (Inggris) dan Belanda. Pengutamaan konflik fisik dapat disimak antara lain pada judul bab yang merepresentasikannya, seperti “Perang Kemerdekaan” (Siswoyo, 1979: 192; Notosusanto dkk., 1981: 97; 1992: 127; dan Moedjanto dkk., 1992: 91). Dengan judul “Perang Kemerdekaan” pengarang bermaksud menyampaikan pesan bahwa sebagai besar konflik yang terjadi dalam bentuk konflik terbuka atau perang.

Tidak hanya pada judul bab, penonjolan konflik fisik juga terdapat pada isi buku teks pelajaran sejarah. Ditinjau dari genetika historis, konflik antara Indonesia dengan bangsa-bangsa asing pada periode revolusi kemerdekaan terutama dikarenakan oleh adanya perbenturan kepentingan. Di satu pihak, Indonesia menganggap diri sebagai bangsa merdeka dan eksistensinya sah secara hukum internasional. Buku teks Idris (1979, 65-66) dengan mengutip Piagam San Fransisco antara lain menjelaskan sebagai berikut:

*Piagam San Pransisco 26 Juni 1945 merupakan Piagam PBB yang pada saat diresmikannya ditandatangani oleh wakil-wakil dari 50 negara yaitu anggota-anggota PBB yang pertama-tama. Kerajaan Belanda termasuk salah satu pesertanya. Dalam kata pembukaan Piagam ini antara lain disebutkan*

bahwa: "... kami akan meneguhkan keyakinan akan dasar-dasar hak manusia sesuai dengan harkat dan derajat manusia berdasarkan atas hak-hak yang sama... serta berusaha untuk memajukan masyarakat dan tingkat kehidupan yang lebih baik dalam suasana kemerdekaan yang lebih luas".

Kemudian dalam fasal 1 (2) Tujuan dan Azas PBB disebutkan: "Memperbaiki perhubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas persamaan hak dan *hak untuk menentukan nasib sendiri dari masing-masing bangsa*."

Berdasarkan kedua Piagam Dunia ini maka bangsa Indonesia berhak pula untuk menentukan nasib sendiri, berhak untuk merdeka dan untuk hidup bebas dari kemiskinan serta rasa takut.

Dengan demikian maka Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 memiliki kedudukan yang kuat baik nasional maupun internasional, lebih-lebih bahwa kerajaan Belanda sendiri turut serta sebagai penandatangan Piagam San Fransisco/Piagam PBB 26 Juni 1945 itu.

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman akan adanya usaha untuk meyakinkan pembaca bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa historis yang sah terjadi. Bangsa Indonesia sudah layak dan sepantasnya menjadi bangsa yang merdeka, seperti bangsa-bangsa merdeka lain di dunia.

Di pihak lain, Jepang dan Sekutu juga digambarkan sebagai memiliki dan memperjuangkan kepentingan masing-masing. Kepentingan keduanya yang mengakibatkan terjadinya benturan dengan kepentingan Indonesia, digambarkan oleh buku teks Soewarso (1986, jilid 3: 87) sebagai berikut:

... Sesudah Proklamasi kemerdekaan dicanangkan, perjuangan bangsa Indonesia justru makin bertambah berat, karena kemerdekaan yang telah diproklamasikan harus diselamatkan dari rongrongan kekuasaan asing yang tidak menghendaki bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka dan berdaulat. (1) Jepang, yang telah kalah perang, secara de facto tetap berkuasa di Indonesia lengkap dengan persenjataannya. Mereka diharuskan mempertahankan status quo seperti keadaan pada tanggal 15 Agustus 1945 hingga Pasukan Sekutu tiba di tanah air kita. Proklamasi Kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945 dianggap sebagai pemberontakan yang akan mengubah status quo. Oleh sebab itu gerakan kemerdekaan rakyat Indonesia harus ditumpas; (2) Kedatangan pasukan Sekutu di Indonesia akhir September 1945 pada hakekatnya akan mengembalikan kekuasaan Belanda. Menurut anggapan mereka Indonesia adalah "milik" Belanda yang direbut oleh Jepang pada waktu perang. Berhubung perang telah selesai dan Jepang telah kalah,

maka Indonesia harus dikembalikan kepada "pemiliknya". Proklamasi kemerdekaan bangsa kita dianggap sebagai perbuatan sekelompok teroris yang harus dihancurkan.

Pada kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa Jepang berkepentingan untuk "mempertahankan status quo seperti keadaan pada tanggal 15 Agustus 1945 hingga Pasukan Sekutu tiba". Inggris sebagai pihak yang mewakili Sekutu digambarkan memiliki kepentingan untuk "mengembalikan kekuasaan Belanda". Kedua kepentingan tersebut tidak memberi ruang untuk kemerdekaan Indonesia.

Pemahaman terhadap peta kepentingan menjadikan para pemimpin nasional Indonesia sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Akan tetapi, kehati-hatian tersebut diuraikan oleh buku teks sebagai mengakibatkan kebijakan mereka sering mengecewakan golongan pemuda. Salah satunya adalah kebijakan tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang digambarkan sebagai berikut:

... BKR dibentuk karena Pemerintah sengaja tidak mau segera membentuk tentara nasional berdasarkan pertimbangan politik. Pimpinan Nasional (Pemerintah) berpendapat bahwa pembentukan tentara nasional pada saat itu akan mengundang pukulan gabungan Tentara Serikat dan Jepang. Diperkirakan bahwa kekuatan nasional belum mampu menghadapi pukulan tersebut. Kebijaksanaan Pemerintah ini tidak memuaskan golongan pemuda. Mereka mengharapkan dibentuknya tentara nasional sebagai tulang-punggung pertahanan keamanan negara yang baru. Karena itu sebagian golongan pemuda membentuk badan-badan perjuangan atau laskar-laskar bersenjata. Kemudian terbentuklah badan-badan perjuangan seperti Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Barisan Pemuda Indonesia (BPI) dan lain-lain, hampir di seluruh pelosok tanah air. Para bekas anggota Peta dan heiho pada umumnya memasuki BKR di daerah masing-masing dan bertekad untuk menjadikan badan ini sebagai alat perjuangan bersenjata untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Mereka menganggap dirinya *pejuang*, seperti juga pemuda-pemuda lainnya (Notosusanto, 1981, jilid 3: 98).



Dari kutipan di atas tampak bahwa pembentukan BKR adalah ditempatkan sebagai bentuk ketidakbersediaan pemerintah pusat untuk membangun tentara nasional. Buku teks Notosusanto dalam konteks ini berusaha menampilkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut. Hal itu dapat disimak dari pernyataan bahwa “Pemerintah sengaja tidak mau segera membentuk tentara nasional berdasarkan pertimbangan politik” dan kekhawatiran “akan mengundang pukulan gabungan Tentara Serikat dan Jepang”, tanpa merincinya lebih lanjut. Dari sudut pandang ini, terlihat bahwa buku teks lebih berpihak pada golongan pemuda yang kemudian membentuk badan-badan perjuangan, yang dikatakannya terjadi di “hampir di seluruh pelosok tanah air”.

Keberpihakan buku teks Notosusanto (1981) dijadikan pegangan oleh buku teks pelajaran sejarah pada periode selanjutnya. Keberpihakan terhadap pandangan pemuda itu terlihat antara lain dari uraian mereka yang lebih menonjolkan konflik terbuka antara pemuda dengan kekuatan asing.

Keteguhan pemuda dalam menegakkan kedaulatan negara tercermin pula dalam dua kasus di dua kota besar pada waktu yang bersamaan, yakni tanggal 19 September 1945. Satu peristiwa terjadi di Jakarta, berupa rapat raksasa menyambut proklamasi kemerdekaan di Lapangan Ikada. Rapat itu dipelopori oleh para pemuda Menteng Raya 31 dan para mahasiswa asrama Prapatan 10. Kendati tentara Jepang berusaha menggagalkannya dengan pasukan lapis baja, rakyat tetap membanjiri rapat tersebut. Presiden Soekarno dan Wapres Hatta hadir dalam rapat tersebut, tetapi demi menghindari insiden dengan Jepang maka Presiden hanya berbicara pendek. Presiden minta supaya rakyat percaya kepada pemerintah dan berdisiplin dalam menegakkan kemerdekaan. Oleh karena itu, ia berseru agar mereka pulang dengan tertib, dan ternyata seruan Presiden ditaati. Itu sangat mengesankan pembesar-pembesar Jepang maupun Sekutu kelak.

Sementara itu, peristiwa lainnya terjadi di Surabaya, yaitu peristiwa yang kemudian lebih dikenal sebagai *insiden bendera*. Insiden itu bermula dari tindakan pengibaran bendera Merah-Putih-Biru di Kompleks Hotel Yamato oleh beberapa orang Belanda. Pengibaran bendera Belanda tersebut merupakan satu bentuk pelanggaran terhadap kebijaksanaan Pemerintah RI

setempat, yang hanya memperbolehkan dikibarkannya bendera Merah-Putih. Dengan didasari semangat menegakkan kedaulatan negara, rakyat berbondong-bondong menuju ke Tunjungan menyerbu Hotel Yamato dan merobek warna biru bendera Belanda. Mereka mengibarkan kembali menjadi bendera Merah-Putih, bendera Indonesia. Kelihatannya perobekan bagian biru bendera Belanda hanya merupakan masalah sepele, tetapi makna yang dikandung cukup besar untuk takaran peristiwa masa itu. Itulah gambaran tekad rakyat Indonesia melawan keinginan Belanda untuk menguasai kembali Nusantara yang telah menyatakan kemerdekaannya (Moedjanto, 101-102).

Pada kutipan di atas, uraian buku teks sejak awal terlihat menonjolkan pemuda dalam usaha “menegakkan kemerdekaan” secara militeristik, melalui penarasian peran mereka sebagai inisiator dan organisator rapat akbar di lapangan Ikada, Jakarta dan perobekan bendera Belanda di hotel Yamato, Surabaya.

Usaha menonjolkan peran pemuda berkembang menjadi penonjolan peristiwa konflik fisik atau aksi-aksi militeristik melawan kekuatan asing ketika membahas kehadiran pasukan Sekutu di Indonesia. Semua buku teks membahas panjang lebar tentang aksi-aksi militeristik yang terjadi sepanjang periode revolusi kemerdekaan. Bahkan dinyatakan bahwa “Perbenturan bersenjata terjadi di seluruh Indonesia” (Notosusanto, dkk., 1981: 105). Alasan perang yang disusun oleh buku teks antara lain adalah sebagai berikut:

Pemerintah dan rakyat Indonesia menerima baik kedatangan pasukan-pasukan Serikat dengan catatan bahwa mereka tidak akan mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda. Namun ketika diketahui bahwa mereka membiarkan dirinya diboncengi oleh Belanda yang bermaksud untuk mengembalikan pemerintah kolonialnya, rakyat Indonesia terpaksa mengadakan perlawanan. Apalagi ketika mereka mempersenjatai serdadu-serdadu Belanda yang dibebaskan dari tawanan Jepang. Timbullah pertempuran di pelbagai tempat antara pihak Indonesia melawan pihak Inggris yang mewakili Serikat (Notosusanto, dkk., 1981, jilid 3: 106).

Kutipan di atas secara jelas menarasikan pandangan bahwa alasan perang adalah karena Sekutu atau Serikat “membiarkan dirinya diboncengi oleh Belanda

yang bermaksud untuk mengembalikan pemerintah kolonialnya”. Bahkan perang ditempatkan sebagai langkah yang “terpaksa” dilakukan, sebagai bentuk “perlawanan”.

Pandangan sejenis juga dimiliki oleh buku teks karangan Tarunasena (2007, Jilid 3: 22) ketika menggambarkan pertempuran Magelang dan Ambarawa sebagai berikut:

Kedatangan tentara Sekutu dibawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel yang tiba di Semarang tanggal 20 Oktober 1945, pada awalnya disambut baik oleh rakyat kota itu. Hal itu terjadi karena tujuan kedatangan Sekutu tersebut adalah untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Karena pendaratan tentara Sekutu tersebut mengikutsertakan tentara NICA yang melepaskan dan mempersenjatai interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa, sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Maka pecahlah pertempuran antara kedua belah pihak.

Pada kutipan di atas, digambarkan bahwa masyarakat pada awalnya “menyambut dengan baik” kedatangan Brigadir Jenderal Bethel beserta pasukannya. Hal itu terjadi karena pasukan Sekutu bermaksud “mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah”. Akan tetapi sikap masyarakat berubah ketika mengetahui bahwa Sekutu “tersebut mengikutsertakan tentara NICA”. Bahkan sikap masyarakat menjadi marah dan melakukan perang ketika NICA “melepaskan dan mempersenjatai interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa”. Pada narasi itu, faktor keikutsertaan NICA dan tindakannya yaitu mempersenjatai interniran Belanda ditempatkan sebagai penyebab utama meletusnya perang.

Penarasian konflik fisik yang berupa perang selalu disertai dengan munculnya tokoh-tokoh yang digambarkan menjadi pahlawan atau hero. Salah satu tokoh yang dipahlawankan oleh buku teks adalah Sudirman. Namanya

muncul sejak pertempuran Ambarawa dan semakin terkenal ketika menjabat sebagai pemimpin tertinggi yang dikenal sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat mulai 18 Desember 1945. Ketika terjadi agresi Belanda 19 Desember 1948, Sudirman digambarkan sebagai berikut:

Dalam pada itu beberapa bulan sebelum Belanda menyerang, Jenderal Soedirman, Panglima Besar Angkatan Perang, menderita sakit paru-paru yang sangat parah sehingga harus dirawat di rumah sakit dan kemudian di rumah. Namun ketika situasi menjadi gawat, ia berkata bahwa jika Belanda menyerang kembali ia akan memegang kembali pimpinan Angkatan Perang dan memimpin prajurit-prajuritnya dalam suatu perlawanan gerilya. Janji itu ditepati. Pada saat Belanda menyerang, ia bangkit dari tempat tidurnya dan meminta diri kepada Presiden untuk pergi ke luar kota guna memimpin gerilya. Maka dengan diiringi oleh ajudan dan pasukan pengawalnya, Jenderal Soedirman naik gunung turun gunung, masuk hutan ke luar hutan, menempuh terik matahari dan curahan hujan lebat untuk memimpin perlawanan rakyat semesta terhadap musuh. Dalam masa yang paling gelap bagi Republik, Pak Dirman memberikan pegangan dan kekuatan batin kepada rakyat dan prajurit-prajurit yang berjuang habis habisan untuk kelangsungan hidup negaranya. MBKD dan MBKS segera diaktifkan di bawah panglimanya masing-masing. Pemerintah Militer memutar rodanya dengan lancar. Dengan demikian dimana masih ada prajurit TNI, di sana Republik Indonesia masih berdiri (Notosusanto, dkk., 1992, Jilid 3: 155).

Heroifikasi antara lain terlihat dari penggambaran kondisi Jenderal Sudirman sebagai sedang “menderita sakit paru-paru yang sangat parah”, tetapi tetap menepati janji untuk “naik gunung turun gunung, masuk hutan ke luar hutan, menempuh terik matahari dan curahan hujan lebat untuk memimpin perlawanan rakyat semesta”. Bahkan buku teks karangan Notosusanto menjadikannya sebagai tokoh yang mampu “memberikan pegangan dan kekuatan batin kepada rakyat dan prajurit” pada saat Indonesia sedang mengalami “masa yang paling gelap”. Penggambaran kondisi Jendral Sudirman di atas, dalam konteks penulisan sejarah, merupakan usaha untuk mengeksplorasi “sejarah dari dalam”.

Tokoh lain yang dimunculkan sebagai pahlawan periode revolusi kemerdekaan adalah Letnan Kolonel (Letkol) Suharto, yang menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1966-1998. Kepahlawanan Letkol Suharto yang pada waktu itu menjabat sebagai Komandan Wehrkreise III, terutama dalam peristiwa yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949, seperti dikisahkan sebagai berikut:

Komandan Wehrkreise III menetapkan untuk melancarkan serangan umum pada siang hari dengan menggerakkan seluruh kekuatan satuan-satuan Sub Wehrkreise pada tanggal 1 Maret 1949. Dengan terdengarnya bunyi sirine tanda selesainya jam malam di pagi hari pukul 06.00, yang dijadikan awal mulai serangan umum oleh TNI dari segala jurusan dengan menggunakan tanda pengenal janur kuning, terbukti mendapat dukungan dari segala suku, lapisan pemuda dan masyarakat di Yogyakarta.

Serangan umum dilakukan dengan pos komando di desa Ngotho, Bantul, untuk memudahkan serangan, pasukan dibagi atas sektor berikut: (1) Sektor Selatan (SWK 102) dan Sektor Timur (SWK 105) dipimpin Mayor Sarjono, (2) Sektor Utara (SWK 104) dipimpin oleh Mayor Kusno, (3) Sektor Barat (SWK 103 a-103 b) dipimpin oleh Mayor Ventje Sumual, (4) Sektor Kota ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Marsudi sebagai penanggung jawab.

Pada malam hari menjelang serangan umum, pasukan kita mendekati kota. Pada pagi hari, 1 Maret 1949, bersamaan dengan bunyi sirine tanda jam malam berakhir (pukul 06.00), serangan umum dilancarkan di seluruh kota. Letkol Soeharto langsung memimpin anak buahnya dari sektor barat sampai dengan batas Jalan Malioboro. Serangan tanggal 1 Maret 1949 merupakan serangan kilat yang dipimpin oleh seorang perwira muda, pemimpin komandan gerilya untuk daerah Yogyakarta dan sekitarnya, yaitu Letnan Kolonel Soeharto. Ia memimpin sendiri pertempuran pada pagi hari, tanggal 1 Maret 1949 itu, dengan menyandang senapan otomatis Qwengun MK 143 di bahunya.

Serangan umum 1 Maret 1949 itu mengingatkan Belanda bahwa Republik Indonesia masih kuat dan tegak berdiri dan TNI sewaktu-waktu masih dapat memberikan pukulan maut kepada tentara Belanda. Belanda terkejut melihat TNI dapat menguasai kota Yogyakarta. Berita kemenangan serangan itu oleh para pejuang disiarkan ke luar negeri melalui radio di Wonosari, ke Bukittinggi (PDRI), ke Aceh, ke Rangoon (Birma), dan akhirnya ke New Delhi (India) (Waridah, dkk., 2000, jilid 2: 252)



Dari kutipan di atas tampak bahwa kepahlawanan Letkol Suharto berusaha digambarkan dalam buku teks sebagai tokoh yang “menetapkan untuk melancarkan serangan umum pada siang hari”, dan “memimpin sendiri pertempuran pada pagi hari, tanggal 1 Maret 1949 itu, dengan menyandang senapan otomatis Qwengun MK 143 di bahunya”. Serangan itu dapat “mengingatkan Belanda bahwa Republik Indonesia masih kuat dan tegak berdiri dan TNI sewaktu-waktu masih dapat memberikan pukulan maut kepada tentara Belanda”, serta menjadi semakin hebat ketika “berita kemenangan serangan itu oleh para pejuang disiarkan ke luar negeri melalui radio di Wonosari, ke Bukittinggi (PDRI), ke Aceh, ke Rangoon (Birma), dan akhirnya ke New Delhi (India)”.

Untuk lebih meyakinkan pembaca akan kepahlawanan Letkol Suharto, buku teks karangan Waridah (2000, Jilid 2: 252-253) lebih lanjut menguraikan sebagai berikut:

...adanya serangan umum tanggal 1 Maret 1949 telah mengejutkan Belanda. Dunia mengakui bahwa RI masih berdiri tegak. Peristiwa tersebut diabadikan dalam sebuah Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 yang terletak di depan gedung negara, pusat jantung kota Yogyakarta. Wujud monumen tersebut adalah sebagai berikut: (1) Lima buah patung menggambarkan wakil golongan dalam berjuang mempertahankan RI yaitu: TNI, pelajar, pedagang, petani, dan wanita.; (2) Patung singa mengandung arti angka satu; (3) Patung api berlidah tiga mengandung maksud bulan tiga atau bulan Maret; (4) Tulisan *jer basuki mawa bea* artinya untuk sukses harus ada korban. *Tetesing Ludiro Kusumoning Bawono* mengandung arti 1949 (bawono: 1, kusumo: 9, ludiro: 4, dan tetesing: 9).

Dalam mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak takut mati, walaupun menyadari kalah di bidang persenjataan. Bahkan, ada di antara para pejuang membentuk kelompok pejuang dengan nama IMAM yang kepanjangannya adalah *Indonesia Merdeka Atau Mati* dan berarti mereka memilih mati daripada dijajah. Hal itu dibuktikan dengan adanya korban yang tidak sedikit di pihak kita dalam merebut ibu kota RI akibat agresi Belanda II. Korban tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Tempat	Mati	Luka	Hilang	Benda (ORI)
1.	Kota Praja Yogyakarta	519	119	90	Rp 72.443.552
2.	Kab. Bantul	1.055	160	221	Rp 67.391.209
3.	Kab. Sleman	923	399	224	Rp 181.868.414
4.	Kab. Gunungkidul	157	30	1	Rp 8.400.765
5.	Kab. Kulonprogo	57	24	3	Rp 1.775.530

Keberhasilan serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949 (6 jam menguasai ibu kota perjuangan Yogyakarta) mempunyai makna nasional dan internasional. Peristiwa itu disiarkan oleh RRI dari Banaran Playen Gunungkidul, diteruskan ke Bukittinggi, ke Takengon Aceh, dari Aceh ke Rangoon Birma, ke New Delhi India, akhirnya sampai ke New York. Yang dimaksudkan dengan makna nasional, adalah bahwa peristiwa tersebut menambah kepercayaan masyarakat Indonesia untuk tetap merdeka dan mengakui semangat perjuangan rakyat melawan Belanda. Adapun yang dimaksud dengan makna internasional adalah bahwa peristiwa tersebut menjadi pendorong pengukuhan eksistensi RI oleh Dewan Keamanan PBB.

Dengan menunjukkan adanya monumen, buku teks berusaha menggambarkan bahwa seakan-akan Serangan Umum 1 Maret 1949 sungguh-sungguh merupakan pertempuran yang dahsyat. Bahkan buku teks juga memberikan data tentang korban perang, meski sama sekali tidak secara khusus menunjuk korban Serangan Umum 1 Maret 1949. Pada bagian akhir dari kutipan, uraian buku teks menunjukkan bahwa peristiwa tersebut sangat besar maknanya, yaitu secara nasional mampu “menambah kepercayaan masyarakat Indonesia untuk tetap merdeka” dan secara internasional berhasil “menjadi pendorong pengukuhan eksistensi RI oleh Dewan Keamanan PBB”.

Penonjolan perjuangan fisik yang disertai dengan heroifikasi terhadap tokoh-tokoh militer yang terlibat di dalamnya juga dilakukan dengan melalui pendistorsian dan penegasian terhadap berbagai peristiwa historis non fisik, yaitu perjuangan diplomasi. Distorsi dan negasi tampak antara lain dilakukan oleh

buku teks karangan Notosusanto (1992. Jilid 3: 145) ketika menggambarkan Persetujuan Linggarjati sebagai berikut:

Dalam bulan November 1946 diselenggarakan perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda di Linggajati (atau Linggarjati), sebuah tempat peristirahatan di sebelah selatan Cirebon. Persetujuan Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 itu berisi antara lain: (1) Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara yang berbentuk federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS), (2) Pemerintah RIS dan Pemerintah Belanda akan bekerja sama dalam sebuah perserikatan negara yang bernama Uni Indonesia - Belanda.

Sesudah Persetujuan Linggajati ditandatangani, hubungan RI-Belanda semakin memburuk. Oleh pihak kolonialis Belanda, Persetujuan Linggajati memang hanya dianggap sebagai alat untuk memungkinkan mereka mendatangkan pasukan-pasukan yang lebih banyak dari negerinya. Setelah mereka merasa cukup kuat, mereka beralih kepada maksud semula, yakni menghancurkan Republik dengan kekuatan senjata.

Pada kutipan di atas tampak bahwa dengan bersembunyi di balik kata “antara lain”, buku teks secara sengaja hanya menampilkan dua isi perjanjian. Meskipun hampir semua buku teks lainnya menggunakan kata “antara lain”, tetapi isi perjanjian yang ditampilkan lebih lengkap, seperti dilakukan oleh buku teks karangan Sardiman (1996. Jilid 2c: 110-111) sebagai berikut:

Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri dari 17 pasal. Isi pokok Perundingan Linggajati antara lain sebagai berikut: (1) Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatra. Sedangkan daerah-daerah yang diduduki Sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada RI, (2) Akan dibentuk NIS (Negara Indonesia Serikat) yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia) sebagai negara berdaulat, (3) Pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh raja Belanda, (4) Pembentukan NIS dan Uni Indonesia-Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949, (5) Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing, (6) Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara, (7). Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase.

Dengan memperbandingkan kedua pembahasan, tampak bahwa buku teks karangan Notosusanto dengan sengaja menyembunyikan isi perjanjian Linggarjati yang sangat penting, yaitu “Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura. dan Sumatra”, untuk mendistorsi dinamika historis perjuangan diplomasi. Pengakuan akan eksistensi RI itu merupakan isi perjanjian yang paling penting dan menjadi tujuan utama perjuangan para diplomat Indonesia. Perdana Menteri Syahrir, jauh sebelum perundingan Linggarjati diadakan telah menyatakan bahwa permusyawaratan Indonesia dengan Belanda bisa dilakukan sesudah Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Pernyataan itu secara lengkap dimuat oleh surat kabar *Berita Indonesia* pada tanggal 5 Desember 1945 sebagai berikut:





Dari berita surat kabar tersebut dapat dilihat bahwa pemimpin nasional menghendaki penyelesaian konflik dengan Belanda melalui perundingan yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) dan bukan dengan jalan kekerasan seperti yang telah ditempuh oleh Belanda. Untuk tujuan itulah, para pemimpin nasional Indonesia menempatkan pengakuan kemerdekaan sebagai tujuan utama perjuangan, seperti disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam nota balasan kepada van Mook tertanggal 12 Maret 1946 yang isi pokoknya ditulis dalam buku teks karangan Waridah (2000, Jilid 2: 242) sebagai berikut:

- a. Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berkedaulatan penuh atas wilayah bekas jajahan Hindia Belanda.



- b. Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam waktu tertentu dan urusan luar negeri serta pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang Indonesia dan Belanda.
- c. Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti dengan tentara Republik Indonesia.
- d. Selama perundingan berlangsung, semua aksi militer harus dihentikan dan pihak Republik Indonesia akan melakukan pengawasan terhadap pengungsian tawanan Belanda dan interniran lainnya.

Meski oleh tidak ditujukan untuk menjelaskan wacana yang berkembang di kalangan pemimpin nasional Indonesia, tetapi nota balasan tersebut memperlihatkan Presiden Soekarno juga menegaskan bahwa “Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berkedaulatan penuh atas wilayah bekas jajahan Hindia Belanda”.

Selain mendistorsi, buku teks karangan Notosusanto (1981/1992) juga berusaha menegaskan Perjanjian Linggarjati. Pernyataan bahwa “oleh pihak kolonialis Belanda, Persetujuan Linggajati memang hanya dianggap sebagai alat untuk memungkinkan mereka mendatangkan pasukan-pasukan yang lebih banyak dari negerinya. Setelah mereka merasa cukup kuat, mereka beralih kepada maksud semula, yakni menghancurkan Republik dengan kekuatan senjata” lebih merupakan pandangan yang terlalu dipaksakan untuk memberi kesan negatif terhadap isi Perjanjian Linggarjati. Pernyataan tersebut mengingkari realitas historis yang menunjukkan bahwa sejak pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan RI melalui Perjanjian Linggarjati, berbagai negara menjadi ikut mengakuinya, seperti ditulis oleh buku teks Idris (1979: 72) sebagai berikut:

Untuk Indonesia pengakuan ini yang pertama-tama diberikan oleh Inggris pada tanggal 31 Maret 1947. Kemudian disusul oleh: Amerika Serikat, 17 April 1947; Mesir, 11 Juni 1947; Libanon, 29 Juni 1947; Syria, 2 Juli 1947; Afghanistan, 23 September 1947; Burma, 23 Nopember 1947; Arab Saudi, 24 Nopember 1947; Yaman, 3 Mei 1948; dan Uni Sovyet, 26 Mei 1948

Meski tidak dimaksudkan untuk menjelaskan akibat Perjanjian Linggarjati, tetapi fakta historis yang dimunculkannya sangat berguna. Dari urutan waktu pada kutipan di atas tampak bahwa Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 memiliki pengaruh besar. Kurang dari sepekan, Inggris kemudian ikut mengakui kemerdekaan RI dan disusul oleh Amerika Serikat.

Selain eksistensi RI memperoleh pengakuan secara internasional, Perjanjian Linggarjati juga memungkinkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk ikut terlibat dalam usaha menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Dengan kata lain, pengakuan Belanda atas eksistensi RI melalui Perjanjian Linggarjati, menjadi prasyarat bagi masuknya PBB. Dari sudut pandang ini, pengakuan kemerdekaan sebagai tujuan utama perjuangan yang dicanangkan oleh pemimpin nasional menjadi lebih dapat dipahami, sekaligus pemahaman bahwa hasil Perjanjian Linggarjati merupakan prestasi besar yang diukir semasa Syahrir menjadi Perdana Menteri.

Di lain pihak, langkah Belanda melakukan “aksi polisionil” pasca penandatanganan Perjanjian Linggarjati lebih merupakan ekspresi kegusaran terhadap blunder politik, yaitu pengakuan terhadap kemerdekaan RI, oleh para diplomatnya. Akan tetapi, langkah militer itu tidak mampu mengembalikan posisi RI kembali menjadi “Hindia Belanda”. Konflik Indonesia-Belanda telah menjadi permasalahan antar dua negara merdeka yang secara hukum internasional sah untuk PBB campur tangan.

Distorsi dan negasi juga terjadi pada saat buku teks menguraikan hasil-hasil perundingan Renville. Buku teks Moedjanto (1992, Jilid 3: 109 -110) saat membahas isi perjanjian Renville, antara lain menyatakan sebagai berikut:

...Pada perkembangan berikutnya, hanya melalui desakan KTN, Pemerintah RI terpaksa menyetujui isi Persetujuan Renville yang amat menguntungkan Belanda itu. Dari Renville, RI menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat dengan masa peralihan sehingga secara tidak langsung pendudukan Belanda atas beberapa daerah RI mendapatkan pembenaran. Daerah-daerah itu akan diklaim oleh Belanda dan diakui oleh RI sampai diselenggarakan plebisit (penentuan pendapat rakyat = pepera) untuk menentukan apakah rakyat mau bergabung dengan RI atau tidak. Selain itu, pihak RI juga bersedia menarik pasukan-pasukan TNI dari daerah-daerah pendudukan Belanda atau kantong-kantong gerilya ke wilayah yang masih bersisa milik RI. Ini merupakan satu kekalahan terbesar dari sebuah perjanjian, namun perlu disadari bahwa dalam percaturan politik tingkat tinggi hal tersebut tidak bersifat mutlak dan tetap. Sejarah revolusi belum berakhir, tetapi baru sampai pada *jeda* tertentu yang masih akan berlanjut. Dalam masa jeda RI dapat menyusun kembali kekuatan dan siasat perjuangan yang baru.

Persetujuan Renville yang amat merugikan RI itu ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Walaupun dengan berat hati, itikad baik untuk mematuhi, memaksa pasukan-pasukan TNI meninggalkan dan mengosongkan daerah gerilya di belakang garis van Mook yang sangat luas. Seperti kita ketahui garis itu menghubungkan satu daerah terdepan yang dikuasai Belanda dengan daerah terdepan lainnya. Sementara disebut daerah "kantong" adalah daerah RI yang ada di belakang garis van Mook. Dari Jawa Barat ada sekitar 35.000 orang tentara anggota Divisi Siliwangi dihijrahkan menuju daerah RI di Jawa Tengah, di antaranya ditempatkan di Sala. Begitu juga dalam skala lebih kecil, kurang lebih 6.000 tentara dari Jawa Timur juga dibawa menuju Jawa Tengah atau Yogyakarta, yang sejak tanggal 4 Januari 1946 telah menjadi ibukota RI.

Kutipan di atas secara jelas merepresentasikan pandangan bahwa pemerintah RI berada di bawah "desakan KTN", sehingga bersedia menandatangani Perjanjian Renville yang "amat menguntungkan Belanda" dan "amat merugikan RI". Bahkan dengan sangat tegas pengarang menyatakan bahwa Perjanjian Renville "merupakan satu kekalahan terbesar dari sebuah perjanjian".

Pernyataan bahwa KTN mendesak pemerintah RI untuk segera menandatangani Perjanjian Renville merupakan sebuah distorsi. Sebagai bahan perbandingan, uraian yang tidak terlalu emosional dan dalam kadar tertentu lebih obyektif diberikan oleh buku teks Sardiman (1996, Jilid 2c: 123) sebagai berikut:

Pihak Indonesia sebenarnya keberatan, karena khawatir akan kehilangan kekuasaannya di masa peralihan. Berkaitan dengan ini, maka KTN pada tanggal 13 Januari 1948 mengadakan pertemuan dengan Indonesia di Kaliurang. Hadir dalam pertemuan ini, antara lain Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, dan Sutan Syahrir. Dalam pertemuan ini *Frank Graham* dari Amerika Serikat memberi jaminan dengan mengatakan *you are what you are, Anda adalah anda* (sebagaimana keadaan sekarang). KTN juga memperingatkan kalau Indonesia menolak persetujuan gencatan senjata dengan garis demarkasi Van Mook, 12 pasal Belanda dan 6 pasal tambahan dari KTN, maka semua akan dikembalikan kepada DK PBB. Kalau kembali kepada DK PBB, maka akan selalu kandas dengan veto dari anggota DK PBB yang pro Belanda.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa istilah “desakan KTN” yang digunakan oleh buku teks karangan Moedjanto sebenarnya merupakan pertemuan resmi antara pemerintah Indonesia dengan anggota KTN. Dalam pertemuan itu terjadi diskusi mendalam tentang posisi Indonesia apabila menandatangani perjanjian damai dengan Belanda, terutama terkait dengan enam pasal tambahan sebagai berikut:

Komisi Tiga Negara berpendapat, bahwa keterangan dasar di bawah ini antara lain akan dipergunakan sebagai dasar perundingan untuk penyelesaian politik, yaitu sebagai berikut:

1. Kedaulatan atas Hindia Belanda seluruhnya ada dan akan tetap berada di tangan Kerajaan Belanda sampai waktu yang ditetapkan. Kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan ini kepada Negara Indonesia Serikat. Sebelum masa peralihan demikian itu habis temponya, Kerajaan Belanda dapat menyerahkan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah federal sementara yang dibentuk dari daerah-daerah yang nantinya akan merupakan Negara Indonesia Serikat. Jika sudah terbentuk, Negara Indonesia Serikat akan merupakan negara yang berdaulat dan merdeka berkedudukan sejajar dengan Kerajaan Belanda dalam Uni Belanda Indonesia, dikepalai oleh Turunan Raja Belanda. Hal

- status Republik Indonesia adalah sebagai negara yang bergabung dalam Negara Indonesia Serikat;
2. Dalam pemerintah federal sementara, sebelum diadakan perubahan dalam undang-undang Negara Indonesia Serikat, kepada negara-negara bagian akan diberikan perwakilan yang adil;
  3. Sebelum Komisi Tiga Negara dibubarkan, tiap-tiap pihak boleh meminta supaya pekerjaan komisi diteruskan, yaitu guna membantu menyelesaikan perselisihan berkenaan dengan penyelesaian politik, yang mungkin terbit selama masa peralihan. Pihak yang lainnya tidak boleh berkeberatan atas permintaan demikian itu; permintaan tersebut harus dimajukan oleh pemerintah Belanda kepada Dewan Keamanan;
  4. Dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan tapi tidak lebih dari satu tahun sesudah persetujuan ini ditandatangani, maka di daerah-daerah di Jawa, Sumatera dan Madura akan diadakan pemungutan suara (plebisit) untuk menentukan apakah rakyat di daerah-daerah tersebut akan turut dalam Republik Indonesia atau masuk bagian yang lain di dalam lingkungan Negara Indonesia Serikat. Plebisit ini diadakan di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara, jika kedua pihak dapat persetujuan dalam artikel 3 yang menentukan, supaya Komisi Tiga Negara memberikan bantuan dalam soal tersebut. Kemungkinan tetap terbuka jika kedua pihak dapat persetujuan akan menggunakan cara lain dari pemungutan suara untuk menyatakan kehendak rakyat di daerah-daerah itu;
  5. Sesudah ditetapkan batas-batas negara-negara bagian yang dimaksud itu, maka akan diadakan rapat pembentukan undang-undang dasar menurut cara demokrasi, untuk menetapkan konstitusi buat Negara Indonesia Serikat. Wakil-wakil dari negara-negara bagian akan mewakili seluruh rakyat;
  6. Jika ada negara bagian memutuskan tidak akan turut serta menandatangani konstitusi tersebut sesuai dengan pasal 3 dan 4 dalam persetujuan Linggarjati, kedua pihak tidak akan keberatan diadakan perundingan untuk menetapkan perhubungan istimewa dengan Negara Indonesia Serikat (Tobing, 1986: 42-43).

Dari keenam pasal tambahan di atas, para pemimpin nasional RI terutama mempermasalahkan kalimat terakhir pada pasal 1, yaitu “status Republik Indonesia adalah sebagai negara yang bergabung dalam Negara Indonesia Serikat”. Hal yang dipertanyakan adalah status RI sebelum NIS terbentuk. Menanggapi pertanyaan itu masing-masing anggota KTN menyampaikan pandangan yang berinti pada jawaban bahwa status RI tidak berubah, seperti saat



diskusi itu berlangsung. Jawaban itu antara lain disampaikan oleh Graham sebagai berikut:

*And you note that the Netherlands says one thing about your status and you say another. We don't have powers of arbitration as between the two claims. Whatever you are now, you are. Whatever it is, is regardless of any of these points (The six additional principles) Is that clear? (Agung, 1983: 73)*

Dari kutipan di atas secara jelas Graham menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menjadi wasit terhadap pernyataan Belanda terhadap status RI dan juga pernyataan RI terhadap statusnya. Apa pun adanya RI kini, itulah adanya. Apa pun adanya itu, tidak penting bagi pasal-pasal tambahan yang sedang dibahas.

Berdasar hasil diskusi Kaliurang dan berbagai pertimbangan lain, akhirnya delegasi Indonesia di bawah pimpinan Amir Syarifuddin pada tanggal 15 Januari 1948 mengirim surat kepada KTN sebagai berikut:

Saya mendapat kehormatan memberitahukan kepada Tuan bahwa Pemerintah Republik bersedia menerima: (1) Usul-usul mengenai persetujuan gencatan senjata yang diajukan secara tak resmi oleh Pemerintah Belanda tanggal 2 Januari 1948 dan diresmikan pada tanggal 9 Januari 1948 serta alinea yang dikonsepsi baru dan tafsiran alinea 10 tentang usul-usul ini yang disampaikan pada 4 Januari 1948 dan diresmikan tanggal 9 Januari 1948 (dokS/AC/10/83 rev. 81), (2) Asas-asas politik untuk pengaturan sengketa termasuk empat pasal Persetujuan Linggajati, yang diambil alih oleh "pesan Natal" Komisi, diajukan secara tak resmi oleh delegasi Belanda tanggal 2 Januari 1948 dan dirumuskan tanggal 9 Januari 1948 (dok.S/AC.-10/81.rev.1).

Kecuali tafsir atas persetujuan gencatan senjata yang Tuan sampaikan hari ini kepada saya dan dengan janji bahwa dokumen-dokumen akan ditandatangani pada hari yang sama dan akan diumumkan. Dan kecuali penerimaan asas-asas oleh delegasi Belanda, ditunjukkan ke alinea berikutnya, seperti disebut dalam sub-alinea d. Pemerintah Republik Indonesia juga dengan senang hati bersedia menerima enam asas tambahan untuk perundingan mengenai tercapainya suatu pengurusan politik seperti tercantum dalam dokumen S/AC.10/84/AC tanggal 10 Januari 1948 dengan syarat-syarat sebagai berikut: (a) Bahwa pasal 2 akan terlaksana setelah penandatanganan persetujuan politik seperti termaktub dalam dokumen ini, (b) Bahwa penunjukan pasal 4 tidak akan melancarkan jumlah negara-negara Indonesia

Serikat yang akan dibentuk, (c) Bahwa keenam pasal akan disampaikan secara resmi dan secara terbuka, setelah penandatanganan persetujuan gencatan senjata dan pernyataan oleh kedua belah pihak tentang perintah penghentian tembak-menembak serupa yang dituntut, (d) Komisi segera setelah diujarkannya pasal-pasal ini akan mempersilakan kedua belah pihak supaya memberitahukan tidak lebih dari 48 jam setelahnya, bila kedua belah pihak menerima pasal ini (Agung, 1983: 65)

Keputusan delegasi Republik Indonesia tersebut diperkuat oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Januari 1948 melalui surat pribadi kepada KTN sebagai berikut:

Saya mendapat kehormatan untuk memberitahukan kepada Tuan bahwa kedudukan Republik di dalam hubungan dengan keenam asas politik sebagaimana diberitahukan di dalam dokumen *A/AC/10/Conf. 2/4*, dan yang bersama dengan 12 asas yang disepakati tanggal 17 Januari, merupakan suatu dasar guna tercapainya suatu penyelesaian politik. Pemerintah Republik Indonesia menerima keenam asas politik tanpa syarat sebagaimana diberitahukan di dalam surat delegasi tanggal 15 Januari 1948. Sesuai cara penglihatan Pemerintah Belanda, Pemerintah Republik mempertahankan hak-haknya untuk selanjutnya mengutarakan pendapat atas tiap-tiap asas dan juga menunjuk kepada tiap soal yang ada kaitannya dengan asas-asas ini, bila Republik menganggap hal ini perlu (Agung, 1983: 71).

Dari kedua surat persetujuan pemimpin nasional di atas tidak mengindikasikan adanya desakan atau tekanan. Persetujuan terhadap isi Perjanjian Renville merupakan keputusan penuh pertimbangan untuk segera dicapainya penyelesaian politik, yaitu Indonesia yang berdaulat, merdeka dan berkedudukan sejajar dengan Kerajaan Belanda serta bangsa-bangsa merdeka lain di dunia.

Penghakiman buku teks karangan Moedjanto bahwa Perjanjian Renville sebagai satu “kekalahan terbesar dari sebuah perjanjian” lebih merupakan usaha untuk menegasikan tindakan pemerintah, dari pada menyampaikan kebenaran akademik. Dalam dunia diplomasi, langkah para pemimpin RI ditempatkan sebagai pemberian konsesi kepada Belanda untuk segera tercapainya penyelesaian politik yang final. Akibat dari konsesi itu, sejak Perjanjian Renville

ditandatangani, kekuatan internasional memberi tekanan kepada Belanda untuk segera mencapai penyelesaian yang lebih mapan. Van Beel, salah seorang anggota KTN menyatakan bahwa RI telah memberikan 10% dari keinginan Belanda. Oleh karena itu, Belanda harus segera mengambil sikap yang lebih rasional (Agung, 1983: 77). Pernyataan lebih tegas diberikan oleh Marshall yang mewakili Amerika Serikat dalam pidatonya di depan sidang PBB pada tanggal 23 September 1948 sebagai berikut:

Di Indonesia persetujuan harus dicapai melalui perundingan tanpa pertumpahan darah, sesuai dengan dasar-dasar yang garis-garis besarnya sudah ditetapkan dalam Persetujuan Renville, supaya dalam waktu singkat kepada bangsa Indonesia diberikan kemerdekaannya, sehingga dapat dibangun kerjasama yang baik antara bangsa-bangsa dunia, khususnya antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia (Tobing, 1986: 133).

Dengan melihat besarnya tekanan internasional kepada Belanda untuk “dalam waktu singkat kepada bangsa Indonesia diberikan kemerdekaannya”, Ide Anak Agung Gde Agung menempatkan Perjanjian Renville sebagai “titik balik dalam penyelesaian konflik Indonesia-Belanda” (Agung, 1983: 79).

Pola narasi yang menonjolkan perjuangan fisik atau militer dan heroifikasi terhadap tokoh terkait, serta distorsi dan negasi terhadap peran sipil yang dilakukan oleh buku teks pelajaran sejarah tidak berjalan sendiri. Pola itu merupakan bagian dari sebuah “gerakan” besar yang disponsori pemerintah Orde Baru. Salah satu tonggak penting gerakan itu adalah Seminar Angkatan Darat 1972 yang hasilnya antara lain menginstruksikan kepada militer untuk mengedarkan sejarah versi militer kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Penyebaran dilakukan melalui memoar, film, museum, monumen, dan buku pelajaran sejarah. Sasaran penyebaran terutama adalah generasi muda, agar

mereka menghargai apa yang telah dilakukan oleh Generasi 1945 (McGregor, 2008: 249). Dari sudut pandang ini, dapat diambil pemahaman bahwa buku teks pelajaran sejarah SMA sejak kurikulum 1975 menjadi salah satu media pewarisan nilai-nilai dalam semangat 1945, seperti diamanatkan oleh Tap MPR No: IV/MPR/1973. Nilai 1945 antara lain adalah rela berkorban, persatuan dan kesatuan, kerjasama, saling menghargai, dan cinta tanah air (Badrika, 1997: 315-316).

Secara historis, pengaruh pandangan militeristik terhadap produksi buku teks pelajaran sejarah dimulai dengan penunjukan Nugroho Notosusanto sebagai kepala tim riset buku sejarah untuk sekolah menengah sebagai berikut:

...Pada tahun 1974, Menteri Pendidikan mengangkat Nugroho dan anggota staf yang lain sebagai kepala tim riset untuk buku sejarah bagi sekolah menengah. Staf Pusat Sejarah ABRI juga membantu menyiapkan buku teks sejarah untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dari tahun 1975/1976 dan untuk pendidikan tinggi dari tahun 1970-1974. Pusat Sejarah ABRI juga berperan serta dalam evaluasi buku-buku untuk perpustakaan sekolah dan dalam merancang kurikulum sejarah untuk sekolah (McGregor, 2008: 271-272).

Gerakan mempromosikan sejarah militer tidak berhenti dengan menyusun buku teks pelajaran yang sesuai dengan selera penguasa. Pada kurikulum 1984, pemerintah memunculkan mata pelajaran baru yang dikenal sebagai Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Untuk pelaksanaan mata pelajaran PSPB tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 290a/U/1985 tanggal 8 Juli 1985 dan No. 216/C/Kep/1985 tanggal 7 November 1985 yang berisi tentang pelaksanaan mata pelajaran PSPB dan GBPP PSPB.

Seperti pada mata pelajaran sejarah untuk periode revolusi kemerdekaan, materi PSPB juga menekankan pada fenomena historis yang menonjolkan perjuangan fisik. Perbedaannya, PSPB mencakup periode sejarah yang lebih luas, yaitu mulai dari Tanam Paksa sampai dengan Orde Baru. Untuk periode revolusi kemerdekaan, isi keduanya relatif sama. Sebagai contoh adalah saat membahas perundingan Indonesia-Belanda, antara lain dipaparkan sebagai berikut:

Dengan penengah Lord Killearn, perundingan Indonesia - Belanda diadakan lagi di Linggajati, di kaki Gunung Cereme, Cirebon sejak tanggal 10 November 1946. Hasil perundingan diparaf kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947. Isi pokoknya adalah: (1) Belanda mengakui secara de facto kedaulatan Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949 Belanda harus sudah meninggalkan daerah de facto; (2) Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat. Pemerintah RI merupakan salah satu negara bagian dari negara Indonesia Serikat; (3) Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua Uni (Lestariyono, 1988, Jilid 2: 6).

Kesamaan isi terutama ketika menyangkut fakta-fakta keras, seperti tanggal kejadian dan isi perjanjian. Akan tetapi, menyangkut gaya bahasa dan interpretasi historis, buku teks PSPB terlihat lebih provokatif, seperti dapat disimak dari kutipan berikut:

Nyata sekali dalam tiap perundingan. Belanda selalu memaksakan kemauannya menjajah kembali bangsa dan negara Indonesia. Sebaliknya bangsa Indonesia bertekad mempertahankan Proklamasi. dan menjadi bangsa merdeka selama-lamanya. Persetujuan Linggajati yang jelas-jelas merugikan Indonesia pun masih diingkari Belanda dengan melancarkan Agresi Militer I. Perjuangan bangsa Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebabkan Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata dan atas usul Amerika dibentuk Goodwill Commission (Komisi Jasa-Jasaa Baik), yang kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara (KTN) untuk membantu menyelesaikan persengketaan Indonesia Belanda.

KTN berhasil mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perundingan Renville. Persetujuan Renville yang juga sangat merugikan Republik Indonesia itu masih dilanggar Belanda dengan melancarkan agresi militer II



terhadap RI. Semua kota di Indonesia, bahkan Yogyakarta, ibu kota negara RI pada waktu itu diduduki pasukan penjajah Belanda

Rakyat Indonesia sama sekali tidak gentar menghadapi Belanda yang mempunyai persenjataan modern menurut ukuran saat itu. Perlawanan tidak dihentikan, bahkan makin berkobar. Dengan bergerilya pasukan Indonesia terus-menerus melancarkan serangan terhadap kedudukan Belanda. Belanda terkepung. Bahkan kota Yogyakarta yang sudah diduduki Belanda itu pada tanggal 1 Maret 1949 sempat direbut dan diduduki pasukan gerilya Indonesia selama enam jam di bawah komando Letnan Kolonel Suharto (sekarang Presiden RI) (Lestariyono, 1988, Jilid 2: 7-8).

Dari realitas yang berlaku tidaklah mengherankan apabila penelitian Darmiasti (2002: 127) mengambil simpulan bahwa PSPB merupakan buku teks yang bersifat ideologis. Sejarah diajarkan bagi siswa di sekolah bukan sebagai pengetahuan belaka, tetapi sejarah ditampilkan sebagai upaya untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Oleh karena itu, kebenaran sejarah ditentukan oleh pemerintah. Peristiwa-peristiwa sejarah yang ditampilkan dalam PSPB pun lebih banyak peristiwa politik yang dianggap memiliki nilai patriotisme.

Tanpa bermaksud menafikan pentingnya nilai-nilai patriotisme, dominasi kisah militeristik itu secara tidak langsung akan memberi pemahaman kepada para siswa bahwa manifestasi nasionalisme yang terbaik adalah memperjuangkan kebenaran yang diyakini dengan menggunakan kekuatan fisik. Maraknya perjuangan fisik, baik dalam bentuk demonstrasi, teror maupun tawuran, kiranya tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mereka tentang masa lampau bangsanya. Dengan wacana militeristik yang diproduksi oleh buku teks pelajaran sejarah akan mengembangkan karakter generasi muda yang memuja kekerasan sebagai jalan untuk memperoleh kebenaran, dan bukan diskusi kritis seperti diwacanakan oleh Habermas (McCarthy, 2009).

## 2. Aspek keberagaman pada penulisan sejarah revolusi kemerdekaan

Dari perspektif keberagaman, seluruh buku teks pelajaran sejarah yang dikaji lebih banyak memaparkan keberagaman dari aspek umur, daerah dan bidang kehidupan. Pada aspek umur, permasalahan yang diuraikan terutama adalah perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua dalam menanggapi berbagai fenomena historis yang berkembang, yaitu kekalahan Jepang dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam mengeksplorasi dinamika relasi golongan muda dengan golongan tua, hampir seluruh buku teks memperlihatkan adanya distorsi dan negasi dalam pembahasannya.

Distorsi dan negasi antara lain dapat disimak dari uraian buku teks karangan Notosusanto (1981/1992) sebagai berikut:

Para pemuda kemudian menyelenggarakan rapat pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945 di ruang Laboratorium Mikrobiologi di Pegangsaan Timur. Rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh, mendesak agar Sukarno-Hatta memutuskan ikatannya dengan Jepang dan mengadakan permusyawaratan dengan mereka. Kemudian Darwis dan Wikana diutus menemui Sukarno-Hatta, untuk menyatakan kemauan golongan pemuda. Namun Sukarno-Hatta tidak menyetujui kemauan golongan muda, sehingga timbul suasana tegang

Golongan pemuda tetap mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 16 Agustus 1945, sedangkan golongan tua menekankan masih perlunya diadakan rapat PPKI (Notosusanto, dkk., 1981, jilid 3: 94-95).

Distorsi tampak terutama pada alinea ke dua, yaitu dengan menggeser permasalahan perbedaan antara golongan muda dan tua menjadi masalah waktu.

Pemuda “mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 16 Agustus 1945”, sedang golongan tua “menekankan masih perlunya diadakan rapat PPKI”.

Untuk memahami perbedaan pandangan pemuda dengan golongan tua secara lebih komprehensif, kiranya perlu menyimak kesaksian Hatta sebagai pelaku sejarah yang sangat penting untuk periode ini sebagai berikut:

...malam tanggal 15 Agustus itu, dalam rangka persiapan Rapat Badan Persiapan besok pagi tanggal 16 Agustus itu, saya menyetik pembukaan Undang-Undang Dasar yang akan dijadikan naskah proklamasi. Sedang menyetik itu datang Soebardjo, kira-kira pukul 8 malam. Soebardjo mengatakan bahwa "Bung Karno sekarang sedang diserang oleh para pemuda. Perlu kita pergi ke sana sama-sama." Maka pergilah saya bersama Soebardjo ke rumah Bung Karno. Kami naik mobil Soebardjo karena sopir saya tidak di rumah. Didapati Soekarno sedang di kelilingi pemuda-pemuda, antaranya saya masih ingat adalah Soekarno dan Wikana. Aidit tidak ada di sana. Wikana banyak bicara. Wikana mendesak agar malam itu juga diproklamasikan (yaitu malam tanggal 15 Agustus). Soekarno mengatakan tak bisa, kami besok pagi (tanggal 16 Agustus) baru akan rapat. Wikana mengatakan bahwa kami tidak mau proklamasi itu dijalankan oleh Badan Persiapan, sebab itu buatan Jepang. Saya mengatakan, kalau Badan Persiapan dianggap buatan Jepang, Bung Karno, saya dan banyak pemimpin-pemimpin lain telah lama bekerjasama dengan Jepang. Jadi kalau begitu tentu perlu dicari orang yang akan memproklamasikan itu, dipilih dari orang-orang yang belum pernah bekerjasama dengan Jepang. Dan kami akan berdiri di belakang mereka. Tetapi pemuda-pemuda itu maunya Bung Karno juga. Waktu itu Wikana mengatakan, bahwa kalau malam itu sampai pukul 12 tengah malam Bung Karno tidak mengucapkan kemerdekaan Indonesia, maka besok pagi (16 Agustus 1945) akan terjadi pertumpahan darah (Yasni, 1980: 134).

Dari keterangan yang disampaikan oleh Hatta dapat diambil pemahaman bahwa pemuda menghendaki proklamasi kemerdekaan malam itu juga dan dilaksanakan tanpa ikatan dengan Jepang. Golongan tua setuju dan akan berada di belakang mereka. Akan tetapi, ketika pemuda meminta Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan, beliau menolak, dengan alasan akan mengkhianati PPKI yang dipimpinnya. Pada perkembangan selanjutnya, pemuda berencana untuk memproklamasikan sendiri dan melakukan perebutan kekuasaan Jepang. Hal itu terungkap antara lain dari ucapan Sukarni saat menculik Hatta. Sukarni menyatakan bahwa pemuda "akan memerdekakan Indonesia dan

meneruskan Pemerintahan dari sana, di luar kota” (Yasni, 1980: 136). Dari penjelasan lisan Hatta tersebut dapat dipahami bahwa ketidaksetujuan golongan tua adalah tentang diri mereka yang hendak dijadikan proklamator dan bukan tentang terhadap gagasan untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa ikatan dengan Jepang seperti ditulis Notosusanto (1981/1992) pada alinea pertama di atas. Dari sudut pandang ini, Notosusanto dapat dikatakan telah melakukan penegasian terhadap pandangan golongan tua.

Dari perspektif keberagaman daerah, buku teks pelajaran sejarah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal itu tampak dari semakin banyaknya fenomena historis di daerah yang diusahakan untuk dimasukkan ke dalam isi buku teks. Pada periode kurikulum tahun 1975, buku teks karangan Idris menggambarkan aksi pemuda di berbagai daerah, terutama di wilayah yang didatangi oleh pasukan Inggris/NICA. Usaha dirintis tersebut tidak berlanjut pada buku teks masa kurikulum tahun 1984. Dari ketiga buku yang dikaji, uraiannya sangat kurang dalam mengeksplorasi aksi-aksi yang terjadi berbagai daerah. Penggambaran keragaman daerah masih sangat terbatas pada kota-kota di Jawa. Buku teks pelajaran sejarah untuk kurikulum 1994 hampir sama dengan periode sebelumnya. Satu-satunya buku teks yang mengeksplorasi aksi-aksi pemuda di luar Jawa hanya karangan Waridah (2000), yaitu dengan menarasikan perjuangan pemuda Aceh, Medan, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan bahkan Papua. Pada periode kurikulum 2006, buku teks Mustopo (2007) merupakan pengarang yang paling baik dalam menggambarkan aksi perjuangan yang terjadi di berbagai daerah. Bahkan dia memaparkan perjuangan di daerah

yang di bawah kekuasaan pasukan Australia. Buku teks karangan Tarunasena juga memaparkan aksi perjuangan di berbagai daerah di luar Jawa, seperti Medan, Manado dan Bali. Kelemahan utama adalah uraiannya dilakukan dengan singkat, sehingga kurang komprehensif. Di pihak lain, buku teks karangan Hapsari dan Syukur sangat kurang mengeksplorasi keragaman dari perspektif wilayah.

Dari uraian keragaman dari perspektif wilayah yang dilakukan oleh buku teks, sangat tampak pandangan militeristik yang diwacanakan. Pandangan itu dapat disimak dari pemilihan peristiwa yang dibahas, yaitu aksi-aksi pemuda secara fisik dalam merebut kekuasaan senjata dari tentara Jepang serta pertempuran mereka melawan pasukan Sekutu/NICA.

Wacana militeristik menjadikan revolusi kemerdekaan digambarkan hanya sebagai usaha mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing, baik Jepang sebagai penjaga status quo, Sekutu sebagai pemenang perang maupun NICA yang berusaha menjajah kembali Indonesia. Berbagai fenomena historis yang terjadi di daerah tidak dapat dimasukkan ke dalam buku teks pelajaran sejarah, hanya karena bukan perjuangan melawan kekuatan asing. Salah satu fenomena yang tidak ada dalam buku teks adalah revolusi sosial yang terjadi antara lain di Sumatera Timur dan Surakarta. Di Sumatera Timur revolusi sosial meletus pada tanggal 3 Maret 1946. Pada awalnya masyarakat bermaksud menghadang Belanda (NICA) yang dikabarkan akan mendarat di Tanjung Balai. Ketika NICA tidak jadi datang, massa rakyat beralih sasaran ke kaum bangsawan Melayu, karena dianggap memihak penjajah Belanda (Reid, 1987). Di pihak lain, pada revolusi sosial di Surakarta yang meletus pada bulan Oktober 1945, rakyat



menghendaki pemerintahan dalam bentuk swapraja. Pada Oktober itu juga, penasihat Sunan Pakubuwana XII, KRMH Sosrodiningrat, diculik dan dibunuh. Bupati-bupati di Daerah Istimewa Surakarta yang masih kerabat Kraton diturunkan oleh massa. Pada April 1946, penasihat Sunan yang baru, KRMT Yudonagoro, juga diculik dan dibunuh bersama sembilan pejabat di Kepatihan. Dengan berdasar perkembangan situasi itu, maka pada tanggal 16 Juni 1946 pemerintah mengakhiri status Surakarta sebagai Daerah Istimewa dan menggantinya sebagai karesidenan (Kartodirjo, 2007; Harianto, 2011).

Berbeda dengan pada kedua daerah di atas, pada tiga daerah di Jawa Tengah, yaitu Pematang, Tegal dan Brebes massa rakyat melakukan revolusi sosial terhadap birokrasi pemerintahan dari tingkat residen sampai kepala desa. Revolusi sosial yang meletus pada bulan Agustus 1945 dan terkenal sebagai Peristiwa Tiga Daerah itu didorong oleh dendam kepada para pejabat pemerintahan, karena dianggap menjadi kepanjangan tangan penjajah. Mereka menempatkan rakyat hanya sebagai sapi perahan (Lucas, 1989).

Dinamika yang begitu kaya di berbagai daerah tidak mampu dicantumkan oleh buku teks pelajaran sejarah, sehingga keberagaman menjadi tidak dapat terwacanakan dengan optimal. Akibatnya siswa sebagai pembaca akan memperoleh kesan bahwa masa revolusi kemerdekaan hanya berisi tentang perlawanan masyarakat terhadap pasukan Jepang dan Sekutu/NICA.

Pembahasan tentang keberagaman dari perspektif bidang kehidupan, terlihat buku teks karangan Notosusanto (1981/1992) menjadi acuan. Hal itu terlihat bahwa hampir semua buku teks sepanjang periode yang dikaji

menguraikan perkembangan bidang politik, ekonomi dan sosial budaya seperti yang dilakukan oleh Notosusanto. Perbedaan antara satu buku teks dengan yang lainnya lebih pada pilihan kalimat yang digunakan serta keluasan dan kedalaman narasinya.

Dengan mencermati keberagaman yang dieksplorasi oleh buku teks, terlihat sejarah Indonesia bersifat sangat maskulin. Tidak satupun buku teks yang secara spesifik menguraikan peran wanita dalam berbagai dinamika historis yang terjadi. Satu-satunya wanita yang namanya disebut adalah Ktut Tantri, yang digambarkan sebagai “wanita Amerika yang aktif mengumandangkan pidato-pidato revolusinya dalam bahasa Inggris melalui Radio Pemberontakan Bung Tomo” (Sardiman, 1996, Jilid 2c: 91).

### **3. Aspek sintesis menuju integrasi nasional pada penulisan sejarah revolusi kemerdekaan**

Satu-satunya fenomena historis yang diuraikan oleh buku teks dengan relatif mendalam membahas integrasi nasional adalah perubahan Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perbedaan uraian satu buku teks dengan yang lainnya terletak pada sudut pandang yang digunakan. Buku teks karangan Siswoyo (1979) dan Idris (1979) yang digunakan untuk kurikulum tahun 1975 memfokuskan diri pada proses perubahan dari RIS menjadi NKRI, sedang buku teks Notosusanto (1981) lebih menekankan pada genetika historis perubahan tersebut.

Pada periode kurikulum tahun 1984, secara garis besar narasi buku teks Notosusanto (1981) menjadi kiblat. Meskipun demikian, buku teks Soewarso (1986) mencoba menyusun narasi yang berbeda, yaitu dengan menonjolkan aspek prosedur yang digunakan untuk melakukan perubahan dari RIS ke NKRI. Pada periode kurikulum 1994, buku teks Notosusanto (1981) tetap menjadi acuan. Satu uraian yang berbeda diberikan oleh buku teks karangan Sardiman (1996). Dalam buku itu kembali dimunculkan sudut pandang yang lebih menekankan pada proses. Pada kurikulum 2006, sudut pandang yang digunakan buku teks terlihat lebih beragam. Buku teks Mustopo (2007) mengeksplorasi perubahan RIS menjadi NKRI dari perspektif hukum yang berlaku pada saat itu, sedang buku teks Hapsari dan Syukur (2008) memunculkan tokoh Mohammad Natsir dengan mosi integralnya. Di pihak lain, buku teks Tarunasena (2007) berusaha menekankan diri pada proses, tetapi dalam narasinya terdapat kesalahan faktual yang cukup mengganggu.

Dengan berlandas pada uraian yang diberikan oleh buku teks tentang perubahan dari RIS ke NKRI menampakkan bahwa semangat integrasi nasional sebenarnya telah berkembang, baik di kalangan pemimpin nasional maupun rakyat kebanyakan. Salah satu fenomena historis yang merepresentasikan semangat integrasi nasional adalah ketika pemuda menemui generasi tua di rumah Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1945 malam. Dalam pertemuan itu Wikana mengancam bahwa apabila Soekarno tidak bersedia memproklamasikan kemerdekaan malam itu juga, “rakyat dan pemuda-pemuda kita akan berontak dan mulai akan membunuh orang-orang Ambon di sini” dengan alasan mereka

dianggap kaki tangan Belanda (NICA). Mendengar ancaman itu, Hatta menanggapi, "Itu kan baru dianggap. Sudah berapa lama Saudara-Saudara dari Ambon itu bekerjasama dengan kita, sekarang mereka akan dibunuh? Cara bagaimana itu" (Yasni, 1980: 135). Tanggapan itu merepresentasikan bahwa Hatta memiliki komitmen yang tinggi terhadap persatuan nasional dan menempatkan warga Ambon sebagai "saudara". Dari sudut pandang ini, sebenarnya buku teks dapat menampilkan lebih banyak fenomena historis untuk menunjukkan terjadinya proses integrasi nasional.

Salah satu fenomena historis yang berpotensi untuk merepresentasikan proses integrasi nasional adalah kebersamaan antara golongan tua dengan pemuda saat mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kebersediaan pemuda untuk mengakui bahwa mereka tidak mampu mewujudkan proklamasi yang terlepas dari Jepang dan akhirnya ikut berkumpul di rumah Maeda merupakan fenomena yang dapat merepresentasikan terjadinya integrasi nasional.

#### **4. Kualitas penyajian pada penulisan sejarah revolusi kemerdekaan**

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kualitas penyajian untuk masing-masing buku teks dalam membahas bab revolusi kemerdekaan adalah sama dengan bab sebelumnya, yaitu pergerakan nasional. Hal itu dimungkinkan oleh penerapan satu pola penyusunan buku teks untuk seluruh isi buku oleh setiap pengarang. Sebagai gambaran, apabila buku teks tidak menyusun peta konsep untuk pembahasan pergerakan nasional, maka dia juga tidak akan menyusun itu untuk pembahasan revolusi kemerdekaan.

Perbedaan yang terjadi terutama adalah gaya penyampaian informasi atau materi yang termanifestasi pada perbedaan gaya bahasa yang digunakan. Pada pembahasan pergerakan nasional, buku teks cenderung menggunakan bahasa ilmiah dengan menjaga obyektifitas. Hal itu terlihat antara lain dari upaya pemberian jarak antara subyek kajian dengan pengarang buku teks. Usaha menjaga jarak dengan subyek kajian tampak dari tidak ditemukannya kata ganti orang pertama (saya) maupun orang ke tiga (kita) dalam uraian penjelasan materi.

Di pihak lain, ketika membahas revolusi kemerdekaan, buku teks terlihat menggunakan gaya bahasa bercerita yang justru sedapat mungkin melibatkan pembaca dalam uraian materi. Hal itu terlihat antara lain dari penggunaan kata ganti ketiga (kita) di dalam teks. Meminjam kategorisasi yang dibuat oleh Abdullah dan Surjomihardjo (1985), gaya penulisan revolusi Indonesia pada buku teks pelajaran sejarah mengikuti model penulisan sejarah pewarisan. Dalam model itu, ciri utamanya adalah penonjolan kisah kepahlawanan perjuangan kemerdekaan dengan tujuan untuk menumbuhkan kekaguman pembaca terhadap peran historis yang dilakukan oleh para pelaku serta kesadaran untuk mewarisi pengalaman historis para pelaku tersebut.

Gaya penyampaian materi sebenarnya telah diatur oleh BSNP, yaitu tidak bersifat indoktrinatif, dalam arti “materi sejarah dalam buku ajar sejarah mampu menyajikan sumber sejarah secara analitis, kritis, dan objektif berdasarkan penggunaan sumber yang komparatif, valid dan reliabel yang terlihat dalam kasus-kasus peristiwa sejarah”. Dari sudut pandang ini, model penulisan sejarah



pewarisan akan berdampak pada berkurangnya kualitas penyajian, khususnya pada item penyampaian materi yang tidak bersifat indoktrinatif.

Pada buku teks untuk kurikulum 1975, berkurangnya kualitas penyampaian materi terjadi pada semua subyek penelitian. Dalam buku Idris (1979), penggunaan kata “kita” dilakukan baik saat membahas fenomena politik nasional maupun pertempuran daerah. Hal itu antara lain terlihat saat buku teks menguraikan politik ekonomi yang diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai berikut:

Perjuangan di bidang ekonomi tidak kalah beratnya dengan perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata. Tindakan-tindakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang ekonomi antara lain ialah: (a). Maklumat Politik Pemerintah tanggal 1 Nopember 1945 yang antara lain menegaskan bahwa: (1). adanya jaminan dan kesempatan bagi *penanaman modal Asing* di Indonesia, (2). jaminan bahwa segala milik bangsa asing akan dikembalikan kepada yang berhak, sedang yang dinasionalisasikan oleh Pemerintah akan diberi ganti kerugian dengan seadil-adilnya, (3). segala hutang Hindia Belanda sebelum penyerahan Jepang dan patut menjadi tanggungan kita, kita akui sebagai hutang kita (Idris, 1979. Jilid 1: 93-94)

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa buku teks berusaha melibatkan pembaca dalam dinamika sejarah Indonesia masa revolusi kemerdekaan. Pada kalimat terakhir kutipan tersebut, buku teks menggunakan kata ganti “kita” sebanyak tiga kali yang dapat dipahami sebagai usaha keras untuk melibatkan pembaca dalam fenomena historis yang dibahas.

Tidak jauh berbeda dengan Idris, buku teks Notosusanto (1981) juga banyak menggunakan kata “kita” dalam uraiannya. Sebagai contoh adalah ketika menggambarkan perebutan senjata Jepang oleh para pemuda sebagai berikut:

Di samping pengambil-alihan kekuasaan, rakyat berusaha untuk memperoleh senjata-senjata Jepang. Karena umumnya pihak Jepang enggan menyerahkan senjatanya kepada pihak Indonesia, terjadilah pertempuran-pertempuran

dahsyat melawan pasukan-pasukan Jepang yang masih utuh kekuatannya. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Medan, Palembang, Ujungpandang, dan tempat-tempat lain di seluruh Indonesia yang ada pasukan Jepang, berjatuh korban-korban. Namun pengorbanan mereka tidaklah sia-sia, karena akhirnya berhasillah kita tegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Proses perebutan kekuasaan ini berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Oktober 1945 (Notosusanto, 1981. Jilid 3: 104)

Pada kutipan di atas terlihat bahwa uraian buku teks menempatkan keberhasilan para pemuda merebut senjata dari pasukan Jepang sebagai keberhasilan “kita”, yaitu pembaca, pengarang dan tentu saja pelaku sejarah. Dari sudut pandang ini, obyektifitas menjadi kabur, karena tidak dipisahkan secara tegas antara fakta, opini dan indoktrinasi untuk menyetujui pandangan pengarang sebagai pandangan siswa.

Gaya penyampaian yang lebih obyektif terdapat pada buku teks karangan Siswoyo (1979). Uraian buku teks tidak menggunakan kata “kita” untuk tujuan pelibatan pembaca. Hal itu dapat disimak dari kutipan di bawah ini:

Pembukaan diadakan, tanggal 28 Mei 1945, sedangkan persidangnya . dilakukan antara tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. bertempat di Gedung Cuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta Pusat. Dr. K.R.T. Rajiman Wediodiningrat selaku ketua dalam pidato pembukaannya mengajukan pertanyaan kepada sidang: "Apa dasar negara yang akan kita bentuk?" (Siswoyo, 1979. Jilid 1: 186).

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa kata “kita” digunakan oleh pelaku sejarah untuk menggantikan semua anggota BPUPKI. Dari sudut pandang ini, obyektifitas masih tetap terjaga dengan baik dan tidak berusaha melibatkan siswa sebagai pembaca di dalamnya.

Seperti ketika membahas pergerakan nasional, ketiga buku teks yang dijadikan subyek kajian belum mengarahkan penyajiannya untuk

mengembangkan pembelajaran mandiri siswa. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya pendahuluan dan peta konsep di awal bab, maupun rangkuman, soal latihan, tugas/kegiatan di akhir bab. Ketiga buku teks hanya berisi uraian materi dan sangat kurang dalam memperhatikan keberadaan siswa sebagai pembacanya.

Tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, buku-buku teks pelajaran sejarah untuk kurikulum 1984 juga mengalami penurunan kadar keilmiahan, terutama dalam gaya penyampaiannya. Selain pada buku karangan Notosusanto edisi revisi (1992), model penulisan sejarah pewarisan juga dijumpai pada buku teks Soewarso (1986). Hal itu antara lain terdapat pada uraiannya tentang kedatangan pasukan Sekutu di bawah ini:

Kedatangan pasukan Sekutu tersebut disambut dengan baik. Karena pemerintah kita berharap agar supaya negara-negara Sekutu segera bersedia mengakui Negara Republik Indonesia yang baru saja didirikan.

Kemudian terbukti bahwa AFNEI menyalahgunakan kepercayaan bangsa kita. Kehadiran mereka tidak hanya melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Sekutu, melainkan juga bermaksud mengembalikan kekuasaan Belanda di tanah air kita. Oleh karena itu rakyat di daerah-daerah segera bangkit serentak melawan tentara Inggris, Australia dan Belanda. Beban perjuangan rakyat Indonesia bertambah berat. Karena di satu pihak menghadapi tentara pendudukan Jepang dan di lain pihak menghadapi tentara Inggris, Australia dan Belanda (Soewarso, 1986. Jilid 3: 82).

Dari kutipan di atas terlihat bahwa buku teks menggunakan kata “pemerintah kita” pada alinea pertama dan kata “tanah air kita” pada alinea ke dua. Penggunaan kata “kita” tersebut menjadikan uraian tidak memberi jarak antara pengarang dengan subyek kajiannya dan begitu juga dengan para siswa terhadap subyek bacaannya. Ketiadaan jarak tersebut pada satu sisi akan dapat sangat menguntungkan, karena siswa akan menempatkan fenomena historis dalam sejarah Indonesia sebagai problem mereka di masa lampau. Di sisi lain, model itu

akan dapat juga membawa kerugian, karena pengarang memiliki ruang yang luas untuk melakukan provokasi, sesuai dengan keyakinan dan ideologinya.

Problem yang sama juga terdapat pada buku teks karangan Moedjanto (1992). Hal itu dapat disimak pada kutipan berikut:

Persetujuan Renville yang amat merugikan RI itu ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Walaupun dengan berat hati, itikad baik untuk mematuminya, memaksa pasukan-pasukan TNI meninggalkan dan mengosongkan daerah gerilya di belakang garis van Mook yang sangat luas. Seperti kita ketahui garis itu menghubungkan satu daerah terdapan yang dikuasai Belanda dengan daerah terdapan lainnya. Sementara disebut daerah "kantong" adalah daerah RI yang ada di belakang garis van Mook. Dari Jawa Barat ada sekitar 35.000 orang tentara anggota Divisi Siliwangi dihijrahkan menuju daerah RI di Jawa Tengah, di antaranya ditempatkan di Sala. Begitu juga dalam skala lebih kecil, kurang lebih 6.000 tentara dari Jawa Timur juga dibawa menuju Jawa Tengah atau Yogyakarta, yang sejak tanggal 4 Januari 1946 telah menjadi ibukota RI.

(Moedjanto, 1992. Jilid 3: 110)

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa buku teks berusaha melibatkan siswa sebagai pembaca dalam pembahasannya, yaitu dengan menggunakan kata "Seperti kita ketahui". Tidak berhenti di situ, buku teks juga menonjolkan subyektifitasnya secara lebih vulgar dengan menggunakan kata "berat hati" dan "itikad baik".

Seperti pada pembahasan pergerakan nasional, meski mengalami penurunan kadar ilmiah dalam model penulisan, tetapi buku teks karangan Moedjanto memiliki keunggulan dalam hal pendahuluan, tugas atau kegiatan dan daftar pustaka. Keunggulan itu terlihat begitu menonjol terutama apabila dibandingkan dengan dua buku yang dipergunakan untuk kurikulum 1984. Pada bagian pendahuluan, Moedjanto menuliskan sebagai berikut:



Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada dasarnya merupakan titik puncak perjuangan bangsa dalam menentang segala bentuk penjajahan asing. Dikatakan sebagai titik puncak karena hanya melalui proklamasi itu bangsa Indonesia yang terdiri atas multi-etnik dipersatukan dalam sebuah *nation-state*. Ini dapat terjadi bukan semata-mata karena faktor kebetulan saja, tetapi ditopang oleh nasionalisme yang telah berakar kuat di dada mayoritas rakyat.

Walaupun kemerdekaan Indonesia sudah dicapai pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa kita tidak secara otomatis telah berakhir. Sebelum bangsa Indonesia memasuki era pembangunan yang sesungguhnya, terlebih dahulu harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Kekalahan Jepang dari Sekutu membuka peluang bagi Belanda untuk datang kembali ke Indonesia dan menguasainya tanpa batas waktu yang jelas. Untuk itu, bangsa Indonesia ditantang untuk mengangkat senjata selama kurang lebih 5 tahun, yakni tahun 1945-1949. Periode ini dalam sejarah Indonesia sering disebut periode Revolusi Nasional, yaitu suatu revolusi atau perang kemerdekaan yang diwarnai oleh masa pertempuran dan diplomasi. Selain harus menghadapi tantangan-tantangan dari luar, bangsa Indonesia sempat digoncang oleh masalah intern, yakni pemberontakan PKI Madiun 1948. Dalam periode yang relatif singkat, Indonesia pernah jatuh ke dalam bentuk negara serikat, yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Namun, berkat keuletan dan kebulatan tekad segenap rakyat, keutuhan negara dapat ditegakkan kembali hingga sekarang.

(Moedjanto, 1992. Jilid 3: 91)

Dari pendahuluan yang disusun terlihat bahwa buku teks menempatkan siswa sebagai generasi yang hidup di era pembangunan. Berangkat dari kekinian, buku teks kemudian menarik ke belakang, yaitu pada topik revolusi kemerdekaan yang berisi dinamika perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada tahap selanjutnya buku teks memaparkan poin-poin historis penting yang muncul selama revolusi kemerdekaan. Dari sudut pandang ini, pendahuluan yang disusun telah sesuai dengan kriteria yang digunakan BSNP, meski belum optimal dalam memotivasi siswa sebagai pembacanya.



Pada bagian kegiatan, buku teks Moedjanto (1992. Jilid 3: 124) antara lain memberikan 8 soal sebagai berikut:

**Kegiatan**

Kerjakan tugas berikut ini secara perseorangan, kemudian diskusikan dalam kelompok. Setelah itu presentasikan dalam diskusi kelas.

1. Bagaimana siasat TNI menghadapi Agresi Militer Belanda II?
2. Mengapa Kabinet RI dalam sidangnya pada tanggal 19 Desember 1948 memutuskan untuk bertahan di kota dengan risiko menjadi tawanan Belanda?
3. Jelaskan isi Resolusi DK-PBB 28 Januari 1949!
4. Jelaskan tentang Serangan Umum 1 Maret 1949!
5. Apa yang dimaksud dengan Persetujuan Room-Royen?
6. Bagaimana pihak Indonesia mempersiapkan diri untuk mengikuti KMB?
7. Jelaskan beberapa ketentuan pokok Persetujuan KMB!
8. Bagaimana pengakuan kedaulatan disiapkan?

Dari kedelapan soal di atas, tampak bahwa siswa diarahkan untuk menguasai materi, yaitu menghapalkan fenomena historis yang terjadi sepanjang masa revolusi kemerdekaan. Dari perspektif kemampuan berpikir, aspek yang mungkin dikembangkan melalui kegiatan di atas adalah berpikir kronologis dan kausalitas. Kemampuan berpikir komparatif dan kritis tidak memperoleh perhatian dari pengarang. Kecakapan personal dan sosial juga terlihat belum mampu terjangkau oleh kegiatan yang diberikan.

Pola yang sama juga berlaku pada rangkuman. Buku teks Moedjanto merangkum fenomena historis dengan tanpa mengarahkan siswa untuk melakukan refleksi untuk menemukan relevansi revolusi kemerdekaan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Hal ini akan mengakibatkan sejarah berhenti sebagai pengetahuan dan sulit untuk meresap menjadi kesadaran. Dari perspektif ini,

tujuan pembelajaran sejarah untuk memanusiaikan manusia muda yang memiliki kesadaran sejarah kurang memperoleh perhatian dari pengarang buku teks untuk kurikulum 1984.

Gejala penurunan kadar keilmiahan dalam penulisan sejarah revolusi kemerdekaan dibandingkan dengan saat membahas pergerakan nasional juga terjadi pada buku-buku teks untuk kurikulum 1994. Buku teks Sardiman dan Kusriyantinah (1996) juga memperlihatkan gejala itu. Pada saat menguraikan pertempuran Kotabaru (Yogyakarta), antara lain digambarkan sebagai berikut:

Melihat pemandangan itu para pejuang kita mengamuk. Beribu-ribu massa menyerbu markas. Akhimya, pihak Jepang benar-benar terdesak dan berkibarlah bendera merah putih. Pasukan Jepang satu-per satu mulai menyerah. Senjata demi senjata beralih ke tangan pejuang Indonesia. Gudang senjata juga diserbu oleh para pemuda, sehingga banyak mendapat senjata. Pada saat itu beberapa pemuda telah berhasil memasuki markas Kotabaru melalui selokan saluran air (rial) dan langsung berhadapan dengan Otsuka. Ternyata, Otsuka mau menyerah, asalkan dihadapkan Yogya Koo (Kepala Daerah) Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Sardiman dan Kusriyantinah, 1996, Jilid 2c: 84).

Dari kutipan di atas terlihat bahwa buku teks menempatkan siswa sebagai pembaca untuk berpihak pada pejuang yang mengamuk. Tidak hanya diminta untuk berpihak, tetapi siswa juga diharapkan untuk mengagumi berbagai tindakan yang diambil para pejuang dan tentu saja mewarisi semangat juang mereka. Keberpihakan terhadap kepentingan nasional memang wajar dan harus dilakukan, tetapi tidak perlu meninggalkan sikap kritis terhadap fenomena historis yang terjadi dan menjadi keberpihakan yang membuta.

Meski berkurang kadar keilmiahan tulisannya, berbagai kekuatan penyajian lain yang dimiliki oleh buku teks karangan Sardiman dan Kusriyantinah pada pembahasan pergerakan nasional, tetap dapat dipertahankan. Salah satunya

adalah soal latihan dan kegiatan untuk siswa. Pada akhir pembahasan tentang revolusi kemerdekaan, pengarang memberikan 10 nomor soal essay (uraian) sebagai berikut:

**B. Kerjakan soal-soal berikut ini!**

1. Mengapa Belanda melakukan Agresi Militer I tahun 1947? Jelaskan!
2. Apa isi persetujuan Pastdam?
3. Sebutkan usul-usul Sutan Syahrir pada tanggal 27 Maret 1946, dalam upaya menyelesaikan konflik Indonesia–Belanda!
4. Jelaskan peranan KTN dalam penyelesaian konflik Indonesia–Belanda!
5. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang Pertempuran Medan Area!
6. Berikan penilaian tentang kerugian dan keuntungan bagi Indonesia mengenai isi Perjanjian Roem–Royen!
7. Mengapa akhirnya Kabinet Amir Syarifudin jatuh?
8. Jelaskan proses terbentuknya Republik Indonesia Serikat!
9. Sebutkan hasil-hasil keputusan KMB!
10. Mengapa akhirnya RIS kembali menjadi negara kesatuan RI?

(Sardiman dan Kusriyantinah, 1996. Jilid 2c: 175).

Melalui soal nomor (1), (7) dan (10) siswa diajak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kausalitas (sebab-akibat) dengan menempatkan agresi militer I, kejatuhan kabinet Amir Syarifudin dan kembalinya RIS menjadi RI sebagai fenomena/ tindakan historis yang rasional. Soal nomor (5) dan (8) juga dapat mengarahkan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kronologis, yaitu dengan menyusun tahapan-tahapan proses yang dilalui untuk terjadinya peristiwa sejarah. Bahkan pada soal nomor (6) para siswa diajak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan menilai keuntungan dan kerugian suatu tindakan yang dilakukan pelaku sejarah di masa lampau. Meskipun demikian, para siswa perlu diarahkan untuk tetap kontekstual, yaitu mengingat situasi dan kondisi

pada saat peristiwa sejarah itu terjadi dan jangan sampai menggunakan konteks sekarang.

Kecenderungan yang sama juga terjadi pada buku teks karangan Badrika (1996). Ketika menguraikan tentang pertempuran Ambarawa yang berlangsung dari 20 November sampai 15 Desember 1945, antara lain digambarkan sebagai berikut:

Batalyon Imam Adrongi meneruskan gerakan pengejarannya. Kemudian disusul 3 batalyon dari Yogyakarta, yaitu Batalyon 10 Divisi III di bawah pimpinan Mayor Soeharto (presiden kita saat ini), batalyon 8 di bawah pimpinan Mayor Sardjono, dan batalyon Sugeng. Musuh akhirnya terkepung. Walaupun demikian, pasukan musuh mencoba mematahkan pengepungan dengan mengadakan gerakan melambung dan mengancam kedudukan pasukan kita dari belakang dengan menggunakan tank-tanknya. Untuk mencegah jatuhnya korban, pasukan kita mundur ke Bendano (red: Bedono). Dengan bantuan resimen kedua yang dipimpin M. Sarbini, batalyon Polisi Istimewa yang dipimpin Onie Sastroatmodjo, dan batalyon dari Yogyakarta, gerakan musuh berhasil ditahan di Desa Jambu (Badrika, 1996. Jilid 2: 289-290).

Dari kutipan di atas terlihat bahwa buku teks Badrika juga menggunakan model penulisan sejarah pewarisan, yaitu dengan menempatkan siswa sebagai pembaca yang berpihak pada tokoh protagonis dalam cerita. Dalam konteks ini, siswa diarahkan untuk berpihak pada militer. Tujuannya adalah agar siswa mewarisi semangat militer pada saat berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Selain mengikuti pola umum penulisan sejarah pewarisan, buku teks Badrika juga mempertahankan dan bahkan mengembangkan kualitas penyajian buku teksnya. Perkembangan yang paling menarik tampak pada rangkuman dan refleksi yang diberi judul sebagai “Makna mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia” sebagai berikut:



Setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya, kita beralih kepada perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu. Dalam usaha itu, kita tetap menghadapi kesulitan-kesulitan dalam negeri. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kesulitan itu adalah melalui perjuangan diplomatik, perjuangan bersenjata, dan perjuangan pembangunan bangsa. Pada awal kemerdekaannya, bangsa Indonesia berjuang menghadapi tentara Sekutu yang mendarat di Indonesia. Pendaratan itu diboncengi pula oleh Belanda, yang ingin melanjutkan penjajahannya. Dengan demikian, kehidupan kita akan lebih berarti jika kita berusaha mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu. Cara untuk mengisi kemerdekaan adalah dengan usaha pembangunan, turut serta secara aktif dalam pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan merupakan masalah kita bersama. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Mempertahankan kemerdekaan bangsa merupakan bagian dari keseluruhan pembangunan nasional. Salah satu jalan untuk melaksanakan itu adalah menghayati dan mengamalkan Pancasila. Jalan semacam itu akan memberikan daya tahan bagi mental kita karena 'ketahanan mental merupakan persyaratan pembangunan.

Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena perjuangan kita melawan penjajah Belanda yang kedua kalinya berhasil dengan gemilang. Perjuangan para kesatria bangsa yang gagah perkasa telah berhasil menggagalkan Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947) dan Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948). Perjuangan yang berat itu meminta korban jiwa serta harta benda yang tidak ternilai besarnya. Sementara itu, perjuangan bangsa Indonesia seperti pertempuran Surabaya (10 Nopember 1945), Bandung Lautan Api (Maret 1946), perang Puputan Margarana-Bali (20 Nopember 1946), pembunuhan 40.000 jiwa di bawah pimpinan Kapten Westerling di Sulawesi Selatan (11 Desember 1946), perebutan kembali Yogyakarta oleh TNI (Maret 1949) adalah bukti-bukti yang paling getir bagaimana seluruh rakyat bangkit menghadapi penjajah (Badrika, 1996. Jilid 2: 314-315)

Dari kutipan di atas tampak bahwa siswa diajak untuk memaknai sejarah revolusi kemerdekaan sebagai perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang harus dilanjutkan dengan mengisi kemerdekaan. Cara untuk mengisi kemerdekaan adalah dengan “usaha pembangunan, turut serta secara aktif dalam pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia”. Gagasan untuk menemukan relevansi fenomena historis dengan kehidupan kontemporer merupakan terobosan yang patut dihargai. Meskipun demikian, gaya penyampaian yang cenderung



retoris dan provokatif perlu dihindarkan, seperti kalimat “Perjuangan para kestaria bangsa yang gagah perkasa telah berhasil menggagalkan Agresi...”. Pemaknaan harus berbasis fakta dan dalam jangkauan rasio serta etika keilmuan.

Buku teks ketiga yang dijadikan subyek penelitian, yaitu karangan Waridah dkk (2000) menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda dengan buku-buku teks lainnya. Pada uraiannya tentang pertempuran di Kalimantan, buku teks karangan Waridah antara lain menjelaskan sebagai berikut:

Beberapa pertempuran antara gerilyawan ALRI dengan Angkatan Laut Belanda terjadi pada bulan Januari 1945. Sepasukan TKR dan rakyat yang bertahan di Teluk Bogan Kalimantan telah mendapat serangan dari 40 orang tentara Belanda. Pasukan-pasukan tentara yang dipimpin oleh Husein Hamzah itu, menyebar di sebuah teluk, berlindung di balik pohon-pohon sambil menunggu kedatangan tentara Belanda yang mengejar mereka. Pasukan Belanda datang dengan sebuah kapal perang kecil bernama "Rinjani" yang kira-kira berisi 40 orang. Mereka bersenjata lengkap. Keadaan itu tak menakutkan pejuang bahkan mengibarkan Merah Putih di atas pohon untuk memancing kemarahan musuh atau menantang perang. Melihat bendera di pantai, mereka segera menyerang kedudukan pasukan Husein Hamzah. Dikiranya pasukan Republik Indonesia berkumpul di bawah bendera Merah Putih itu, ternyata tidak, Belanda tertipu.

Ternyata pasukan Husein Hamzah berhasil menipu tentara Belanda. Tentara kita keluar dari kiri kanan teluk, mengepung dan menyerbu pasukan musuh. Karena serangannya sangat mendadak maka tentara Belanda tak sempat lagi melawan. Mereka terdesak dan berhasil dihancurkan oleh TKR dan rakyat.

Setelah pasukan penyerbu itu berhasil dimusnahkan maka TKR juga mulai menembaki kapal "Rinjani" yang berlabuh di pantai. Beberapa tembakan tentara kita tepat mengenai kotak-kotak peluru dan mesiu yang ada dalam kapal. Kapal "Rinjani" meledak. Hancurlah seluruh kekuatan tentara Belanda yang datang menyerang pertahanan kita di Teluk Bogan. Karena seringnya pertempuran antara Belanda dengan gerilya di dekat pantai, gerilyawan yang memang sebagian adalah pelaut akhirnya diresmikan sebagai ALRI sebagai Divisi IV (Waridah dkk, 2000, Jilid 2: 232).

Dari kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa penggunaan kata “kita” merupakan bentuk usaha untuk menarik siswa sebagai pembaca agar ikut “menghayati” perjuangan TKR di Kalimantan. Permasalahannya penghayatan

tersebut lebih banyak dilandaskan pada ikatan emosional dan bukan atas pertimbangan rasional, sehingga justru tidak mengembangkan sikap dan kemampuan berpikir kritis siswa.

Pada buku teks pelajaran sejarah untuk kurikulum 2006, kualitas penyajian dalam pembahasan tentang revolusi kemerdekaan juga tidak banyak mengalami perubahan, apabila dibandingkan ketika membahas pergerakan nasional. Buku teks Mustopo dkk (2007) terlihat tidak lagi terlalu menyolok dalam mewariskan semangat 1945 kepada siswa. Hal itu tampak antara lain dengan tidak digunakannya kata “kita” di sepanjang uraian tentang revolusi kemerdekaan. Uraian dalam buku teks berusaha menjaga jarak antara pengarang dengan subyek kajiannya, seperti terlihat pada uraiannya tentang pertempuran Surabaya yang antara lain digambarkan sebagai berikut:

Pada tanggal 27 Oktober 1945, pukul 11.00, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang. Mengetahui kejanggalan itu, Pemerintah RI berusaha menanyakan hal itu kepada Mallaby. Walaupun Mallaby mengaku tidak mengetahui pamflet tersebut, namun ia berpendirian bahwa sekalipun sudah ada perjanjian dengan Pemerintah RI, ia akan melaksanakan tindakan sesuai dengan isi pamflet itu. Sikap Mallaby itu menghilangkan kepercayaan Pemerintah RI terhadapnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memerintahkan kepada para pemuda untuk bersiap-siaga menghadapi segala kemungkinan.

Pihak Inggris mulai menyita kendaraan-kendaraan yang lewat. Pada pukul 14.00 terjadi kontak senjata pertama antara para pemuda dengan pihak Inggris. Bentrokan meluas menjadi serangan umum terhadap kedudukan Inggris di beberapa sektor. Pada tanggal 28 Oktober 1945 kedudukan Inggris bertambah kritis. Tank-tank mereka berhasil dilumpuhkan. Beberapa objek vital dapat direbut kembali oleh para pemuda (Mustopo, 2007. Jilid 3: 45).

Dari kutipan di atas, keberpihakan kepada Indonesia ditampilkan dengan tidak menggunakan bahasa provokatif. Bahkan wajah bangsa Indonesia ditampilkan lebih beradab dari pada sekedar masyarakat yang fanatik membela

kepentingannya. Melalui kalimat “Mengetahui kejanggalan itu, Pemerintah RI berusaha menanyakan hal itu kepada Mallaby” buku teks berusaha menyampaikan pesan bahwa masyarakat Indonesia selalu terbuka untuk berdialog secara damai dan bermartabat.

Berbeda dari buku teks Mustopo yang membahas revolusi kemerdekaan dengan menampilkan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, buku teks karangan Hapsari dan Syukur (2008) mengkajinya dari perspektif kelembagaan. Uraian menyoroti revolusi kemerdekaan dengan membahas pembentukan berbagai lembaga negara, sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat secara garis besar. Sebagai contoh, buku teks Hapsari dan Syukur (2008. Jilid 3: 25) menggambarkan konflik Indonesia-Belanda dengan sangat ringkas sebagai berikut:

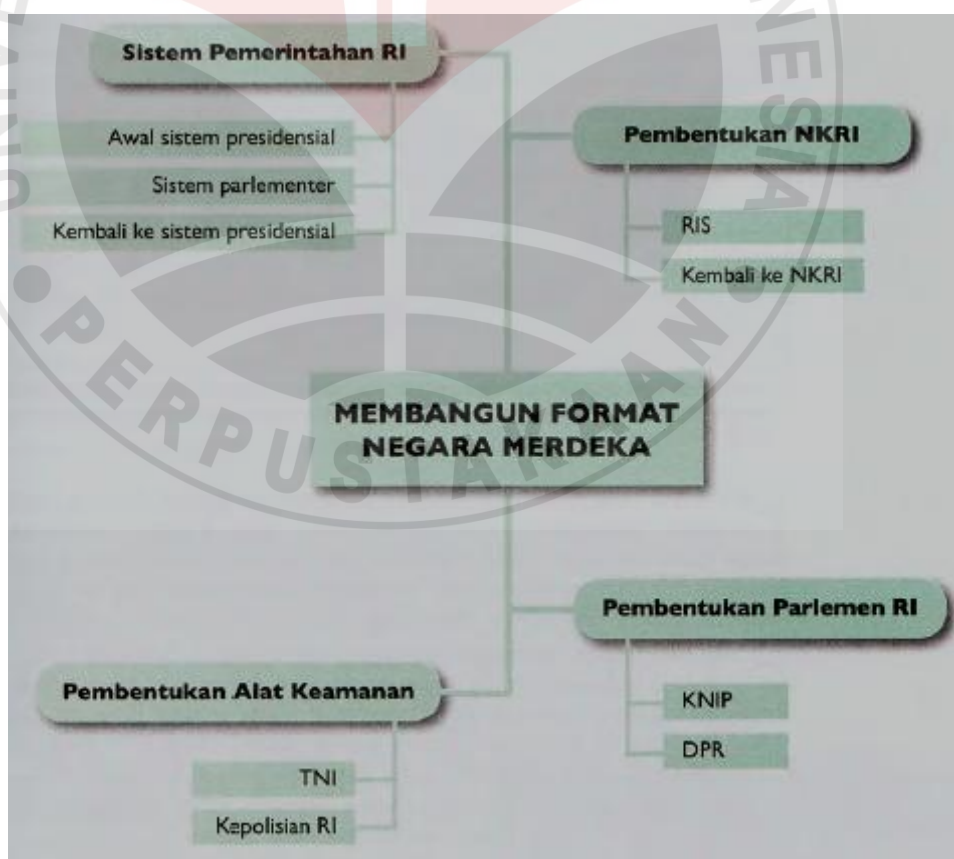
Selama empat tahun sejak proklamasi kemerdekaan RI (1945-1949), terjadi perang antara Indonesia dengan Belanda. Pihak Belanda tidak mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia dan menganggap wilayah Indonesia masih sebagai daerah jajahannya. Penilaian Belanda tersebut ditolak oleh bangsa Indonesia. Adanya dua kepentingan yang bertentangan inilah yang menyebabkan terjadinya perang besar. Bangsa Indonesia mengenang perang empat tahun itu sebagai perang kemerdekaan, yaitu perang yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta.

Usaha menghentikan Perang Kemerdekaan melalui jalur perundingan sudah dilakukan beberapa kali, sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan seperti Linggarjati, Renville, Roem-Royen, dan Konferensi Meja Bundar (KMB). Perundingan KMB di Den Haag, Belanda pada tahun 1949 berhasil menghentikan Perang Kemerdekaan tersebut. Pihak Belanda akhirnya mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia.

Dengan pola uraian yang ringkas memang memungkinkan untuk tetap menjaga jarak antara pengarang dengan permasalahan historis yang dikaji.

Meskipun demikian, terbatasnya kedalaman dan keluasan pemahaman siswa terhadap topik bahasan akan menjadi permasalahan yang sulit dihindari.

Selain penghilangan berbagai fenomena historis, terutama yang berbau militer, kualitas penyajian pada buku teks karangan Hapsari dan Syukur dalam membahas revolusi kemerdekaan relatif sama dengan saat mengkaji pergerakan nasional. Pada awal pembahasan, buku teks tidak lupa selalu menyampaikan peta konsep. Oleh karena masa revolusi kemerdekaan dibahas dalam tiga bab, maka setiap babnya memiliki peta konsep sendiri. Pada bab II yang diberi judul “Membangun Format Negara”, menyusun peta konsep sebagai berikut:



Hapsari dan Syukur (2008. Jilid 3: 18)

Dari peta konsep di atas, para siswa dapat mencermati topik apa saja yang akan dibahas bab II. Dengan demikian mereka dapat mempersiapkan diri untuk

mempelajari setiap topiknya. Peta konsep tersebut dilengkapi dengan pendahuluan yang secara tertulis memberi arahan dan motivasi kepada para siswa tentang cara-cara yang dapat ditempuh untuk mempelajarinya. Pendahuluan yang disusun dalam buku teks Hapsari dan Syukur (2008. Jilid 3: 22) diawali dengan kondisi sekarang. Dari fenomena yang dikenal akrab oleh siswa, buku teks kemudian mengajak mereka untuk menengok ke masa revolusi kemerdekaan. Pendahuluan ditutup dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan tentang topik yang akan dibahas. Pendahuluan untuk bab II yang diberi nama pengantar, selengkapnya adalah sebagai berikut:



## Pengantar



**G**edung MPR/DPR di ibu kota negara menjadi simbol kenegaraan Indonesia. Di gedung tersebut berkantor para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tersebut berlangsung secara berkala, yakni lima tahun sekali. Para wakil rakyat tersebut menjalankan tugasnya sebagai pembuat Undang Undang dan juga mengawasi jalannya pemerintahan Indonesia. Sementara itu, untuk melaksanakan urusan-urusan negara dilakukan oleh pemerintah, yang dikepalai oleh seorang presiden. Presiden pun dipilih melalui proses yang konstitusional (berdasarkan Undang Undang Dasar). Presiden memimpin sebuah kabinet untuk menjalankan roda pemerintahan dan mengurus rakyatnya. Pada saat ini, negara kita sudah memiliki badan-badan negara yang lengkap. Oleh karena itu, semua urusan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Apabila kita berkaca ke belakang, ke masa negara kita masih mengecap masa-masa proklamasi kemerdekaan, badan-

badan dan alat-alat negara belum selengkap sekarang. Meskipun pada saat itu Indonesia memang sudah memiliki unsur-unsur penting untuk dapat dikatakan sebagai sebuah negara seperti adanya rakyat, kedaulatan, pemerintahan, konstitusi, dan wilayah yang jelas, Indonesia pada waktu itu masih mencari bagaimana format negara yang cocok dan sesuai dengan semangat dan jiwa bangsa Indonesia.

Para pendiri negara bekerja keras mencurahkan pemikiran dan tenaganya untuk membangun negara yang baru merdeka ini agar dapat berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia internasional. Proses ini tidak mudah, tetapi mengalami berbagai bentuk ujian, hambatan, dan ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Namun demikian, para *founding fathers* pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia yang besar. Bagaimana upaya mereka membangun format negara merdeka? Seperti apakah format negara merdeka yang dicita-citakan Bapak Bangsa ini? Bab ini secara lugas akan membahasnya ...



Berbeda dari buku teks Hapsari dan Syukur, buku teks Tarunasena (2007) menyusun pendahuluan hanya singkat. Pada pembahasan tentang revolusi kemerdekaan, pendahuluan yang dibuat adalah sebagai berikut:

Semenjak kekalahan dalam pertempuran laut di Kepulauan Bismarck pada tanggal 1 Maret 1943, kekalahan demi kekalahan lainnya di berbagai medan pertempuran menyebabkan Jepang tidak lagi memikirkan untuk mempertahankan wilayah-wilayah pendudukannya. Pada akhir bulan Juli 1945, Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang mengadakan pertemuan di Singapura guna merencanakan pengalihan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia. Pada bagian ini, kalian akan diajak mengkaji peristiwa seputar proklamasi, proses terbentuknya negara RI, gejolak sosial di daerah, konflik Indonesia-Belanda, dan perjuangan ke arah terbentuknya ekonomi nasional (Tarunasena, 2007. Jilid 3: 2)

Dari kutipan di atas terlihat bahwa buku teks menggunakan fenomena historis global sebagai titik tolak, yaitu kemerosotan posisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang memunculkan gagasan dan rencana untuk “pengalihan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia”. Pada bagian akhir para siswa sebagai pembaca diajak untuk mengkaji berbagai peristiwa sejarah sepanjang masa revolusi kemerdekaan. Pendahuluan itu cukup baik, meski terdapat dua kekurangan, yaitu cara yang ditempuh siswa untuk mempelajari topik kajian serta motivasi.

Selain menyusun pendahuluan yang meski singkat tetapi cukup baik, kekuatan buku teks karangan Tarunasena relatif banyak, seperti adanya soal latihan, tugas/ kegiatan, glosarium, rangkuman dan daftar pustaka. Diantara berbagai kekuatan itu, salah satu yang menarik adalah pada tugas atau kegiatan yang diberikan kepada siswa. Salah satu tugas yang terdapat dalam buku teks Tarunasena (2007. Jilid 3: 18) adalah sebagai berikut:

#### Kegiatan 1.4

Bersama teman sekelompokmu, coba cari dan bandingkan peristiwa bersejarah pertempuran Surabaya dengan pertempuran antara Indonesia dengan Belanda/Sekutu yang ada di wilayahmu pada kurun waktu 1945-1949. Adakah persamaannya? Atau perbedaannya? Kalian bisa menggunakan berbagai sumber seperti wawancara dengan saksi hidup, buku-buku di perpustakaan, dan artikel di internet. Tuangkan hasil diskusi kalian pada sehelai kertas dan dikumpulkan kepada gurumu.

Dari Kegiatan 1.4 di atas, siswa diarahkan untuk tidak hanya mengembangkan aspek kemampuan berpikir kronologis, kausalitas dan komparatif, tetapi juga aspek kecakapan personal dan sosial. Melalui wawancara, *searching* di internet dan diskusi dengan teman sebaya, kecakapan personal dan sosial para siswa akan secara alamiah berkembang. Di atas semua itu, pembelajaran sejarah menjadi lebih menarik dan bermakna apabila dibandingkan dengan kegiatan belajar-mengajar di kelas. Dari sudut pandang ini, penyajian yang baik akan memungkinkan buku teks menjadi partner siswa dalam mengembangkan potensinya untuk menjadi *being* (manusia berkesadaran).